

No. Reg: 201090000029263

## LAPORAN PENELITIAN



### PENDIDIKAN KEISLAMAN DI KALANGAN MINORITAS MUSLIM BALI

#### Ketua Peneliti

**Dr. Ismail Muhammad, M.Ag**

NIDN: 2011046701

NIPN: 201104670108001

#### Anggota:

1. Dra. Safrina Ariani, MA

<b>Klaster</b>	<b>PTKSN</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Pendidikan Keislaman Di Kalangan Minoritas Muslim Bali
- b. Kategori Penelitian : PTKSN
- c. No. Registrasi : 201090000029263
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Pendidikan
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Ismail Muhammad
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 196704111996031001
  - d. NIDN : 2011046701
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 201104670108001
  - f. Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Safrina Ariani
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/PAI
  
3. Lokasi Penelitian : Propinsi Bali
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 75.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 31 Agustus 2020  
Peneliti,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Dr. Ismail Muhammad, MA**  
NIDN. 196704111996031001

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PENDIDIKAN KEISLAMAN DI KALANGAN MINORITAS MUSLIM BALI

**Ketua Peneliti:**

Ismail Muhammad

**Anggota Peneliti:**

Safrina Ariani

### **Abstrak**

Penganut Islam di Bali adalah kaum minoritas dan berada dalam sistem nilai yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Realitas ini mendorong peneliti untuk menelaah tentang pendidikan keislaman informal dan non formal di kalangan Muslim Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan pendekatan fenomenologik. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pendidikan Islam Informal dilaksanakan dengan beberapa pola yaitu: (a) Memperkuat ketahanan keluarga dengan spirit Islam, (b) Mengingatkan anak untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mengedepankan toleransi, (c) Mengantarkan anak untuk belajar agama Islam di RA dan pengajian (TPA), dan (d) Mengutamakan pendidikan formal anak di sekolah Islam (madrasah). (2) Pendidikan Islam non-formal dilaksanakan dengan: (a) Memperkuat peran dan posisi tempat ibadah (Masjid dan Musalla), (b) Pengajian mingguan dari rumah ke rumah, (c) *Majlis ta'lim* kaum ibu-ibu dalam bentuk arisan, dan (d) Penyuluhan agama Islam oleh penyuluh KUA. (3) Penganut Islam di Bali menghadapi beberapa situasi yang dalam waktu tertentu dapat menjadi persoalan serius dan keluar dari situasi nyaman, yaitu: (a) Ancaman dari lahirnya RUU Bali, (b) Kesulitan mendapat izin untuk pembangunan tempat ibadah baru, (c) Adanya penolakan terhadap kegiatan dan simbol Islam, (d) Problematika muallaf dan pembinaanya, (e) Sebagian orang Islam di Bali berperilaku tidak Islami, (f) dan ancaman kelompok Islam Radikal.

*Kata Kunci:* Islam, muslim, minoritas, Bali, Non formal dan Informal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur hanya kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada tim peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penelitian ini berjudul “**Pendidikan Keislaman di Kalangan Minoritas Muslim Bali**”. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pendidikan secara non-formal dan informal di lingkungan muslim Bali, dengan tujuan untuk mengungkap pola pendidikan keislaman yang dilakukan oleh para muslim Bali. Nilai-nilai positif dari penelitian ini, diharapkan untuk dapat dilaksanakan dalam masyarakat muslim lain yang berada di lingkungan minoritas muslim, sehingga ajaran dan nilai-nilai Islam dapat terus dilestarikan di lingkungan muslim, walaupun berada dalam lingkungan minoritas.

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan masyarakat
3. Kepala Pusat Penelitian dan jajarannya
4. Kepala Bidang Pendidikan Islam Provinsi Bali
5. Kepala Bidang Penerangan Islam Provinsi Bali
6. Seluruh Nara Sumber Penelitian
7. Para Reviuwer
8. Segenap pihak yang telah membantu pelaksanaan serta menyampaikan saran dan kritikan untuk penyempurnaan penelitian ini

Untuk penyempurnaan penelitian ini, tim peneliti mengharap kritikan, masukan dan saran yang konstruktif. Semoga penelitian ini bermanfaat, bagi pembaca, serta dapat diterima dengan layak secara akademis-keilmuan

Banda Aceh, 10 September 2020

Tim Peneliti

## Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Rumusan Masalah.....	2
III. Tujuan Penelitian.....	2
IV. Kajian Penelitian Terdahulu .....	3
V. Kajian Teori .....	5
A. Minoritas dan Diskriminasi .....	5
B. Pendidikan Minoritas.....	6
VI. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
A. Metode Penelitian.....	7
B. Sumber Data .....	8
C. Instrumen Penelitian.....	8
D. Rencana Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI.....	10
I. Islam dan Minoritas .....	10
A. Makna Minoritas.....	10
B. Jenis Kelompok Minoritas .....	11
C. Problematika Kaum Minoritas.....	21
D. Konsep Islam Tentang Mayoritas dan Minoritas.....	23
E. Minoritas Muslim Bali.....	25
II. Pendidikan Non-Formal.....	25
A. Makna Pendidikan Non-Formal.....	25
B. Model-model Pendidikan Non-Formal.....	27
C. Model Pendidikan Islam Non-Formal.....	33
III. Pendidikan Informal .....	37
A. Makna Pendidikan informal .....	37
B. Aspek-aspek Pendidikan Informal, dan Pola Pelaksanaannya.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	41
I. Metode Penelitian.....	41
II. Sumber Data.....	42
III. Instrumen Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
I. Islam di Provinsi Bali .....	44
A. Kampung Loloan.....	46

B. Kampung Pageyaman.....	46
C. Kampung Gel-gel, Klungkung .....	47
D. Kampung Lebah, Klungkung .....	48
E. Kampung Kecicang, Karang Asem.....	49
II. Pola Pelaksanaan Pendidikan Keislaman Informal dalam Lingkungan Keluarga Muslim di Bali.....	51
A. Memperkuat ketahanan keluarga Islam dengan membangun semangat Islam dalam keluarga.....	52
B. Mengingatkan anak untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mengedepankan toleransi.....	53
C. Mendidik anak untuk belajar agama Islam di pengajian (TPA dan RA Islam) yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat muslim.....	54
D. Mendidik anak di sekolah Islam.....	55
III. Strategi Pelaksanaan Pendidikan NonFormal Keislaman dalam Lingkungan Sosial Muslim Bali.....	58
A. Memperkuat peran tempat ibadah, yaitu Masjid dan Musalla di lingkungan Muslim .....	59
B. Pelaksanaan Pengajian Mingguan .....	62
C. Majelis Ta'lim Ibu-ibu dalam Bentuk Arisan .....	63
D. Penyuluhan agama Islam oleh penyuluh KUA.....	64
IV. Persoalan Realistik yang Dihadapi Masyarakat Muslim Bali dalam Pelaksanaan Pendidikan Keislaman.....	65
A. RUU Bali .....	65
B. Kesulitan mendapat izin untuk pembangunan tempat ibadah.....	66
C. Penolakan Kegiatan dan Simbol Islam .....	67
D. Mualaf dan Pembinaannya .....	68
E. Orang Islam di Bali yang berperilaku tidak Islami.....	70
F. Radikalisme Islam .....	70
BAB V P E N U T U P.....	72
Kesimpulan .....	72
Bibliografi .....	74

## BAB I PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa plural, terdiri dari berbagai etnis dan agama, dengan 87,2% WNI beragama Islam.<sup>1</sup> Artinya muslim Indonesia adalah mayoritas. Walaupun muslim Indonesia merupakan mayoritas, namun terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang penduduknya minoritas Islam, yaitu Bali (warga muslim 13,37%), NTT (9,03%) dan Sulawesi Utara (30,90%). Papua Barat (38,40%) dan Papua (15,89%).<sup>2</sup>

Secara lebih khas, di antara semua wilayah minoritas muslim di Indonesia, minoritas muslim Bali merupakan minoritas Islam yang berbeda, karena mereka berada dalam lingkungan masyarakat Hindu, sedangkan minoritas lain berada dalam lingkungan Kristen. Sehubungan dengan relasi muslim dengan penganut Hindu Bali ditemukan banyak romantika, perbedaan dan harmoni. Walaupun demikian, seorang peneliti Bali, I Made Pagueh, mengatakan bahwa jejak kebijaksanaan sistem agama lokal di Bali sebenarnya telah mengintegrasikan umat Hindu dengan Islam di Bali (Pangah, 2018, 88).

Namun demikian, muncul pertanyaan, jika secara umum WNI beragama Islam di wilayah Indonesia diyakini dapat melaksanakan kegiatan agama dan budayanya secara maksimal, sesuai kebutuhan dasarnya, apakah penganut Islam (di wilayah minoritas Islam) ini juga dapat melaksanakan semua kegiatan agama dan budayanya secara baik. Apakah ada hambatan-hambatan tertentu dari kelompok tertentu yang dapat menghambat hak asasi muslim minoritas.

Sebagai kelompok minoritas, para muslim Bali berada dalam sistem kehidupan yang berbeda, misalnya: terdapat banyak cafe yang secara bebas menyediakan minuman beralkohol, makanan yang tersedia harus diseleksi secara baik, karena banyaknya makanan yang tidak halal, wilayah wisata pantai yang para pengunjungnya bebas menggunakan pakaian minim, dan berbagai permasalahan lain yang berbeda. Persoalan ini juga menjadi tantangan kehidupan tersendiri bagi muslim, baik dalam pembinaan kehidupan sosial, atau dalam mempersiapkan generasi muslim masa depan, dalam keluarga.

Kenyataan ini menjadi daya tarik untuk mengkaji tentang muslim Bali, terutama tentang bagaimana muslim Bali mempersiapkan generasi masa depannya, atau bagaimana pelaksanaan pendidikan agama. Apakah minoritas muslim di Bali dapat mengembangkan pendidikan keislamannya secara baik? Persoalan ini merupakan masalah penting, karena

---

<sup>1</sup> Hasil sensus penduduk tahun 2010 (Sumber Badan Pusat Statistik, hasil sensus 2010).

<sup>2</sup> Hasil sensus penduduk tahun 2010, (Sumber Badan Pusat Statistik, hasil sensus 2010).

pendidikan dalam Islam dilaksanakan dengan melatih generasi melalui pembiasaan dan pelaksanaan ajaran Islam dalam lingkungan islami, agar menjadi manusia susila yang cakap dalam melakukan pekerjaan di dunia dan akhirat (Yunus, tt, 13), sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan dilakukan secara kontinu.

Pendidikan Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa (Mulyasa, 2005), atau membimbing, mengarahkan, dan mendidik seorang muslim agar mempelajari dan memahami agama Islam sehingga diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan memiliki kecerdasan spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat (Miftahurrahman Cs, 2018).

Agama Islam dapat dipahami dan diamalkan secara benar melalui penanaman nilai-nilai Islam secara berkepanjangan dan kontinu melalui pendidikan. Karena itu pendidikan keislaman merupakan kegiatan niscaya, baik ketika Muslim menjadi mayoritas maupun ketika menjadi minoritas.

Elaborasi ini menjadi dasar yang mendorong peneliti untuk menelaah secara lebih mendalam tentang kehidupan Muslim Bali, apakah mereka dapat melaksanakan pendidikan Islam secara baik.

## **II. Rumusan Masalah**

Beberapa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan informal keislaman dalam lingkungan keluarga muslim di Bali?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan non-formal keislaman dalam lingkungan masyarakat muslim di Bali?
3. Apa problematika realistik yang dihadapi masyarakat muslim Bali dalam pelaksanaan pendidikan keislaman nonformal dan informal?

## **III. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan temuan tentang pola pelaksanaan pendidikan informal keislaman dalam lingkungan keluarga muslim di Bali.
2. Mendeskripsikan temuan tentang pola pelaksanaan pendidikan non formal keislaman dalam lingkungan sosial muslim minoritas.

3. Mengidentifikasi persoalan realistik yang dihadapi Masyarakat Muslim Bali dalam pelaksanaan pendidikan non formal/in formal keislaman

#### **IV. Kajian Penelitian Terdahulu**

Indriana Kartini mengadakan penelitian dan menulis artikel berjudul: *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali* yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat Indonesia edisi XXXVII/NO.2/2011, mengungkap beberapa temuan tentang relasi muslim dengan penganut Hindu Bali. "Eksistensi Islam dapat ditemukan hampir di seluruh kabupaten di Bali, seperti di Kota Denpasar, Badung, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Klungkung" (Kartini, 2011, 216). Islam masuk ke Bali sejak abad ke-14, tepatnya di Kampung Gelgel, Kabupaten Klungkung. Cikal bakal orang Islam pertama yang datang ke Gelgel (pusat pemerintahan di Bali sejak abad ke-14) adalah para pengiring Dalem dari Majapahit yang berjumlah 40 orang. (Kartini, 2011, 116). Gelombang berikutnya, Islam masuk ke Bali pada abad ke-17, yaitu pelaut Bugis yang berdagang. Melalui perdagangan inilah Islam diperkenalkan ke masyarakat Bali dan berkembang secara damai (Kartini, 2011, 119). Kemudian pada tahun 1667 setelah terjadi perang Makassar para pedagang dan bangsawan Bugis-Makassar meninggalkan daerahnya untuk menghindari dari kejaran Belanda dan mendarat di Badung, Buleleng dan Jembrana. Ketiga daerah ini kemudian menjadi pusat kekuatan orang-orang Bugis di Bali (Kartini, 2011, 119). Di kemudian hari para muslim terus datang ke Bali dengan berbagai kegiatan dan di wilayah yang berbeda.

Lanjutan penelitian Indriani menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala di kalangan muslim dewasa ini dalam hal: (a) Pembangunan tempat ibadah (mesjid dan Mushalla). (Kartini, 2011, 135). (b) Persoalan penyediaan lokasi kuburan muslim, dan (c) Kesalahpahaman pada saat Hari Raya Nyepi (Kartini, 2011, 137).

Indriani menyebutkan relasi sosial antara ummat Hindu Bali dan penganut Islam Bali, telah terjalin sejak masa kerajaan, tidak hanya diwarnai kerja sama antar komunitas, namun juga juga diwarnai oleh persoalan-persoalan yang seringkali diakibatkan oleh miskomunikasi dan kurangnya pemahaman satu sama lain. Secara umum hubungan antara umat Hindu Bali dengan muslim yang minoritas dapat dianggap kondusif, walaupun dalam hal ini, warga minoritas harus lebih tahu diri.

I Made Pageh menguraikan tentang adanya relasi yang baik antara Umat Hindu Bali dengan Umat Islam. Bentuk relasi tersebut dibuktikan dengan: (a) Terdapat sebuah langgar (mushalla) yang berada dalam satu lokasi-berdampingan dengan pura Hindu di Pura

Kerajaan Bunutin Bangli, sehingga *Nyama Selam*<sup>3</sup> dan *Nyama Bali* bersama-sama dalam mengadakan ritual secara khusus. (b). Masyarakat Bali sudah membangun persaudaraannya sejak awal kedatangannya, sekitar abad ke-18, yaitu ketika Kerajaan Klungkung pecah menjadi beberapa kerajaan kecil (Astanegara). Kerekatan ini berlangsung hingga era globalisasi saat ini, dilakoni dengan khidmat, dan saling menerima dan memberi dengan ikhlas satu sama lainnya, baik dalam pemerintahan, penguburan, maupun pelaksanaan ritual keagamaan (Pageh, 2018, 91).

Dari penelitian I Made Pageh disimpulkan bahwa jejak kebijaksanaan sistem agama lokal Bali dapat mengintegrasikan umat Hindu dengan Islam di Bali. Integrasi terjadi sebagai akibat dari hubungan kekuasaan yang dimainkan dalam mengintegrasikan etnis nusantara yang hidup di Bali, kepentingan ekonomi (perdagangan), dan dakwah, ibadah, mistik dan leluhur dapat saling mendekati dalam pelaksanaan ritual (Pageh, 2018, 88).

Siti Raudhatul Jannah dalam artikelnya yang membahas tentang pluralisme dan persoalan yang dihadapi Muslim dan Hindu Bali membuat kesimpulan: (a) Hubungan antar umat beragama di Bali, terutama antara Hindu dengan muslim, sebagaimana bukti sejarah, telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan telah memberi waktu yang cukup untuk saling memahami dan menghargai peribadatan masing-masing pemeluk agama. Dengan melihat kondisi obyektif yang terjadi, rasa penghormatan yang terjalin selama ini akan terus berkembang berdasarkan rasa keadilan terutama dalam hal pelaksanaan ibadah masing-masing pemeluk agama. Hanya saja, ada prasyarat yang harus dipatuhi, terutama dari kalangan muslim yang hanya berjumlah sekitar 5,2 % dari total penduduk Bali (Jannah, 2012, 463). (b) Muslim senantiasa harus mampu berijtihad, berpikir dan bertindak toleran terhadap budaya tuan rumah tanpa mengorbankan akidah Islam yang dianutnya. Seiring perkembangan zaman, hal ini menuntut inovasi dan renovasi terhadap ejawantah dari nilai-nilai lokal dan menyeirinkannya dengan nilai Islam tanpa menyinggung perasaan penduduk setempat (Jannah, 2012, 463). (c) Mengutip dari Moerdiono, Raudhatul Jannah menyebutkan bahwa kehidupan beragama yang dinamis merupakan faktor dasar yang bersifat menentukan bagi terwujudnya stabilitas nasional, persatuan dan kerukunan, perdamaian dan ketenangan hidup (Jannah, 2012, 462).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nyama Selam adalah ungkapan keakraban kepada saudara yang beragama Islam atau orang yang beragama Islam. I Made Pageh, Kearifan Sistem Religi Lokal Dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.3, No. 2, 2018, hal. 91.

<sup>4</sup> Siti Raudhatul Jannah *Kegalauan* . . . . hal. 462. Lihat juga Moerdiono, "Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama Menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Republik Indonesia: Beberapa Pokok Pikiran", Makalah yang tidak diterbitkan, Jakarta, Sarasehan Sehari Majelis Ulama Indonesia, 5 Nopember 1966.

Secara lebih khusus penelitian tentang pendidikan Islam di Bali pernah dilakukan oleh Abdul Wahib yang diberi judul “Pergulatan Pendidikan Agama Islam di Kawasan Minoritas Muslim”. Penelitian dilakukan sebagai usaha untuk menelaah efek tragedi Bom Bali terhadap pendidikan Minoritas Islam di Bali. Abdul Wahib melakukan penelitian tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam di tiga sekolah di Bali, yaitu SMAN Kamboja Denpasar, SMPN Jimbaran dan SMPN Tanjung Benoa. Tulisannya dimuat dalam Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 2, November 2011 4771. Kesimpulan dari penelitian Abdul Wahib disarikan dalam tiga poin utama yaitu: (a) Dengan konsep *Nyama Selam*, selama berpuluh atau bahkan mungkin beratus-ratus tahun, relasi yang baik terjalin antara Hindu-Islam karena memang tak ada yang perlu dimasalahkan. Akan tetapi terjadinya bom yang sampai dua kali itu menghentak, mengusik dan merusak pola relasi yang selama berpuluh-puluh tahun sudah berlangsung secara simbiosis mutualis. (b) Keleluasaan beribadah di sekolah tetap dijamin oleh sekolah, walaupun sekolah tersebut belum memiliki mushalla yang khusus. Hal ini tidak ada hubungan dengan tragedi Bom Bali, karena baik sebelum maupun setelah terjadinya tragedi itu dalam masalah kebebasan beribadah tetaplah sama. (c) Sebagian besar masyarakat Bali mengerti bahwa Islam adalah agama yang ramah, banyak senyum, mau menghormati keyakinan dan ritual para pemeluk agama Hindu, oleh karena itu mereka pun menghormati orang Islam (Wahib, 2011, 477).

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahib tidak sampai mengungkapkan tentang pelaksanaan pendidikan dalam lingkungan sosial dan keluarga masyarakat muslim Bali, tetapi lebih terpusat kepada pendidikan Agama Islam di sekolah. Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahib memberi kontribusi yang baik bagi penelitian yang akan dilakukan karena setidaknya telah memberi gambaran umum tentang pendidikan Agama Islam di sekolah yang minoritas muslim.

## **V. Kajian Teori**

### **A. Minoritas dan Diskriminasi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bali, disimpulkan bahwa masyarakat Bali tidak diskriminatif dalam bidang ekonomi dan sosial. Karena semua masyarakat minoritas dapat berusaha secara bebas dan diterima untuk mengikuti pendidikan dan kegiatan sosial, tanpa melihat asal usul. Namun demikian diskriminasi mungkin saja terjadi dalam masyarakat jika dilihat dari aspek pelaksanaan agama, meskipun diskriminasi tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu. Padahal seharusnya semua pihak harus diberi kebebasan melaksanakan agamanya selama kebebasan tersebut tidak mengganggu pihak lain. Jika terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan agama Islam, maka diskriminasi ini dapat berlanjut

kepada terjadinya gangguan dalam pelaksanaan pendidikan keislaman di kalangan muslim. Padahal pemerolehan pendidikan agama adalah bagian dari hak asasi.

### **B. Pendidikan Minoritas**

Pendidikan adalah bagian dari hak asasi yang seharusnya diperoleh semua pihak, dan tidak boleh ada pihak yang menghambatnya. Pemenuhan tentang hak-hak pendidikan didukung oleh aturan-aturan yang berlaku. Pada tingkat Internasional jaminan pendidikan disebutkan dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* Pasal 26 disebutkan bahwa: *“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit”* (Weston, 1990, 300). (Bahwa tiap-tiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib; sedangkan pendidikan teknis dan profesional harus dimungkinkan untuk didapatkan; dan pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua orang berdasarkan manfaat).

Pada tingkat nasional Indonesia, hak tentang pendidikan disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, di mana terdapat tiga ayat yang membahas tentang pendidikan yaitu; ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan muatan UUD 1945 di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), Bab III, mengenai Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Undang-undang ini secara jelas menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak semua masyarakat yang diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Artinya, pendidikan adalah hak semua masyarakat dengan tidak memandang apakah ia berasal dari kelompok mayoritas ataupun kelompok minoritas, atau dengan kata lain jika terdapat orang yang tidak memperoleh pendidikan, maka ia tidak mendapatkan hak asasinya secara baik.

Banyak ahli yang telah memberi definisi tentang pendidikan. Namun untuk membatasi kandungan makna dari beragam tafsiran, di sini dikutip makna pendidikan berdasarkan UU no. 20 tahun 2003, seperti yang dikutip oleh Hasbullah yang menyebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. (Hasbullah, 2005, 4). Dari makna yang dikandung definisi resmi ini terlihat bahwa pendidikan memiliki beberapa kandungan penting, yang salah satunya adalah mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pendidikan agama adalah bagian penting dari pendidikan itu sendiri. Yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan agama bagi pemeluknya masing-masing. Orang Islam belajar ilmu agama Islam, orang kristen belajar ilmu agama Kristen dan demikian juga dengan pemeluk agama lainnya. Mereka berhak mendapatkan ilmu tentang agamanya di manapun mereka berada, karena agama adalah potensi spiritual yang tidak boleh diabaikan.

Dalam beberapa temuan dari hasil penelitian aspek pendidikan agama, kalangan minoritas sering kali mengalami gangguan, dengan berbagai alasan. Penelitian tentang pelaksanaan pendidikan Islam di kalangan minoritas Islam di Bali yang dilakukan Abdul Wahib, menyimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada persoalan dalam relasi antara minoritas dan mayoritas di Bali. Namun setelah terjadinya bom Bali, kalangan mayoritas mulai menaruh curiga terhadap kaum minoritas (Wahib, 2011, 477). Relasi mayoritas dengan minoritas yang terganggu dikhawatirkan akan mengganggu pendidikan agama Islam di kalangan minoritas Muslim.

## **VI. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **A. Metode Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji **Pendidikan Keislaman di kalangan Minoritas Muslim Bali**. Penelitian dimulai dengan kajian perpustakaan untuk merumuskan kajian teoritis yang berhubungan. Kajian teoritis yang akan dibahas berkenaan dengan prinsip mayoritas/minoritas, diskriminasi dan pendidikan. Untuk itu *library reseach* merupakan suatu bagian penting yang dilakukan untuk menyelesaikan sebagian dari penelitian ini.

Adapun untuk penelitian lapangan, dirancang untuk menggunakan metode kualitatif (Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damianti, 2006, 73-74).<sup>5</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diproses melalui sistem statistik atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya bisa saja dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif (Lexi J. Moleong, 2002, 3).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan pendekatan fenomenologik (Noeng Muhajir, 1996, 21, 53, 81 dan 143).

## **B. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini dikumpulkan dari:

1. Dokumen, yaitu dokumentasi yang berhubungan dengan sistem kehidupan masyarakat Muslim di Bali, yang diusahakan sedapat mungkin dikumpulkan dari MUI, tokoh masyarakat dan/atau organisasi yang memilikinya.
2. Peristiwa. Mengadakan pengamatan secara langsung dari peristiwa, yang berhubungan dengan Pendidikan Keislaman Non-Formal dan In-Formal di Kalangan Minoritas Muslim Bali. Temuan-temuan tersebut kemudian dirumuskan secara teoritis berdasarkan fenomena yang ada (Lexi J. Moleong, 2002, 72).
3. Informan, yaitu para nara sumber yang terkait dan mempunyai informasi penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode (Suharsimi Arikunto, 2002, 156). Setiap metode pengumpul data mempunyai instrumen tersendiri, yang disesuaikan dengan keperluannya masing-masing.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yaitu telaah dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Untuk lebih praktisnya, maka peneliti membuat beberapa instrumen pengumpul data sesuai metode tersebut, seperti berikut :

1. Telaah dokumentasi, instrumennya adalah pedoman dokumentasi dan *check list*.
2. Wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara.

---

<sup>5</sup> Beberapa para ahli masih ragu-ragu atau belum mempunyai pandangan yang jelas tentang metode kualitatif. (Lihat: Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 73-74). Dalam beberapa tulisan yang diedit oleh Julian Brannen juga tidak ada ketegasan dan cenderung agak ragu-ragu tentang apakah kualitatif itu sebuah metode atau sebuah pendekatan (Lihat: Julian Brannen (ed), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 12-13; Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1, 13, 14, 15 dst; Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UNM Press, 2005), cit. I, hal. 1). Demikian juga Lexi J. Moleong, yang secara tegas memberi judul bukunya dengan *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Lihat: Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), cet ke- 18, hal. 3).

3. Observasi, instrumennya adalah pedoman observasi, kamera dan lain-lain. Walaupun demikian sesuai dengan kaedah metode penelitian, bahwa dalam metode kualitatif, manusia (peneliti) dapat secara langsung menjadi instrumen observasi bagi penelitiannya. (Lexi J. Moleong, 2002, 4-8). Dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan secara disengaja, maka diharapkan semua informasi penting dapat diperoleh secara maksimal.

## **VII. Rencana Pembahasan**

Pembahasan yang akan dilakukan dalam laporan penelitian ini meliputi lima Bab, yang kemudian akan disarikan dalam satu tulisan dalam jurnal sebagai outcome dari penelitian.

- I. Bab I (Membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya mencakup Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan kajian terdahulu).
- II. Bab II (Membahas tentang kajian teori yang akan digunakan sebagai panduan untuk mengkaji aspek penelitian di lapangan)
- III. Bab III (Menguraikan tentang metode dan teknik penelitian)
- IV. Bab IV (Munguraikan secara lengkap tentang hasil penelitian berdasarkan data asli yang dilengkapi dengan analisis seperlunya. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi temuan yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan keislaman dalam masyarakat muslim minoritas Bali.
- V. Bab V (Membahas tentang kesimpulan penelitian).

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

### I. Islam dan Minoritas

#### A. Makna Minoritas

Secara etimologis, istilah minoritas berasal dari kata "minority", yang berarti "golongan kecil". (Echol, 1982, 381). Dalam kamus Webster disebutkan bahwa kata "minority" diberi beberapa makna yaitu "(1) *The lesser part or smaller number; less than half of a total.* (2) *a group, party, or faction with a smaller number of votes or adherents than the majority* (3) *A racial, religious, ethnic, or political group smaller than and differing from the larger, controlling group in a community, nation etc.*" (Webster: 1980, 906), Ungkapan di atas, dalam Bahasa Indonesia adalah: a) Bagian kecil atau sedikit jumlahnya; kurang dari setengah dari keseluruhan. b) Kelompok, partai atau golongan yang memiliki sedikit anggota atau pengikut dari jumlah mayoritas. c) Satu kelompok kecil suku, agama atau politik yang lebih kecil dan berbeda dari kelompok besar yang menguasai (mengontrol) dalam masyarakat, negara dan lain-lain.

Secara terminologis, terdapat banyak uraian tentang makna kata minoritas. Dalam Kamus Istilah Antropologi disebutkan bahwa kata minoritas bermakna "Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat . . ." (Dep. PK, 1984, 118). Istilah "minoritas" juga dapat dipahami secara numerik yaitu sebagai populasi yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan saudaranya yang berada dalam jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan (Komnas HAM, 16, 4). Nella Sumika Putri menyebutkan bahwa kelompok minoritas adalah kelompok yang karena sifat-sifat fisik dan budayanya dipisahkan atau dibedakan dari kelompok lainnya dalam suatu masyarakat, dimana mereka mengalami perlakuan yang berbeda dan tidak setara dan menjadi sasaran diskriminasi kolektif (Putri, 77, 166). Theodorson CS menyebutkan bahwa kelompok minoritas (*minority groups*) adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi (Theodorson Cs, 1979, 258-259). Mereka (kelompok minoritas) juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, dan dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik (Suparlan, 2014, 3).

Penjelasan dari beberapa kutipan di atas menunjukkan bahwa minoritas dipahami sebagai segolongan masyarakat yang jumlahnya lebih kecil yang berada dalam lingkungan kelompok yang berjumlah lebih besar dalam suatu komunitas. Kelompok minoritas ini berada dalam kehidupan diskriminatif oleh kelompok mayoritas.

## **B. Jenis Kelompok Minoritas**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diuraikan bahwa kelompok minoritas, pada dasarnya harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh negara di depan hukum. Dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 disebutkan bahwa negara wajib untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas dalam berbagai kelompoknya. Amanat yang dikandung oleh undang-undang tersebut mengharuskan semua pihak, termasuk negara untuk menghilangkan diskriminasi, pengadaaan kelas dalam masyarakat, dan tidak membeda-bedakan hak seseorang karena mereka minoritas.

Beberapa jenis perbedaan antar kelompok, yang terkadang menjadi pemicu benturan dimana sebagian berada di bawah tekanan, karena mereka dianggap sebagai kelompok minoritas diuraikan dalam bagian berikut:

### **1. Suku**

Dalam surat al-Hujurat ayat 13, disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan Allah menjadikan mereka berada dalam keberagaman suku bangsa. Tujuannya adalah agar manusia menjadi saling kenal, berdasarkan identitas mereka masing-masing (yang berbeda). Tidak ada kelebihan antara seseorang dibandingkan orang lain kecuali atas ukuran ketaqwaan. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa perbedaan suku bangsa adalah ciptaan Allah, yang merupakan bagian dari taqdir, dan bukan pilihan manusia itu sendiri. Dengan demikian perbedaan suku adalah hak asasi manusia yang tidak terganggu gugat.

Negara Republik Indonesia adalah satu negara yang terbentuk dari beragam suku. Menurut sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat 1340 suku bangsa. Suku terbesar di antaranya adalah suku Jawa yang mencapai 41 % dari total populasi Indonesia. Dalam Wikipedia disebutkan, jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari suku Jawa berjumlah 94.843.073 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang bersuku Aceh berjumlah 3.404.109, dan suku Bali berjumlah 3.924.908 jiwa.

Perbedaan antar suku bangsa dapat diamati secara kasat mata melalui beberapa ciri fisik dan non fisik, meliputi: 1) Bahasa dan logat ucapan yang berbeda, 2) Perbedaan fisik, dan 3) Perbedaan adat dan budaya. Satu perbedaan lain yang menjadi ciri suatu suku bangsa adalah lokasi kehidupan mereka. Keempat perbedaan tersebut dapat diamati secara gamblang tanpa perlu menelaahnya secara mendalam. Memang terdapat beberapa suku yang secara fisik mereka hampir sama, misalnya antara suku Bugis dan suku Mandar, yang sulit

dibedakan, tetapi ketika mereka berbicara dalam bahasa asli, segera diketahui asal suku mereka.

Walaupun demikian perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khas suatu suku (logat, bahasa dan budaya) bangsa tersebut kemudian dapat berubah mengikuti pola hidup, tempat dan zaman yang diikuti. Asimilasi dan pergaulan antar suku dapat menghilangkan identitas suatu suku bangsa, dan membuat antar suku berbaur secara utuh.

## 2. Agama

Kata agama dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu kata "a" dan "gama" yang bersetubuh menjadi kata agama. Pada dasarnya kata "a" bermakna "tidak" dan kata "gama" artinya pergi, jadi tidak pergi (Sodikin, 2003, 3). Dalam rujukan lain ada juga yang menyebutkan bahwa kata "gama" bermakna "kacau", jadi kata agama bermakna "tidak kacau" (Ghazali, 2009, 29). Kata agama ini dalam Bahasa Arab disebut dengan kata "din" dan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai "religion".

Secara terminologis, agama diberi beragam pengertian oleh para ahli. Mukti Ali menyebutkan bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (Ali, 1969, 9). Poerwadarminta sebagaimana yang dikutip oleh R. Abuy Sodikin menyebutkan bahwa agama merupakan segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dsb.) dan kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu (Sodikin, 2003, 3).

Keberadaan agama terjadi karena adanya keyakinan, tentang hal kegaiban (Tuhan) sebagai pencipta dan pengatur dunia. Akibat dari keyakinan ini, maka muncullah relasi antara manusia dengan pengatur dunia yang diyakini. Di sini, agama merupakan konsep hubungan manusia dengan Tuhan yang gaib dan kitab suci (yang diyakini), yang dalam ajaran Islam diuraikan secara awal dalam surat al-Baqarah ayat 2.

Konsep agama ini telah menjadi suatu bagian dari hidup manusia sejak zaman prasejarah, dan terus berubah mengikuti perkembangan sesuai dengan masa, situasi dan kondisi lingkungan. Maka tidak heran ketika pada masa pra sejarah, manusia mempercayai animisme dan dinamisme, kemudian terus berkembang, mengikuti perkembangan intelek manusia penganutnya.

Etnis, tingkat pemikiran, lokasi kehidupan dan zaman membentuk berbagai model keyakinan manusia dan hubungan dengan penciptanya, yang berakibat kepada perbedaan agama. Keyakinan tentang agama merupakan keyakinan yang hadir di dalam jiwa secara laten, tanpa dapat dipaksakan. Dalam konsep Islam manusia tidak dibolehkan memaksa

orang untuk mengikuti suatu agama, termasuk agama Islam (lihat al-Baqarah: 256). Ini bermakna bahwa Islam mengakui keberagaman keyakinan (agama) manusia, tidak boleh seseorang memaksa mengikuti agamanya, namun di sisi lain orang Islam mempunyai kewajiban untuk berdakwah mengikuti ajaran Islam.

Di Indonesia, keberagaman agama adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, yang mewarnai bangsa Indonesia yang majemuk. Perlu diingat bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila yang mewajibkan bangsa Indonesia menganut satu ajaran Agama. Dalam pasal 29 UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian direalisasikan melalui agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Keragaman dalam aspek non-agama, manusia (termasuk bangsa Indonesia) dapat berbagi warna kehidupan dan mungkin dapat dipadukan dalam pola kehidupan, dengan percampuran dan pembauran, karena keragaman ini tidak menyangkut aspek keyakinan. Tidak demikian halnya dengan keragaman agama, karena manusia tidak mungkin mencampuradukkan keyakinannya, atau mengikuti pola hidup agama yang berganti-ganti, karena agama berbentuk keimanan yang tidak didialogkan, tetapi terpatri secara doktrinil, dan menjadi sumbu jiwanya. Dalam hal ini, umat beragama wajib memahami dan wajib menghargai perbedaan, tanpa perlu memperkuat perbedaan, mencari-cari kesalahan, kekurangan dan saling menjelekkkan antar umat, tetapi sebaiknya wajib membina toleransi dan persaudaraan secara damai, dan saling bergotong royong untuk memperkuat persatuan.

Secara ideal, penganut Islam di Indonesia tidak layak mengangkat hegemoni mayoritas, dengan menistai keberadaan kaum agama minoritas. Tetapi mesti menghargai keberadaan kaum agama minoritas, menghargai pikiran/budaya mereka dan memberi mereka ruang sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, kaum agama minoritas mesti mampu memahami keberadaan diri yang minoritas, sehingga dapat berdialog pada aspek-aspek yang dibutuhkan.

Suatu hal yang menarik dari keragaman agama bangsa Indonesia adalah penganut Islam merupakan kaum mayoritas, namun pada propinsi tertentu, penganut Islam menjadi penganut yang minoritas. Situasi seperti ini ada di: Propinsi Bali (warga muslim 13,37%), NTT (9,03%) dan Sulawesi Utara (30,90%), Papua Barat (38,40%) dan Papua (15,89%) (SBPS, 2010).

Relasi antar umat beragama di Indonesia, menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia, dan selama ini telah terbina secara baik, namun terkadang juga terjadi sedikit pergesekan, karena adanya perbedaan pemahaman tentang masalah-masalah kecil. Namun

demikian gesekan ini dapat diredam secara baik, sehingga tidak menimbulkan friksi pada tingkat nasional.

### 3. Budaya

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kata "budaya" berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu "buddhaya" bentuk jamak dari "buddhi" yang berarti budi atau akal. Dari itu dipahami bahwa kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal (Koentjaraningrat, 1993, 9). Sebelumnya Geertz memberi definisi kebudayaan sebagai "cara berfikir dan cara merasa, (kebudayaan batiniah) yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia, yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan satu waktu" (Geertz, 1979, 72). Sehubungan dengan itu kebudayaan dianggap sebagai hasil interaksi kehidupan bersama (Teng, 2017, 71).

Beberapa pendapat di atas menggambarkan bahwa kebudayaan merupakan cara merasa dan berfikir batiniah manusia dari hasil interaksi yang terjadi secara sosial. Konsep budaya yang berasal dari akal budi dan interaksi manusia dengan manusia dan lingkungan dapat diidentifikasi dari unsur budaya yang berkembang.

Penelitian tentang budaya dengan mengamati berbagai gejala dan perilaku budaya, melahirkan berbagai unsur budaya. Banyak klasifikasi unsur budaya yang diungkapkan oleh para ahli antropologi. Koentjaraningrat menyebutkan ada tujuh unsur kebudayaan yakni: a) Sistem religi, b) Sistem Kemasyarakatan/organisasi sosial, c) Bahasa, d) Sistem Pengetahuan, e) Kesenian, f) Sistem mata pencaharian hidup, g) Peralatan hidup dan teknologi (Koentjaraningrat, 2002, 203).

Pada dasarnya, perbedaan budaya dengan segala unsurnya, merupakan suatu anugerah, karena dari diferensi budaya manusia akan menemukan keragaman pola perilaku kehidupan. Namun sebagian manusia yang wawasan budayanya masih kurang luas, terlalu menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik, sehingga menistai budaya lain. Akibatnya terkadang timbul gesekan dan benturan budaya antar kelompok masyarakat. Benturan ini semakin berkembang jika perbedaan budaya merupakan/bercampur unsur agama. Persoalan (benturan) ini dapat diamati misalnya apa yang terjadi di kabupaten Aceh Singkil. Orang Kristen melepaskan babbunya secara bebas. Perilaku ini menjadi masalah bagi orang Islam, karena babi merupakan binatang haram bagi orang Islam. Dalam aspek budaya ini, manusia perlu saling mencermati/menghargai budaya sesama, untuk menghindari benturan budaya.

### 4. Politik

Politik adalah perilaku interaksi seseorang dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial dan dinamis (Nambo Cs, 2005, 262). Ungkapan ini menunjukkan bahwa politik adalah suatu pilihan, bukan merupakan suatu takdir, yang telah dibawa sejak lahir, artinya pilihan politik dapat berubah mengikuti tempat, zaman dan kebutuhan.

Istilah politik bermula sejak zaman Yunani Kuno, pada saat Plato menganggap politik dipraktekkan sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat terbaik, dimana negara ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebaikan, yang bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara (Hakim, 210, 60).

Memahami konsep dasar politik yang dicetuskan Plato tersebut, maka seharusnya politik dipraktekkan dengan tujuan untuk memberi kebahagiaan kepada masyarakat, dengan tidak menistai kelompok manapun. Artinya kelompok pemenang atau mayoritas mesti mampu memberi kebahagiaan dan mengayomi kelompok minoritas, dan kelompok minoritas menghormati kelompok mayoritas dan tunduk kepada kesepakatan bersama.

Andrey Heywood, sebagaimana yang dikutip Miriam Budiharjo mengatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Budiharjo, 2007, 16). Dalam pandangan Heywood ini, dalam politik terbuka peluang terjadinya konflik dan kerja sama. Jika dibandingkan dengan pandangan Plato, politisi mesti mengembangkan kerja sama secara baik dan meminimalisir dan menghilangkan konflik. Artinya jika politik tidak mampu mensejahterakan rakyat dan (bahkan) menyisakan konflik antar kelompok, maka politik tersebut adalah politik yang gagal, dan bertentangan dengan prinsip politik itu sendiri.

##### 5. Ras (keturunan)

Kata Ras berasal dari kata Latin, yaitu "radix" yang bermakna "asal" atau "akar".<sup>6</sup> Berdasarkan itu kemudian "Ras" dipahami sebagai pengelompokan manusia berdasarkan ciri "biologis", bukan berdasarkan ciri-ciri "sosiokultural", ciri biologis ini kemudian mengklasifikasi manusia berdasarkan ciri fisik secara umum (Burhanuddin, 2018, 3).

Pengklasifikasian tersebut, kemudian berlanjut dengan mengkategorikan manusia ke dalam berbagai populasi manusia (Rudiansyah, 2016, 1). Ciri fisik yang dipakai untuk mengelompokkan ras tersebut misalnya adalah: a) Bentuk badan, b) bentuk kepala, c) bentuk

---

<sup>6</sup> Ungkapan kata ras, terkadang dipahami secara tumpang tindih dengan kata etnis. Padahal kata etnis mempunyai kandungan makna yang berbeda dengan kata ras. Secara etimologi, kata etnis berasal dari kata *ethnicus/ethnikas* (Bahasa Yunani), yang berarti bangsa. Kata *ethnicus/ethnikas* memiliki akar kata *ethos*, yang memiliki arti "adat" (Zaini, 2014, 98).

muka, d) bentuk hidung, e) bentuk mata, f) warna kulit, g) warna mata, dan h) warna rambut. Selain itu identifikasi ras juga dapat berdasarkan tinggi badan, dan bentuk rangka badan. Burhanuddin menyebutkan, ada golongan ras yang memiliki tubuh tinggi besar, ada pula golongan ras yang memiliki tubuh tinggi kecil, ataupun ada golongan ras yang memiliki tubuh kecil mungil (Burhanuddin, 2018, 4).

Perbedaan ras ini, bukan terjadi karena pilihan manusia itu sendiri, tetapi karena berbagai faktor alamiah yang (juga) merupakan suatu takdir. Di antara faktor terjadinya suatu Ras adalah: mutasi dan seleksi alam, adaptasi, isolasi dan migrasi. Selain itu juga terjadi karena perubahan genetik yang dipengaruhi lingkungan dan faktor selainnya.

Ahli anthropologi bersepakat bahwa terdapat tiga ras besar di dunia, yaitu Ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid (Harvini Cs., 2017, 122). Identifikasi dari ke tiga ras yang disebut dia atas adalah: a) Ras Kaukasoid memiliki kulit putih, yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India. b) Ras Mongoloid memiliki kulit kuning, yang sebagian besar menetap di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. c) Ras Negroid memiliki kulit hitam, dan terutama mendiami Benua Afrika di sebelah Gurun Sahara (Harvini Cs., 2017, 122-123). Selain itu ada dua ras lain yang lebih kecil yang tidak dapat digolongkan ke dalam ketiga ras kelompok besar di atas, yaitu Ras Khoisanid dan Australomelanesid.

Pada masa awal, Indonesia hampir seluruhnya didiami oleh orang Australomelanesid, yang membuat Indonesia disebut sebagai Paleomelanesia. Namun kemudian akibat dari percampuran berbagai ras, orang Indonesia berubah menjadi ras Mongoloid. Risa Herdita Putri menyebutkan:

“Pada zaman Neolitik, Ras Australomelanesid lebih dominan di Indonesia Bagian Barat, misalnya berdasarkan temuan di situs Anyer Lor (Banten), Buni (Jawa Barat), Sangiran, Plawangan, Gunung Wingko di Jawa Tengah, serta Muncar, Pacitan, Jember, Puger (Jawa Timur). Di Indonesia bagian tengah dan timur, berdasarkan temuan rangka manusia di Melolo (NTB), Ulu Leang, Bada, Napu, Besoa, Paso, Sangihe (Sulawesi), serta Gua Alo, Liang Bua di NTT terlihat ada percampuran antara ras Mongoloid dan ras Australomelanesid. Sementara pada masa yang lebih muda, yaitu zaman logam, ras Mongoloid ditemukan lebih dominan di Indonesia barat (Putri, tt, 1).

Sementara di Indonesia bagian Timur masih terdapat ras Australomelanesid dan ada yang bercampur dengan ras Mongolid terutama di daerah Wallacea (Hasan, tt, 28). Walaupun

ras di Indonesia dianggap majemuk yang merupakan percampuran berbagai ras terutama ras Mongoloid dan ras Australomelanesid, namun dalam kehidupan keseharian masih ada orang yang menganggap diri mereka sebagai keturunan yang lebih hebat dibandingkan yang lain, yang mengakibatkan terbuka peluang terjadinya pergesekan antar masyarakat.

Mensiasati timbulnya persoalan diskriminasi ini maka lahir Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang di dalamnya ditunjukkan adanya komitmen pemerintah RI dalam rangka menghapus diskriminasi, untuk menciptakan negara Indonesia yang adil dan demokratis. Selain itu, upaya menghapuskan diskriminasi Ras dan Etnis, dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Arnuwulan, 2015, 499).

Aturan-aturan ini dianggap penting, karena jika terjadi benturan dan diskriminasi ras dan etnis, tidak hanya bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), tetapi mencerdai persatuan dan menyebabkan jatuhnya korban.

Selain itu, diskriminasi ras dan etnis juga melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang *Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## 6. Gender

Perempuan adalah satu jenis kelamin yang merupakan ciptaan Allah sebagai suatu kodrat yang tidak bisa ditolak. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial, namun mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan seting tugas alamiah, karena perbedaan fisik dan alat reproduksi. Secara kodrati, perempuan dipandang sebagai makhluk cantik, lemah lembut, (terkadang cenderung) emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Pandangan ini adalah asumsi secara umum, namun dalam kenyataan terdapat beberapa kenyataan yang berbeda dari ungkapan tersebut. Walaupun demikian perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan sosial budaya.

Dalam ajaran Islam, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dapat diamati dalam uraian beberapa ayat Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nisa'

ayat 1, Ali Imran ayat 135, An-Nisa' ayat 124, An-Nahl ayat 97, Al-Ahzab ayat 35 dan lain-lain. Lebih dari itu, Islam bahkan menempatkan perempuan pada posisi istimewa, terhormat, mulia dan dilindungi.

Nabi Muhammad saw. memberi perhatian khusus kepada perempuan melalui banyak haditsnya, seperti dalam hadits-hadits berikut:

- a. Sebuah Hadits dari Mua'wiyah bin Jamâah menyebutkan "Suatu ketika dia mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya: "Wahai Rasulullah aku ingin ikut berperang, dan aku ingin berkonsultasi denganmu". Rasulullah bersabda: "Apakah kamu memiliki ibu?" Mua'wiyah menjawab: "Aku punya Ibu". Rasulullah bersabda: "Berbaktilah kepada Ibumu, karena surga itu di bawah kakinya". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Mājah, dengan sanad hasan, dan dishahihkan oleh Al-Hakim (Ibnu Majah, 1998, 503-504). Pernyataan Nabi Muhammad ini menunjukkan akan pentingnya peran dan posisi ibu atau perempuan terutama dalam kehidupan keluarga, dan mengangkatnya ke dalam posisi strategis dan signifikan untuk pengembangan generasi.
- b. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah disebutkan, bahwa sebelum Nabi Muhammad saw. wafat, beliau berpesan agar para muslim memberi perhatian kepada perempuan. Secara lengkap, makna hadits ini adalah: "Berwasiatlah kepada perempuan dengan cara yang baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok ialah bagian atasnya. Jika engkau hendak meluruskannya, dia akan patah; dan jika engkau membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah kepada perempuan dengan cara yang baik". (Al-Bukhori, tt, 112). Perintah Nabi Muhammad ini muncul, sebagai perlindungan antisipatif agar tidak berlanjutnya kejadian dari sejarah budaya Arab jahiliah yang memperlakukan wanita secara rendah, misalnya: a) Ketika seorang laki-laki meninggal, istri dapat diwarisi oleh anak-anaknya, atau perempuan dianggap sebagaimana benda warisan. b) Bila seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki, maka mereka sangat gembira dan bangga, tapi bila yang lahir itu ternyata perempuan maka mereka bersedih, kecewa, malu bahkan tega membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup, karena bayi perempuan itu

dianggapnya sebagai aib (Muhibbin, 2011, 109). Kedua perilaku ini kemudian dilarang oleh Al-Quran melalui Surat An-Nisa' ayat 227, dan surat An-Nahlu ayat 58-598.

- c. "Seorang janda tidak dapat dikawinkan sehingga dimintai kesepakatannya, dan seorang gadis tidak dapat dinikahkan sehingga ia dimintai izinnya, dan izinnya ialah diamnya." (Al-Asqalani, 2000, 240). Bandingkan dengan masa jahiliah, seorang perempuan tidak dihargai bahkan bisa diwarisi, seperti yang disebutkan di atas. Selain itu terdapat banyak hadits lain yang menunjukkan adanya perhatian yang tinggi terhadap kedudukan perempuan.

Aspek tinjau yang diuraikan di atas adalah adalah aspek tinjauan Islam dan perempuan, bukan pembahasan tentang gender. Pembahasan aspek gender mempunyai relasi dengan laki-laki dan perempuan, namun gender tidak identik perempuan. Pembahasan tentang perempuan adalah pembahasan tentang jenis kelamin yang berhubungan dengan alat reproduksi, sedangkan pembahasan tentang gender adalah pembahasan tentang persoalan peran masing-masing manusia berdasarkan jenis kelamin dalam kehidupan sosial.

Siti Muslikhati mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada wilayah *nature* dan wilayah *culture* (Muslikhati, 2004, 19). *Nature* adalah kata Bahasa Inggris yang bermakna alam, sedangkan kata *culture*, bermakna budaya. Sehubungan dengan jika mau dipilah-pilah, pembahasan tentang perempuan adalah pembahasan yang berkaitan dengan aspek-aspek alamiah, sedangkan pembahasan tentang gender adalah pembahasan tentang budaya yang berhubungan dengan nilai dan perilaku.

Muhammad Khuza'i berpendapat bahwa istilah perempuan dan gender sering dianggap sama, yakni bermakna jenis kelamin manusia dan sifatnya mutlak harus diterima sebagaimana mestinya. Namun, menurut para feminis, pembahasan jenis kelamin hanya terbatas pada pembagian manusia secara biologis, yang didefinisikan sebagai seks, sedangkan gender diberi definisi baru sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural (Khuza'i, 2013, 102).

Pada dasarnya, semua perempuan yang baik menerima dan ikhlas terhadap kodratnya sebagai perempuan dan mereka melakukan tugas keperempuanannya secara biologis, terutama tugas sebagai isteri, mengandung, dan melahirkan. Selain itu perempuan

---

<sup>7</sup> "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (Q.S. An-Nisa': 22).

<sup>8</sup> Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." (Q.S. An-Nahl: 58-59).

juga ikhlas merawat bayinya secara sempurna, karena peran ini merupakan peran istimewa perempuan. Bagi laki-laki peran tersebut bukan hanya sulit dan pelik, tetapi tidak mungkin dilakukan. Laki-laki yang sadar diri memberi penghormatan kepada perempuan sesuai kodrat yang miliki dan menempatkan mereka pada posisi yang diinginkan perempuan. Yang lebih aneh lagi adalah banyak dari generasi muda laki-laki malah ingin menjadi perempuan, sehingga berusaha menjadi transgender, tetapi sayang mereka tidak mempunyai onderdil yang cukup.

Persoalan yang dihadapi dalam pembahasan gender adalah persoalan yang berhubungan dengan peran perempuan secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada sebuah tugas yang sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang perempuan, tetapi aturan-aturan sosial dalam suatu masyarakat, terkadang menghalangi perempuan untuk melaksanakan tugas tersebut (hanya) karena ia perempuan. Inilah persoalan yang sering terjadi dan inilah yang disebut sebagai diskriminasi gender.

Diskriminasi gender di Indonesia merupakan suatu hal yang terlarang dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Selain itu banyak aturan lain yang ada di Indonesia yang menentang diskriminasi gender, sebagaimana yang diuraikan oleh Dede Kania, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang tujuannya disebut dalam Pasal 3, yaitu untuk: a) penghormatan hak asasi manusia; b) keadilan dan kesetaraan gender; c) nondiskriminasi; dan d) perlindungan korban.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang memberi kebebasan kepada perempuan untuk menikah dengan bukan WNI.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), yang lahir untuk melindungi perempuan dari *trafficking*.
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk

diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.

- f. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan bernegara.
- g. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan” (Kania, 2015, 718-728).

Dengan aturan-aturan ini, perempuan Indonesia dijamin dan mendapat perlindungan secara permanen dari diskriminasi, namun tidak dapat dipungkiri, masih ada sebagian masyarakat yang masih berpikiran diskriminatif, untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak benar. Walaupun demikian, pikiran tersebut tidak menjadi landasan budaya, social dan politik nasional.

Sesuai dengan isi undang-undang no 39, tahun 1999 yang diuraikan pada bagian terdahulu, dapat dipahami bahwa perbedaan minoritas dan mayoritas adalah persoalan mendasar yang dapat menjadi modal latin bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional dengan memberikan hak-hak kaum minoritas, tanpa mencederai hak kaum mayoritas. Jika di dalam masyarakat sudah terbina rasa kenyamanan, karena mereka mendapatkan hak-hak dan keinginan, sesuai kebutuhan mereka, maka perbedaan mayoritas dan minoritas tidak akan mencuat ke permukaan. Kenyamanan tersebut juga akan melahirkan solidaritas saling menghargai antar kelompok.

### **C. Problematika Kaum Minoritas**

Sebagai kelompok yang berada dalam jumlah yang kecil (dibandingkan dengan kelompok lain), kaum minoritas, seringkali menjadi kelompok yang asprasi, hak-hak, keinginan dan kebutuhannya tidak diutamakan, atau mereka dianggap sebagai warga kelas dua. Lebih dari itu, sebagian kelompok minoritas, seringkali menjadi kelompok yang ternistai dan berada dalam tekanan.

Pergesekan antar kaum minoritas dan mayoritas di Indonesia dapat terjadi karena berbagai sebab, misalnya:

1. Pergesekan antar suku pernah terjadi beberapa kali di Indonesia. Kasus yang paling besar yang pernah terjadi adalah konflik yang terjadi pada tahun 2001 antara suku Dayak dan suku Madura. Kasus pertama terjadi di Sambas (Kalimantan Barat) yang

menewaskan sekitar 50 orang. Kasus tersebut kemudian berlanjut di Sampit (Kalimantan Tengah) yang menewaskan 469 orang dan ribuan orang mengungsi. (Bushori dkk: 2012, 62). Selain itu konflik antar mayoritas dan minoritas pernah terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia seperti di Poso (1998), Ambon (1999), konflik etnis (1999), dan lain-lain.

2. Hegemoni yang berlebihan dari kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Persoalan-persoalan tersebut dapat terjadi jika kaum mayoritas bertindak secara sepihak, menistai minoritas dan menjauh dari sikap dialogis. Hegemonik yang berlebihan kemudian memunculkan tirani mayoritas terhadap minoritas. Berdasarkan tirani tersebut kemudian muncul kasus-kasus, yang dapat dipicu oleh kesombongan mayoritas dan bisa juga muncul karena adanya dendam kelompok kecil terhadap kelompok besar, yang dimulai dari persaingan kepentingan dan otoritas kebebasan kaum minoritas yang kebablasan dll. Hegemonik yang berlebihan kemudian memunculkan tirani mayoritas terhadap minoritas. Potensi hegemoni mayoritas terhadap minoritas di Indonesia bisa terjadi antar suku (Jawa dg non-Jawa), agama (Islam dengan non-Islam) dan politik (penguasa dengan oposisi).
3. Tidak adanya kesepahaman antar kelompok. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, para tokoh pendiri bangsa Indonesia sadar bahwa Indonesia adalah bangsa “Bhinneka Tunggal Ika” majmuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Atas dasar ini kemudian semua kelompok di Indonesia menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang dianggap sebagai konsep kesepahaman nasional Indonesia, sebagai dasar pikir dan bertindak, tanpa membedakan identitas dan pernik masing-masing. Agar bangsa Indonesia tetap berada dalam damai dan aman, maka dalam hidup dan bernegara, selama berada di Indonesia, semua orang mutlak harus bersatu, berpegang kepada Pancasila.
4. Kepentingan politik sesaat. Politik adalah suatu pengetahuan atau kegiatan yang berhubungan dengan tata negara, termasuk tentang dasar, sistem pemerintahan dan tata kelola negara. Untuk mencapai tujuan ini, seharusnya orang yang terlibat dalam politik bersaing secara cerdas, sehat, santun dan berpegang kepada aturan secara baik. Namun demikian dalam prakteknya, politik tidak hanya dilakukan untuk menentukan kesepakatan secara bersama terhadap masalah yang dihadapi, dalam

---

<sup>9</sup> Hegemoni sebagai suatu proses, melibatkan upaya memenangkan dan memenangkan kembali secara berkesinambungan atau berkelanjutan kesepakatan di kalangan mayoritas terhadap sistem yang menempatkan mereka sebagai subordinat. (John Fiske, *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Bandung: Jalasutra, 2007, h. 243).

suatu negara, tetapi terkadang lebih terfokus kepada usaha untuk merebut peluang menjadi penguasa, karena dalam kekuasaan seseorang memiliki wewenang untuk mengatur orang lain dan menentukan kebijakan sesuai keinginannya. Untuk memperoleh kekuasaan tersebut banyak orang berpolitik kotor, tidak siap untuk bersaing secara cerdas, sehat, santun dan berpegang kepada aturan, namun dilakukan dengan menghalalkan segala cara, dan menyusun strategi yang arogan. Dalam situasi seperti ini maka setiap kelompok berusaha memperhebat diri dan melecehkan kelompok lain. Prihatin Dewantoro mengatakan “politik saat ini masih didominasi permainan-permainan tidak sehat yang melahirkan para politisi bermental tidak sehat. Sehingga, orientasi politiknya pun tidak sehat, sebatas memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya (Dewantoro, 2013, 14). Yang lebih tragis adalah setelah persaingan berlangsung, kelompok yang terpilih sebagai pemenang seringkali menistai dan membiarkan kelompok kalah menderita dan tidak dihargai. Semua potensi kelompok yang kalah dipendam, disingkirkan dan terbuang percuma. Persaingan yang tidak sehat seperti ini, di kemudian hari menimbulkan perseteruan dan dendam antar kelompok secara tajam, yang sewaktu-waktu dapat menyulut permusuhan secara berkepanjangan. Padahal sejatinya, politik suatu kegiatan suci yang dirancang untuk menegakkan kebenaran untuk mencapai kesejahteraan bersama.

#### **D. Konsep Islam Tentang Mayoritas dan Minoritas**

Keragaman adalah suatu yang niscaya menurut Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, disebutkan: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan (kemudian) menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”*. Ayat ini secara jelas mengakui bahwa bahwa manusia diciptakan dalam berbagai kelompok. Penilaian terhadap kualitas seseorang dan sebuah kelompok, tidak dapat diukur secara duniawi, tetapi dinilai berdasarkan nilai-nilai taqwa (kebaikan) yang dilakukan. Dalam hal ini Islam tidak memandang sebuah kebenaran berdasarkan mayoritas dan minoritas, tetapi Islam akan menghargai manusia berdasarkan karya mereka dalam kehidupan. Secara lebih praktis Rasulullah saw. juga menjelaskan dalam sebuah hadits bahwa : *“Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian”* (al-Atsir, 1984, 471). Dalam hadits lain Rasulullah saw. pernah bersabda, *“Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu (maksudnya Nabi Adam). Ingatlah. Tidak ada kelebihan*

bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Iya, benar Rasulullah saw. telah menyampaikan." (Ibn Hanbal, 1998, 761).

Sumber-sumber ajaran Islam di atas menunjukkan bahwa, secara sosial, psikologi, dan hukum, Islam tidak memberi keistimewaan kepada manusia berdasarkan warna kulit yang bermakna Islam tidak memberi perbedaan antar manusia berdasarkan ras, etnik, kebangsaan, jenis kelamin dan tidak juga membedakan kelompok berdasarkan jumlah (mayoritas atau minoritas). Namun Muhammad saw adalah orang Arab Quraisy, namun dari awal Beliau menghalangi orang Arab untuk mengistimewakan dirinya dibandingkan non-Arab melalui pernyataan "tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan orang asing". Semua orang dan kelompoknya dianggap sama dalam kehidupan.

Dalam konsep Islam, dasar keistimewaan manusia bukan berdasarkan aspek fisik manusia, tetapi berdasarkan tingkat ketakwaan yang dimilikinya. Pengakuan akan prinsip kebhinnekaan dalam Islam telah dituangkan dalam Piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian tertulis bagi penduduk Madinah yang dikukuhkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. di Madinah tahun pertama Hijriah/622 M sebelum masyarakat dunia mengenal konstitusi tertulis (Elkhairati, 2019, 52). Prinsip kebhinnekaan ini disebutkan dalam beberapa pasal Piagam Madinah, yang menyangkut masyarakat Yahudi yang merupakan kaum minoritas, namun diakui sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan orang Islam, yang pada waktu itu merupakan kelompok mayoritas. Namun demikian setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus diikuti. Choirul Anwar mengatakan Piagam Madinah ini secara jelas menyatakan bahwa semua golongan agama dan suku yang berada di Madinah mempunyai hak, perlakuan dan kewajiban yang sama, tanpa harus memaksakan kehendak kepada golongan lain baik dari segi keagamaan maupun sosial" (Anwar, 2018, 4).

Di balik kata persamaan antar manusia menurut Islam ini adalah ajaran Islam secara dini telah menutup adanya ruang dari sikap rasialisme dan diskriminasi antar kelompok manusia. Dan Islam wajib memberi perlindungan kepada kelompok minoritas, sebagai Rasulullah saw. memberi perlindungan kepada kaum Yahudi dengan memberi mereka kebebasan untuk memeluk agamanya. Dalam pasal 25 ayat 2 Piagam Madinah disebutkan bahwa Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, seperti kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka, semua kelompok secara merata. Dalam pasal 40 Piagam Madinah secara jelas

tertulis bahwa semua tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan seperti diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan secara salah (Elkhairati, 2019, 60).

#### **E. Minoritas Muslim Bali**

Propinsi Bali memiliki penduduk 3.890.757 jiwa menurut data pusat statistik Propinsi Bali. Dari jumlah tersebut penduduk Bali yang beragama Islam adalah 520.244 jiwa. Secara persentase jumlah muslim di Bali adalah 13,37 % dan merupakan kelompok minoritas dibandingkan warga Bali yang beragama Hindu yang berjumlah 3.247.283 jiwa atau 83,46%. Sebaran warga muslim di Bali berada di Sembilan daerah tingkat II, dengan penduduk muslim terbanyak berada di Kota Denpasar sebanyak 255.899, atau mencapai 49,18 %. Daerah tinggal terbanyak kedua warga muslim di Propinsi Bali adalah di Kabupaten Badung yang berjumlah 96.166 warga muslim atau 18,48 %. Adapun warga muslim paling kecil di Propinsi Bali berada di Kabupaten Bangli yaitu 2185 jiwa atau hanya 0,41 %.

Kehadiran awal masyarakat muslim di Bali menurut sejarahnya bermula sejak tahun 1380-1460 M, yang terjadi karena migrasi yang dipengaruhi oleh perjalanan Raja Hindu yang diiringi oleh para pengawal yang beragama Islam, yang kemudian di beri tempat tinggal oleh Raja dan kemudian mereka menetap di Bali.

### **II. Pendidikan Non-Formal**

#### **A. Makna Pendidikan Non-Formal**

Menurut UU Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1, definisi pendidikan adalah "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Lebih lanjut UU No. 20, 2003, pasal 1, ayat 10 disebutkan bahwa "Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan".

Undang-undang di atas secara jelas menyebutkan bahwa pendidikan digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu: a. Pendidikan formal, b. Pendidikan non formal dan c. Pendidikan in-formal. Petunjuk undang-undang ini mempunyai korelasi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang jenis-jenis pendidikan, sebagai mana yang dikutip oleh Sadiq A. Kuntoro. Ki Hajar Dewantara juga mengklasifikasi pendidikan ke dalam tiga pusat Pendidikan yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat (Kuntoro, 2006, 2). Jika dipadukan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan isi UU ini terlihat bahwa

pendidikan keluarga identik dengan pendidikan informal, pendidikan sekolah identik dengan pendidikan formal dan pendidikan masyarakat identik dengan pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah suatu bangsa, yang menurut Soelaiman Joesoef merupakan pendidikan yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, bertindak, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (Joesoef, 2008, 16). Di Indonesia, pendidikan diatur secara resmi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Bab I, pasal satu, ayat 4 di mana disebutkan bahwa "Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi". Sehubungan dengan itu, disebutkan bahwa lembaga pendidikan jalur formal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi.

Adapun mengenai pendidikan non-formal, menurut UU, No. 20, 2003 adalah "jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang".

Soelaiman Joesoef menyebutkan bahwa pendidikan non-formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya (Joesoef, 1992, 50).

Di sini dapat diamati bahwa pendidikan non-formal merupakan pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan nilai bagi masyarakat untuk diterapkan secara langsung dalam kehidupan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dipahami mengingat pendidikan formal terkadang tidak dapat diikuti atau tidak terjangkau secara maksimal oleh masyarakat, di samping terkadang pendidikan formal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Untuk melengkapi kebutuhan tersebut maka diselenggarakan pendidikan non-formal.

Sejak kapan pendidikan non-formal sudah dimulai? Pada dasarnya pendidikan non-formal telah dimulai sejak sebelum pendidikan formal itu ada. Jika kita meyakini bahwa awal mula pendidikan formal terjadi sekitar tahun 900 SM di Negara Sparta, yang berpegang

kepada Undang-undang Lycurgus, yang hanya memberi pendidikan kepada warga negara yang merdeka (Kumalasari, 2008, 6), maka bagaimana pendidikan sebelum itu. Jawabannya adalah pendidikan non-formal atau in-formal, yang dijalankan oleh keluarga dan masyarakat. Artinya pendidikan non-formal dan in-formal berlangsung lebih awal dibandingkan pendidikan formal, dan bahkan pendidikan formal berkembang atas dasar pelaksanaan pendidikan non-formal dan in-formal.

### **B. Model-model Pendidikan Non-Formal**

Dalam prakteknya, pendidikan non-formal mempunyai beragam model. Model yang digunakan dalam masyarakat tersebut biasanya berkembang sesuai dengan kebutuhan, suasana dan lingkungan masyarakat. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 dinyatakan bahwa: Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik". Bersamaan dengan itu, dalam buku Bahan Ajar Pendidikan Non-formal dan in-formal yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Barat tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat berbagai model pendidikan non-formal yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini yaitu: a) PAUD, b) Pendidikan Aksara, c) Pendidikan Kesetaraan, d) Pendidikan Keahlian, e) Pendidikan Keluarga, f) Taman Bacaan masyarakat.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 yang disebutkan di atas, Pendidikan Agama dapat dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan non-formal, yaitu bagian dari "... pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik". Pendidikan Agama ini dianggap penting, karena bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan agama secara formal, pendidikan agama dapat diperoleh secara baik melalui pendidikan non formal. Keberadaan institusi pendidikan non-formal Islam ini diakui keberadaannya menurut undang-undang, yang terlihat pada Bab VI, pasal 26 (1) dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan: Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, dan dalam ayat (4) secara tegas menyebutkan bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, semisal "madrasah diniyah takmiliah". Dalam

pasal ini secara eksplisit, bahwa UU no 20/2003 mengakui adalah institusi non-formal pendidikan Islam, yaitu majlis ta'lim dan madrasah diniyah. Namun demikian dalam prakteknya, institusi pendidikan Islam non-formal tidak hanya majlis ta'lim dan madrasah diniyah, namun berkembang juga model lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Secara lebih terperinci penjelasan dari model pendidikan non-formal tersebut dapat dilihat dari uraian berikut:

1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), pada pasal 28 menyebutkan bahwa:

“1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), bentuk lain yang sederajat”(UU SPN, 2003,).

Uraian di atas menunjukkan bahwa PAUD pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Dalam UU SPN di atas juga menguraikan secara jelas, jenis PAUD dalam bentuk pendidikan non-formal misalnya adalah Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

Dalam UU SPN juga dijelaskan bahwa PAUD dibentuk dengan tujuan sebagai upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Indonesia, 2003). Di sini dapat diamati bahwa sebenarnya PAUD tidak dilakukan sebagai pendidikan yang serius kepada anak-anak yang dapat membebani anak-anak dengan berbagai materi kajian yang berat, tetapi pendidikan yang diberikan adalah dalam bentuk rangsangan untuk meletakkan fondasi sebagai motivasi awal bagi si anak dalam belajar sambil bermain, untuk mengenal belajar. Dengan memberi rangsangan yang baik dan benar, maka diharapkan akan terdapat respon positif yang tanpa sadar dari anak untuk belajar materi tertentu berdasarkan minat instrinsik yang dimiliki. Selain itu melalui bermain bersama, si anak akan belajar secara langsung cara bersosialisasi dengan “orang lain” selain dirinya. Di PAUD, sejak awal anak akan mengenal teman, guru dan orang lain yang ada.

Melalui pengenalan ini, anak akan dirangsang secara spontan untuk bersikap dan berperilaku secara berbeda dan menyesuaikan diri ketika menghadapi berbagai jenis “orang lain”.

## 2. Pendidikan aksara

Yang dimaksud dengan pendidikan aksara adalah pendidikan yang diberikan kepada penduduk yang belum mampu membaca. Pendidikan aksara ini merupakan satu prioritas utama pembangunan pendidikan bidang pendidikan non-formal untuk mempercepat penuntasan buta aksara melalui program Pendidikan Keaksaraan (UU No. 25 tentang Propenas, 1999). Tujuannya adalah untuk memberantas buta aksara, sekaligus meningkatkan mutu dan taraf hidup warga, dengan tujuan akhir, peningkatan kualitas kehidupan. Pada awal kemerdekaan, tingkat buta huruf di Indonesia mencapai 90%. Hal ini dapat dipahami bahwa sebelum masa kemerdekaan, pendidikan di Indonesia masih sangat mahal sehingga belum dijangkau secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, dan hanya diikuti oleh masyarakat dari strata atas masyarakat yang tinggal di kota. Untuk meningkatkan persentase melek huruf pemerintah RI pada waktu itu mengadakan kursus ABC, yang ditangani Bagian Pendidikan Masyarakat, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Sujarwo, 2008, 2). Saat ini menurut Badan Pusat Statistik, Pusat Data dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terungkap fakta bahwa terdapat sebanyak 2,07 % atau sekitar 3,4 juta dari penduduk Indonesia ternyata masih buta huruf (Rodiyah, 2018, 1). Dengan jumlah buta huruf sebanyak 3,4 juta jiwa, maka layaklah pemerintah RI memberi perhatian yang baik untuk pendidikan aksara. Dalam usaha pemberantasan buta huruf, Pemerintah memberi kesempatan pendidikan melalui pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal dengan mengacu pada metode pembelajaran andragogi (pembelajaran untuk orang dewasa), sosiokultural (dengan pendekatan budaya) dan penerapan komunikasi sosial yang tepat (Mariono, 2016, 57).

## 3. Pendidikan Keahlian

Istilah keahlian disebut juga dengan istilah “profesi. Dengan demikian istilah pendidikan keahlian juga dapat bermakna pendidikan profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesi dimaknai sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu (Depdiknas, 2005, 897). Lebih lanjut, pada hal yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah professional diberi beragam makna yaitu: a) bersangkutan dengan profesi, b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Depdiknas, 2005, 897).

Di Indonesia, makna profesional diberi makna secara politik melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Sekretariat Negara, 2005, 6).

Secara lebih ringkas dapat dipahami bahwa pendidikan keahlian atau pendidikan profesional yang dilaksanakan dalam pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mendidik anggota masyarakat lain dalam bidang keahlian tertentu, agar masyarakat mempunyai keahlian yang dapat menunjang kehidupan. Pendidikan keahlian ini dapat terdiri dari berbagai bidang keahlian misalnya keahlian Teknik, pertanian, perdagangan, admistrasi dan kegiatan lainnya,

#### 4. Taman Bacaan masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada awalnya didirikan secara swasembada oleh masyarakat sendiri dengan manajemen “kampung” sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap pengetahuan yang mereka inginkan. Dalam hal ini referensi yang mereka kumpulkan berhubungan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Misalnya, jika TBM tersebut berada dalam lingkungan petani, maka referensi utama mereka adalah buku-buku bidang pertanian, demikian juga dengan TBM dalam lingkungan lainnya.

Pendirian dan perkembangan TBM kemudian sangat tergantung kepada adanya semangat dan minat baca masyarakat, yang didukung dan disponsori oleh gagasan tokoh intelektual yang ada dalam masyarakat, serta daya usaha yang dilakukan untuk penyediaan referensi dan media yang dibutuhkan. Perpaduan dari tiga daya ini akan menentukan perkembangan TBM pada masa selanjutnya.

Untuk membantu masyarakat dalam pengembangan TBM ini, pada tahun 1992, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang ini disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, memberikan bantuan dengan tujuan utama mempertahankan dan mengembangkan kemampuan membaca masyarakat yang sudah bebas dari buta aksara melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejak dilaksanakannya program ini penggunaan nama TBM semakin dikenal (Sitepu, 2012, 44).

Pemberian bantuan Pemerintah kepada TBM mempengaruhi pengelolaan TBM, karena Pemerintah memberikan berbagai persyaratan administrasi dan fisik yang harus dipenuhi oleh TBM yang akan menerima bantuan. Kalau sebelumnya dikelola dengan manajemen “kampung”, yaitu tidak dilengkapi dengan struktur organisasi yang baku serta

dikelola dengan sistem administrasi yang sangat sederhana, kemudian TBM yang akan menerima bantuan dari Pemerintah disyaratkan memiliki akta pendirian, struktur organisasi, administrasi, dan fisik yang jelas (Sitepu, 2012, 45). TBM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak lagi dikelola dengan manajemen “kampung”.

Dalam Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat disebutkan bahwa TBM mempunyai lima fungsi, yaitu: a) Sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri dan sebagai penunjang kurikulum pendidikan luar sekolah, khususnya program keaksaraan. b) Sumber informasi yang bersumber dari buku dan bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan belajar warga dan masyarakat setempat. c) Sumber penelitian dengan menyediakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya dalam studi kepustakaan. d) Sumber rujukan yang menyediakan referensi bagi pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya. e) Sumber hiburan (rekreasi) yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu senggang guna memperoleh pengetahuan/informasi baru yang menarik dan bermanfaat (Direkt, 2006, 2).

Dengan tujuan seperti yang disebut di atas keberadaan TBM yang seyogyanya berada di wilayah yang jauh dari lokasi perpustakaan umum, diharapkan dapat mengisi dan memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan secara mandiri, mudah dan murah.

##### 5. Pendidikan Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kehidupan di masa depan. Untuk menjadi generasi penerus yang baik, maka diperlukan pemuda yang cakap secara keilmuan/pengetahuan, ketrampilan dan memiliki soft skill yang mumpuni. Satu-satunya cara untuk mempersiapkan pemuda yang layak memimpin di masa depan adalah melalui pendidikan. Namun demikian dalam website Unicef Indonesia disebutkan dari 46 juta remaja di Indonesia pada tahun 2015, hampir seperempat dari mereka yang berusia 15 hingga 19 tahun tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan atau tidak mengikuti pelatihan. Pengangguran remaja mencapai lebih kurang 15 persen<sup>10</sup> Keadaan ini merupakan suatu tantangan berat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan generasi penerus.

Tidak melanjutkan pendidikan bermakna, bahwa mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak dapat meningkatkan pengetahuan ketrampilan untuk menjadi seorang manusia yang siap pakai dan dapat diandalkan di masa dapan. Untuk menambah ketrampilan pemuda, maka masyarakat mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pemuda dalam

---

<sup>10</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>

lingkungan, dalam berbagai bentuk pelatihan, misalnya pelatihan ketrampilan bekerja dalam bidang-bidang tertentu, pelatihan agama, pelatihan manajemen, pelatihan pengembangan karakter, dll.

#### 6. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya perempuan adalah mitra laki-laki, yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan, walaupun dalam keadaan tertentu perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda, sesuai kodrat dan kesepakatan.<sup>11</sup> Dalam TAP MPR No. II/MPR/1998, jelas disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam setiap kegiatan pembangunan bangsa. Namun demikian, dalam kehidupan social, terdapat dapat masih banyak diskriminasi terhadap perempuan yang menganggap perempuan sebagai manusia “kelas dua”, yang membuat kaum perempuan terabaikan. Anehnya, terkadang pengabaian terhadap hak-hak perempuan, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh kaum perempuan dan keluarganya sendiri. Sebagai contoh, pada umumnya jika sebuah keluarga mempunyai anak laki-laki dan perempuan, sedangkan keluarga tersebut mempunyai anggaran yang terbatas untuk pendidikan, maka keluarga akan lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki. Di sisi lain, yang sangat tidak adil adalah banyak keluarga yang memberi beban kerja yang berat kepada anak perempuan, dan pekerjaan lebih ringan kepada anak laki-laki. Jika diamati secara benar, maka perempuan selayaknya tidak dibebani dengan pekerjaan keras dan kasar, karena secara kodrati, perempuan merupakan kaum yang lemah lembut serta penuh dengan kasih sayang karena halusny perasaannya, mencintai keindahan, kelembutan serta rendah hati. Tidak hanya itu, perempuan mempunyai kelebihan lain dibandingkan laki-laki adalah karena mereka mampu bekerja dalam masa yang lebih lama, lebih sabar, lebih teliti dan lebih konsisten dalam berkomitmen.

Diskriminasi dan pembatasan hak perempuan membuat potensi perempuan tidak berkembang secara maksimal, peran perempuan menjadi terbatas, yang berakibat kepada rendahnya partisipasi perempuan secara langsung dalam kehidupan, sosial, politik dan ekonomi. Padahal perempuan, kalau diberi kesempatan, juga mampu menjadi penggerak aktifitas, sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Di zaman pra kemerdekaan terdapat banyak perempuan yang memimpin pergerakan bangsa Indonesia, misalnya Cut Nyak Dhin, Cut

---

<sup>11</sup> Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender memiliki tiga peran, yakni peran produktif, reproduktif, dan sosial. Kesetaraan gender hasil dari perlakuan adil gender yang terukur dari kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya terhadap akses dan manfaat pembangunan (Sarah, 2017,5)

Mutia, Cut Meurah Intan, Malahayati, Nyai Ageng Serang, RA Kartini, Roro Gusik, Dewi Sartika, Maria W Maramis, Martha Tiahahu, Emmy Saellan dan lain-lain.

Di sisi lainnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa, diskriminasi perempuan hanya terjadi dalam bidang politik, tetapi dalam bidang non politik perempuan mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun. Muhajir Darwin mengatakan “Di banyak daerah di Indonesia mempunyai banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik. Perempuan Jawa mempunyai kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Segresi laki-laki dan perempuan yang dialami RA Kartini adalah fenomena di kalangan kaum Bangsawan Jawa, bukan di kalangan masyarakat umum (Darwin, 2004, 284).

Sebenarnya secara realitas, diskriminasi perempuan terus saja terjadi sampai sekarang, di mana hegemoni laki-laki masih terlalu perkasa, di rumah, di lingkungan, di ranah lapangan kerja dan juga ranah politik, padahal gerakan perempuan di Indonesia telah lahir sejak tahun 1912 sewaktu didirikan perkumpulan wanita pertama di Jakarta dengan nama “Poetri Mardika”.

Menyadari akan kurangnya kemampuan kaum perempuan di Indonesia, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan, maka masyarakat secara non formal mengadakan pendidikan khas untuk perempuan dalam berbagai bidang. Secara lebih khas, bidang pendidikan perempuan non formal yang telah dilaksanakan adalah pembinaan dalam bidang agama, tata boga, tata busana, seni (tari, musik dan suara), manajemen, keuangan, organisasi, administrasi dan lain-lain.

### **C. Model Pendidikan Islam Non-Formal**

Setiap muslim mempunyai tugas untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama Islam secara minimal. al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok yaitu Ilmu fadhu ‘ain, yaitu ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib, dan Ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi (Al-Ghazali, 19881, 82). Secara lebih jelas ilmu fardhu ain adalah ilmu yang bersifat fardhu untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam (Sarjuni, 2018, 49). Dewasa ini ilmu fardhu ain ini dapat diperoleh secara baik jika seorang anak diikutkan pada pendidikan agama Islam formal yaitu Pesantren dan Madrasah. Di kedua institusi ini, pendidikan agama Islam telah dirancang secara baik melalui penggunaan kurikulum yang dikaji secara baik oleh pengelolanya. Namun di sisi lain terdapat lembaga pendidikan formal yang tidak memberikan pendidikan agama secara baik, karena pelaksanaan pendidikan lebih mengutamakan pendidikan umum, yang berorientasi keduniaan, atau yang disebut sebagai ilmu fardhu kifayah. Menyadari kekurangan tersebut dan untuk memenuhi ruang

kosong pendidikan agama, masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh agama Islam mengembangkan institusi pendidikan non-formal keislaman. Melalui pendidikan Islam non-formal diharapkan setiap muslim dapat menambah ilmu agama (fardhu ain) secara baik yang kemudian dapat dipraktekkan secara baik pula dalam kehidupan.

Beberapa institusi pendidikan Islam non-formal yang berkembang dewasa ini adalah:

#### 1. Taman Pendidikan Al-Quran

Secara lebih khusus dalam Pendidikan Agama Islam, terdapat jenis PAUD dalam bentuk non-formal, yang secara khusus membelajarkan ilmu dasar Agama Islam dan Al-Quran, yang dikenal sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Walaupun namanya Taman Pendidikan Al-Qur'an, namun dalam kurikulumnya, pendidikan di TPQ juga melengkapi pembelajaran dengan pendidikan dasar-dasar agama Islam lainnya. Siti Sumiatun dengan mengutip dari Tim Penyusun Kurikulum Nasional Balai LITBANG LPTQ Nasional Yogyakarta menyebutkan bahwa tujuan dari pendirian dan pelaksanaan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah untuk menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur'an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala urusannya (Sumiatun, 2013, 20). Berdasarkan tujuan yang digariskan oleh LITBANG LPTQ ini, dan memadukannya dengan konsep pendidikan PAUD, maka pelaksanaan pembelajaran pada TPQ harus dilakukan dengan memberi rangsangan yang kuat kepada anak untuk belajar Al-Qur'an bukan sebagai sebuah beban. Dari pola pembelajaran Al-Qur'an yang dikembangkan TPQ selama ini, para guru TPQ menggunakan pola pembelajaran cinta dan hobi membaca Al-Qur'an kepada anak-anak secara baik, sehingga anak-anak mempelajari materi belajar Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an secara mudah tanpa merasa terbebani. Namun demikian jika diamati oleh orang luar TPQ, seakan pembelajaran di TPQ tidak bersifat bermain, tetapi memberi beban yang berat kepada si anak. Situasi ini akan terbantahkan Ketika kita mengunjungi TPQ secara langsung.

#### 2. Pengajian Rutin Mingguan

Pengajian merupakan kegiatan paling awal dari pola pembelajaran agama Islam. Pengajian biasanya dilaksanakan dengan metode halaqah, yaitu dengan pola duduk yang melingkar dalam kelompok. Pengajian ini, bahkan dipercaya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw, yang dilangsungkan di rumah Arqam Ibnu Abu al-Arqam (al-Siba'i, 2011, 36). Ini bermakna pengajian adalah pola pertama dari pendidikan dalam Islam yang telah ada jauh sebelum adanya tempat pendidikan resmi seperti pesantren dan madrasah-madrasah. Pengajian ini biasanya dibimbing oleh para ustaz dan ustazah di suatu rumah, atau dari rumah-rumah ataupun di masjid. Kemudian secara lebih khas di Indonesia, pengajian ini

berubah nama menjadi Majlis Ta'lim. Kata majlis ta'lim berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu majlis dan ta'lim. Kata majlis berasal dari kata *jalasa – yajlisu – jalsan* dan kemudian menjadi *ismu fâ'il, majlis*, yang ma'na dasarnya berarti orang-orang yang duduk. Adapun kata ta'lim berasal dari kata *'allama – yu'allamu – ta'līman*, yang bermakna membelajarkan. Jadi secara etimologis arti dasar dari majlis ta'lim adalah orang-orang yang duduk untuk membelajarkan. Namun kalau melihat dari kegiatan yang berlangsung, bukan untuk duduk untuk membelajarkan, tetapi duduk untuk belajar, yang dalam Bahasa Arab lebih cocok disebut *majlis ta'allum*. Sering kali ketika sebuah bahasa telah berubah dari makna bahasa aslinya, maka ungkapan atau ucapan asli menjadi berubah. Dengan demikian secara bahasa majlis ta'lim diartikan sebagai tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian ajaran Islam (Hasbullah, 1996, 95). Sesuai dengan perkembangan zaman, majlis ta'lim menjadi kegiatan pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti oleh jamaah dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan *hablum minallah, hablum minannas* dan hubungan manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt. (Hasbullah, 1996, 95). M. Arifin menyebutkan bahwa majlis ta'lim adalah sarana dakwah Islam yang mandiri yang dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya, secara demokrasi, berdasarkan musyawarah dan mufakat (Arifin, 1995, 118).

Kegiatan pendidikan yang dilakukan secara organisatoris oleh sekelompok masyarakat disebut sebagai pendidikan non-formal. Hal ini sesuai dengan konsep Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab I Pasal 12 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal mempunyai tujuan pendidikan ditentukan oleh bentuk pendidikan formal itu sendiri sesuai dengan jenisnya". Majlis ta'lim merupakan suatu kegiatan pendidikan non-formal, dalam suatu organisasi yang dilakukan masyarakat secara berkelompok dan mandiri, tanpa melibatkan pemerintah secara resmi. Namun dalam pembiayaannya majlis ta'lim, dapat saja dibantu oleh orang secara mandiri, perusahaan atau pihak lain secara bebas tanpa perjanjian atau melalui suatu perjanjian. Tujuan utama dari majlis ta'lim adalah mengkaji dan mempelajari ajaran Islam. Pola pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok dan berlangsung secara reguler.

Secara umum majlis ta'lim ditumbuhkan oleh masyarakat yang sudah dewasa (untuk laki-laki dan perempuan) dalam lingkungan tertentu, baik di desa atau di kota, dengan tujuan untuk silaturahmi dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam, baik karena yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, maupun untuk menambah dan

memantapkan pengetahuan yang ada. Sebagai sebuah organisasi, majlis ta'lim mempunyai anggota tetap, yang terikat dengan aturan-aturan organisasi.

### 3. Madrasah Diniyah Ta'limiyah

Madrasah Diniyah Ta'limiyah adalah institusi yang berbeda dengan majlis ta'lim. Jika majlis ta'lim biasanya ditumbuhkan sebagai kegiatan orang dewasa, maka Madrasah diniyah ditumbuhkan untuk kegiatan belajar anak-anak dan remaja. Di sisi lain madrasah diniyah juga berbeda dengan madrasah formal yang dikelola secara resmi oleh pemerintah. "Madrasah Diniyah Ta'limiyah" merupakan model pendidikan non-formal yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 /2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab III Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan "bahwa Pendidikan diniyah non-formal diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah ta'limiyah. Sebagai suatu institusi non-formal, kegiatan madrasah diniyah ta'limiyah dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat secara mandiri, namun mengikuti aturan PMA di atas, madrasah diniyah ta'limiyah, walaupun dikelola oleh masyarakat, tetapi mempunyai kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama". Namun demikian penggunaan kurikulum ini tidak kaku sebagai penggunaan kurikulum di madrasah formal. Kurikulum madrasah diniyah ta'limiyah, dapat dipakai oleh pengelola dengan menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan madrasah diniyah ta'limiyah itu sendiri.

### 4. Kegiatan Berbasis Tempat Ibadah

Kegiatan Agama Islam berbasis tempat ibadah pada dasarnya dapat terdiri dari berbagai kegiatan. Namun semua kegiatan tersebut berada di bawah control tempat ibadah, misalnya mesjid, musalla dan surau. Sebagai contoh, diambil pada Musalla Sektor Timur dan Mesjid Tungkop. Ke dua tempat ini rutin mengadakan sejumlah kegiatan pendidikan agama Islam, mulai dari kegiatan TPA, pengajian pemuda, pengajian perempuan dewasa dan pengajian untuk lelaki dewasa. Selain itu di tempat ini juga rutin melaksanakan pengajian umum dalam rangka memperingati hari besar Islam, misalnya memperingati tahun baru Islam, peringatan maulid, menyambut Ramadhan, dan isra' mi'raj.

## III. Pendidikan Informal

### A. Makna Pendidikan informal

Pada dasarnya pendidikan informal adalah pendidikan tidak resmi yang diperoleh seseorang dalam kehidupan hariannya, baik dalam bentuk pengetahuan ataupun dalam bentuk ketrampilan dan *life skill*, yang didapatkan secara sengaja atau dengan cara tidak sengaja.

Pendidikan informal merupakan suatu proses yang sesungguhnya terjadi seumur hidup yang karenanya tiap-tiap individu memperoleh sikap, nilai, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh lingkungannya dari famili atau keluarga dan tetangga, dari pekerjaan dan permainan, dari pasar, perpustakaan dan media massa (Yusuf: 1986, 61). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sesuai pernyataan ini Sudiapermana mengatakan bahwa jika pendidikan formal diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah, pendidikan non formal diselenggarakan oleh masyarakat, maka pendidikan informal utamanya dilaksanakan oleh keluarga (Sudiapermana, 2009,2).

Suatu kelebihan dari pendidikan informal adalah, model pendidikan ini dapat dilaksanakan setiap saat dan dimana saja baik di dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam pergaulan sehari-hari, tanpa batasan waktu, bahkan dapat terjadi tanpa terencana dan tanpa adanya kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan informal, juga dianggap identik dengan pendidikan keluarga. Hal ini terjadi karena pendidikan informal bermula dan diselenggarakan dalam keluarga dan pimpinan keluarga menjadi penanggung-jawabnya.<sup>12</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab pendidikan dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama antara suami istri baik dalam bentuk formal, nonformal atau informal. Secara umum pemimpin keluarga tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anggota keluarga yang lain.

Secara operasional pendidikan dalam keluarga sebagai pendidikan informal dapat dibagi kepada dua macam, yaitu pendidikan internal dalam keluarga, dan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Pendidikan dalam keluarga dapat berlangsung secara internal, oleh pimpinan keluarga, melalui nasehat, contoh, perilaku dan pelatihan. Selain itu, jika pimpinan keluarga tidak mempunyai kecukupan waktu, atau tidak mampu memberikan pengetahuan kepada, anaknya karena orang tua memiliki pengetahuan yang terbatas dalam aspek tertentu, maka orang tua dapat meminta bantuan pihak lain untuk masuk ke dalam keluarga untuk memberi pendidikan kepada anggota keluarga, misalnya guru privat dalam bidang-bidang tertentu. Dengan demikian tugas pimpinan keluarga berjalan secara baik.

Pendidikan yang diberikan orang tua melalui pendidikan informal ini mempunyai fungsi penting untuk anak-anak untuk membantu mereka meningkatkan hasil belajar, baik

---

<sup>12</sup> Aqid keluarga muncul dari ikatan perkawinan dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk bersepakat hidup dalam satu rumah tangga. Ikatan tersebut membuat mereka mempunyai kewajiban untuk saling berbagi dalam satu hal atau lebih, dalam bentuk tanggung jawab, keamanan, pangan, sandang, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan, spiritual, dan lain-lain dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama.

pendidikan formal maupun non formal, mengontrol dan memotivasi mereka agar lebih giat belajar, membantu pertumbuhan fisik dan mental, membentuk kepribadian, memberi motivasi agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, mendidik kemandirian dan melatih memecahkan masalah yang dihadapinya.<sup>13</sup> Dari sini terlihat bahwa peran orang tua dalam pendidikan informal mempunyai arti penting dan tidak terbatas waktu tertentu atau dalam materi tertentu. (Laili: 2020,37).

### **B. Aspek-aspek Pendidikan Informal, dan Pola Pelaksanaannya**

Supriono dkk, menyebutkan bahwa terdapat lima aspek penting dari pendidikan informal yang perlu diperhatikan dalam keluarga yaitu: 1. Menanamkan pendidikan agama. 2. Pendidikan moral. 3. Penanaman nilai-nilai sosial. 4. Mengembangkan ketrampilan kerumahtanggaan, dan 5. Menanamkan Keterampilan Okupasional dan Vokasional. (Supriono dkk., 2015, 58-60).

Memperhatikan ungkapan Supriono dan realitas sosial yang ada ditemukan terlihat bahwa pendidikan dalam keluarga mempunyai bidang yang luas, mencakup pendidikan spiritual dan pendidikan material. Ini semua mempunyai kaitan dengan usaha untuk mendidik anak menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab, serta sehat jasmani dan rohani.

Secara lebih khas dalam agama Islam terdapat bahagian pendidikan utama yang merupakan bidang ilmu, ketrampilan dan sikap anak yang menjadi fardu ain atas orang tua untuk diberikan kepada anak, yaitu ilmu akidah, syariah, dan akhlaqul-karimah. Ketiga bentuk ilmu ini tidak cukup hanya dengan mempelajarinya secara afektif, tetapi juga perlu direalisasikan secara afektif dan psikomotorik dengan sikap keberagamaan Islami yang mumpuni. Jika anak tidak memperoleh ilmu-ilmu dan sikap ini melalui pendidikan formal di sekolah, orang tua wajib memenuhinya melalui pendidikan informal. Sebagai contoh, jika seorang anak muslim belajar di sekolah dasar negeri di Bali, maka pendidikan agama Islam yang disebutkan di atas hanya disajikan sangat sedikit atau bahkan tidak didapatkan sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan ini, orang tua dapat mendidiknya sendiri, atau minta bantuan guru untuk belajar secara privat.

Hal yang sama juga terjadi terhadap materi belajar lainnya, seperti pendidikan sosial dan moral. Di sekolah para siswa belajar moral dan bersosialisasi dengan teman dan para guru secara terbatas. Dalam lingkungan, di bawah bimbingan orang tua, mereka akan belajar secara berkesinambungan tak terbatas waktu.

---

<sup>13</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-informal.html>

Secara realitas alam kehidupan sosial, kita dapat memperhatikan bahwa pembinaan yang dilakukan orang tua, dalam rangka pembinaan dan pemenuhan pendidikan secara informal terhadap keluarga masing-masing, dilakukan dengan cara yang beragam, sesuai kemampuan intelektual dan material orang tua, serta sesuai juga dengan lingkungan dan masyarakat tempat mereka berada.

Beberapa pola yang sering orang tua dalam memenuhi pendidikan anak secara informal adalah: 1) mendidik secara langsung, pengetahuan yang dibutuhkan secara mandiri, tentang aspek yang dinilai kurang mendapat porsi melalui pendidikan formal, 2) memanggil pembimbing yang dianggap ahli ke rumah secara pribadi untuk mengawal dan mendidik anaknya secara kontinu atau dalam batas-batas tertentu, 3) mengantarkan anak untuk belajar pada institusi pendidikan non-formal yang terdapat dalam lingkungan masing-masing, 4) membuat kesepakatan secara lingkungan untuk saling mendidik anak dengan norma-norma lingkungan.

Selain itu terdapat juga keluarga yang merencanakan pendidikan formal secara baik bagi anaknya dengan kriteria dan target yang jelas bagi anak, dalam aspek pengetahuan, ilmu, ketrampilan dan *soft skill* yang dibutuhkan. Kemudian ia memilih sekolah formal yang sesuai bagi anaknya, secara selektif, agar anaknya dapat dimasukkan ke sekolah yang sesuai dengan kriteria pendidikan yang diinginkan. Selektivitas seperti ini sebenarnya sangat diperlukan, karena sekolah mempunyai kualitas proses dan hasil belajar yang berbeda-beda. Tidak sedikit sekolah formal yang dikelola hanya dengan mencekoki anak dengan materi dan menilai mereka berdasarkan pengetahuan kognitif semata. Padahal hasil belajar juga harus mengakomodasi nilai-nilai *soft skill* dan kualitas proses belajar dalam bentuk afektif dan psikomotorik. Aspek ini terkadang terlupakan, sehingga sekolah menjadi institusi yang gagal dalam mendidik anak secara moral, walaupun mempunyai nilai nominal di ijazah yang tinggi. Namun demikian mayoritas orang tua tidak pernah mempunyai kriteria sekolah untuk anak, kecuali sekolah murah dan dekat, walaupun sekolah tersebut berkualitas rendah. Hal ini terjadi karena banyaknya orang tua yang belum memahami aspek-aspek pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan si anak.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### I. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji **Pendidikan Keislaman di Kalangan Minoritas Muslim Bali**. Penelitian dimulai dengan kajian perpustakaan untuk merumuskan kajian teoritis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kajian teoritis yang dibahas berkenaan dengan prinsip mayoritas/ minoritas, diskriminasi, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Memenuhi kebutuhan teoritis ini maka *library reseach* merupakan suatu bagian penting yang harus dilakukan.

Adapun untuk penelitian lapangan, dirancang dengan menggunakan metode kualitatif<sup>14</sup> melalui sistem statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan pendekatan fenomenologik (Noeng Muhajir, 1996, 21, 53, 81 dan 143). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diproses melalui sistem statistik atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya bisa saja dihitung sebagaimana data sensus, namun

---

<sup>14</sup> Beberapa para ahli masih ragu-ragu atau belum mempunyai pandangan yang jelas tentang metode kualitatif. Syamsuddin AR dalam buku *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, hal. 20 menyebutkan bahwa kualitatif merupakan suatu jenis penelitian. Kemudian pada hal. 73, Syamsuddin menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian, tetapi pada halaman 74 Syamsuddin menyebutkan kualitatif sebagai "metode", seperti dalam ungkapan pada kutipan berikut "penelitian yang menggunakan metode kualitatif percaya...". Menyebutkan beberapa istilah untuk dipadankan dengan kata "kualitatif" ini, menunjukkan bahwa Syamsuddin belum mempunyai suatu pandangan yang tegas tentang penelitian kualitatif. (Lihat: Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 73-74). Dalam beberapa tulisan yang diedit oleh Julian Brannen juga tidak ada ketegasan dan cenderung agak ragu-ragu tentang apakah kualitatif itu sebuah metode atau sebuah pendekatan (Lihat: Julian Brannen (ed), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 12-13). Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, juga tidak memastikan apakah "kualitatif dan kuantitatif" itu sebuah pendekatan ataukah sebuah metode penelitian. Pada judul buku, Sugiono menyebutkannya sebagai pendekatan, tetapi pada banyak tempat dalam buku tersebut ia menyebutnya sebagai metode. (Lihat: Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1, 13, 14, 15, dst.). Dalam kamus Oxford disebutkan *method* mempunyai makna "(1) *Prosedure for attaining an object*. (2). *a way of doing anything... according to a defined and regular plan, a mode of procedure in any activity...* (Lihat: *The Oxford English Dictionary*, (Oxford: The Clarendon Press, 1978), cet. III, hal. 394.) Metode merupakan suatu cara dalam pelaksanaan, dan bersifat prosedural, artinya pemilihan metode dapat dilakukan dengan disesuaikan situasi dan kondisi. Sedangkan pendekatan adalah suatu yang bersifat *axiomatic* (kebenaran yang tak perlu lagi diragukan), yang menjadi dasar pijakan filosofi suatu aktifitas. Menurut Noeng Muhajir, dalam penelitian terdapat empat pendekatan yaitu: pendekatan positivistik, pendekatan rasionalistik, pendekatan fenomenologik dan pendekatan realisme metafisik. (Lihat: Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), Ed. III, cet. VII, hal. 21, 53, 81 dan 143). Jika diamati dari pernyataan ini, sebenarnya istilah "kualitatif dan kuantitatif" dalam penelitian dapat dianggap sebagai suatu metode yang ditegaskan di atas beberapa pendekatan tersebut. Beberapa pakar penelitian secara tegas mengatakan bahwa "kualitatif dan kuantitatif" adalah metode penelitian, di antara mereka adalah Anselm Strauss dan Juliet Corbin dalam buku *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory, Procedures and Techniques*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Shodiq. (Lihat: Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. I, hal, 5).

analisisnya bersifat kualitatif (Lexi J. Moleong, 2002, 3).<sup>15</sup> Penelitian ini mengikuti model *grounded research* yang dipadukan dengan model paradigma naturalistik.<sup>16</sup>

Secara sederhana dalam teori model *grounded research* diyakini bahwa konsep harus dibangun berdasarkan pengalaman (empirik), dan teori harus dibangun dari data yang tersedia. Jadi dalam teori model *grounded research*, pengalaman dan data merupakan dua hal yang sangat penting. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang sesuai untuk penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengamati teks, realitas dan gejala-gejala dari aktifitas yang nyata. Pendidikan bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.

## II. Sumber Data

Sumber data dari penelitian tentang **Pendidikan Keislaman di kalangan Minoritas Muslim Bali** dikumpulkan dari:

1. Dokumen, yaitu dokumentasi yang berhubungan dengan sistem kehidupan masyarakat Muslim di Bali, yang diusahakan sedapat mungkin dikumpulkan dari MUI, tokoh masyarakat dan/atau organisasi yang memilikinya.
2. Peristiwa. Mengadakan pengamatan secara langsung dari peristiwa, yang berhubungan dengan **Pendidikan Keislaman di kalangan Minoritas Muslim Bali**. Temuan-temuan tersebut kemudian dirumuskan secara teoritis berdasarkan fenomena yang ada (Lexi J. Moleong, 2002. hal. 72).
3. Informan, yaitu para nara sumber yang terkait dan mempunyai informasi penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Moleong dengan mengutip dari Kirk dan Miller mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri. Pendekatan ini juga dipilih karena dapat dilakukan secara lebih *holistic* (utuh). (Lihat: Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 3). Metthew B. Miles lebih tegas mengatakan, data utama yang dianalisis dari penelitian kualitatif adalah rangkaian kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data-data ini diperoleh dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, dokumen dan lain-lain. (Lihat: Metthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 15). Lihat juga: Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian...* hal. 4.). Nyoman Kutha Ratna menyebutkan bahwa “metode kualitatif pada dasarnya sama dengan metode hermeneutika. Artinya, baik metode hermeneutika, kualitatif, dan analisis isi secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. (Lihat: Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004). Cet. I, hal. 46.)

<sup>16</sup> Metode kualitatif yang berdasarkan pendekatan fenomenologik dalam pelaksanaannya mengikuti empat model yaitu model *grounded research*, model ethnographik-ethnometodologik, model paradigma naturalistik dan model interaksi simbolik. (Lihat: Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 86, 94, 107 dan 135).

### III. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode (Suharsimi Arikunto, 2002, 156). Setiap metode pengumpul data mempunyai instrumen tersendiri, yang disesuaikan dengan keperluannya masing-masing.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yaitu telaah dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Penggunaan tiga metode ini dilakukan sebagai triangulasi metode yang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta yang lebih kuat. Untuk lebih praktisnya, maka peneliti membuat beberapa instrumen pengumpul data sesuai metode tersebut, seperti berikut:

- a. Telaah dokumentasi, instrumennya adalah pedoman dokumentasi dan *check list*.
- b. Wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara.
- c. Observasi, instrumennya adalah pedoman observasi, kamera dan lain-lain.

Dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan, maka diharapkan semua informasi penting dapat diperoleh secara maksimal. Walaupun demikian sesuai dengan kaedah metode penelitian, bahwa dalam metode kualitatif, salah satu kriterianya adalah, manusia langsung menjadi instrument (Lexi J. Moleong, 2002, 4-8). Dari itu, secara umum, maka instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, melalui pengamatan yang dalam.

Sewaktu melakukan wawancara, pada dasarnya penulis mengajukan pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan melalui pedoman wawancara. Namun demikian, dalam wawancara tersebut akan sangat sering pembicaraan berkembang berdasarkan opini yang dibuat oleh informan. Karena itu maka tidak jarang juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul menjadi pertanyaan tidak terstruktur, namun penulis berusaha agar pembicaraan tidak keluar dari kontes. Untuk mendapatkan informasi yang kuat dan konsisten, peneliti juga melakukan triangulasi wawancara dengan membandingkan hasil wawancara antar nara sumber, yang mungkin memberikan keterangan yang berbeda-beda.

Kelebihan dari menjadikan peneliti sebagai alat atau instrumen adalah peneliti dapat memberikan penilaian terhadap sebuah data, sehingga dapat langsung memutuskan perlu/tidaknya data tersebut, secara fleksibel.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### I. Islam di Provinsi Bali

Islam di Bali bukan merupakan agama yang baru. Menurut beberapa catatan, Islam bermula di Bali di daerah Klungkung, setelah runtuhnya Majapahit. Alkisah seorang laki-laki bernama Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan atau Raja Dalem Ketut (Keluarga Dinasti Majapahit dari Pasuruan tiba di Bali.<sup>17</sup> Kisah lain menyebutkan bahwa Raja Dalem Ketut sebenarnya adalah Raja Gel-gel yang mengadakan kunjungan ke Maja Pahit ketika Hayam Wuruk mengadakan pertemuan kerajaan taklukan Majapahit (Diana, 2016, 59). Tak lama setelah kembalinya Raja Dalem Ketut ke Bali, kemudian melalui Loloan datang Ratu Dewi Fatimah, seorang keluarga Majapahit yang sudah menjadi Muslimah, untuk mengajak Raja Dalem Ketut menjadi muslim dan membina keluarga. Namun usaha Ratu Fatimah gagal, karena Raja Dalem Ketut kebal dan tidak mempan untuk dikhitan. Ratu Fatimah kemudian kembali ke Loloan (Sarlan, 1997, 3). Raja Dalem Ketut dalam perjalanannya ke Bali diiringi oleh 40 orang pengawal yang beragama Islam, yang akhirnya menetap dan bertindak sebagai abdi dalem kerajaan Gelgel, dan menempati satu wilayah pemukiman pemberian raja, serta menikah dengan wanita lokal. Mereka merupakan cikal bakal umat Islam pertama yang datang ke pulau Bali. Mereka disambut dengan sangat baik oleh warga setempat, bahkan mereka menganggap orang Islam sebagai saudara sesama yang disebut *Nyama Slam* (Bhasyar, 2010, 1). Sampai saat ini desa Gel-gel adalah wilayah pemukiman muslim yang berkembang secara baik dan aman di Bali. Di desa ini berdiri masjid Nurul Huda, yang merupakan basis aktifitas umat Islam di wilayah ini.

Masuknya Islam melalui tangan prajurit Islam tidak hanya terjadi di Klungkung, tetapi juga terjadi di wilayah lain. Segara mencontohkan saat Kerajaan Badung mengalami konflik dengan Kerajaan Mengwi, Raja Badung menggunakan orang-orang Bugis sebagai prajurit, dan akhirnya memenangkan pertempuran. Setelah perang berakhir, orang-orang Bugis tersebut diberikan penghargaan dalam bentuk tanah catu sebagai tempat tinggal. Mereka kemudian menetap di Badung dan terus menjaga hubungan baik dengan kerajaan. Pola seperti di Kampung Bugis ini juga masih berlaku di Kampung Islam di Kapaon, Denpasar, dan sebagian besar kampung-kampung Islam di Bali. Segara juga mengatakan,

---

<sup>17</sup> Dalam Jurnal Historia disebutkan bahwa Dalem Ketut Ngelesir hidup antara tahun 1380-1460 M, merupakan putra raja pertama Samprangan Sri Aji Krisna Kepakisan alias Dalem Sri Kresna Kepakisan (memerintah 1352). Lihat: <https://historia.id/agama/articles/riwayat-islam-di-bali-vV9Ql>

selain dengan pola ini, Islam juga masuk melalui jalur niaga sehingga hampir di semua daerah pesisir dan pelabuhan, mereka akhirnya mendirikan Kampung Islam (Segara, 2018, 324).

Selain di wilayah Klungkung, Islam juga datang ke Bali dari wilayah lainnya dengan berbagai pola. Beberapa pola kehadiran Islam di daerah-daerah dalam wilayah Bali diuraikan secara ringkas oleh I Nyoman Yoga Segara, yaitu: (1) Islam hadir di Karangasem melalui peristiwa Tulamben; (2) Islam hadir di Buleleng berdasarkan Babad Buleleng saat Kerajaan Buleleng diperintah oleh I Gusti Ngurah Panji; (3) Islam hadir di Jembrana melalui seorang Daeng Nakhoda mendarat di Air Kuning dan mendirikan Kampung Bajo; (4) Islam hadir di Badung melalui pasukan dari Bugis yang membantu Kerajaan Badung melawan Mengwi; (5) Islam hadir di Tabanan meski tidak terdapat naskah khusus, tetapi ditandai oleh kehadiran Aryo Nur Alam, satu dari tiga orang Islam yang berasal dari Blambangan; dan (6) Islam hadir di Bangli melalui Tengku Ahmad yang merupakan bekas pemberontak Perang Aceh (Segara, 2018, 323).

Provinsi Bali terdiri dari sembilan Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Madya Denpasar.

Berdasarkan data pusat statistik Bali, yang diunggah tanggal 10 April 2020, secara keseluruhan penduduk Provinsi Bali berjumlah 3.890.757, dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 520.244 jiwa dibandingkan penduduk beragama Hindu Bali sebanyak 3.247.283 jiwa.<sup>18</sup> Dari data ini dapat diamati bahwa secara persentase, jumlah penduduk Bali yang beragama Islam hanya 13,37% dari keseluruhan penduduk Bali. Warga muslim Bali tersebar di semua Kabupaten/Kota dengan wilayah tinggal muslim terbanyak berada di kota Denpasar yaitu mencapai 225.899 jiwa atau sekitar 49,18 %, dari muslim Bali. Adapun jumlah warga muslim terkecil berada di Kabupaten Bangli yaitu 2185 jiwa.

Dari data kependudukan di atas diketahui bahwa muslim Bali tersebar di semua daerah, secara hampir merata. Namun demikian dari sebaran tersebut terdapat beberapa daerah atau desa yang sudah menjadi pusat konsentrasi Islam di Bali, sehingga kalau kita mengunjungi daerah tersebut, kita akan merasakan seakan kita tidak berada di daerah minoritas muslim atau bukan berada di Provinsi Bali. Beberapa daerah konsentrasi Muslim yang dikenal di Bali adalah:

---

<sup>18</sup> <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/15/33/penduduk-provinsi-bali-menurut-agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-2010.html>

### **A. Kampung Loloan**

Kampung Loloan berada di Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah berdekatan dengan Bali dari Banyuwangi. Wilayah Kampung Loloan merupakan permukiman khas nelayan, yang terkenal sebagai wilayah mayoritas muslim Bali.

Penyiar awal Islam di kampung Loloan adalah orang Bugis dan Melayu yang hadir di tanah Bali, sekitar 4 abad lalu, melalui dua tahap. Tahap *pertama*, adalah kedatangan suku Bugis dan Makassar pada tahun 1653-1655M, kemudian *kedua* menyusul pula pada tahun 1660-1661M orang-orang kerajaan dari Sulawesi seperti Gowa, Ternate, Sopeng, dan Bajo, ketika terjadi perang antara Kerajaan Makassar dengan Belanda. (Karim, 2016,16). Kedatangan mereka dipimpin oleh Daeng Marewa, sebagai pelarian dari Gowa setelah adanya perjanjian bongaya ketika Kerajaan Gowa kalah perang dengan Belanda (Saihu, 2019, 80).

Akhirnya, para prajurit itu menetap di wilayah Perancak. Kedatangan mereka pun diketahui penguasa Jembrana saat itu, I Gusti Arya Pancoran dan beliau mengizinkan mereka menempati daerah Loloan. Bukti kedatangan mereka di wilayah itu bisa dilihat dari keberadaan Sumur Bajo di pinggir pantai. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari terlihat melalui adanya budaya Bugis, Melayu yang bercampur dengan kebudayaan asli Bali (Saihu, 2019, 80).

Dewasa ini aktifitas Islam di kampung Loloan berlangsung secara natural, laksana aktifitas Islam di wilayah mayoritas muslim lainnya, tanpa ada kendala. Dan yang sangat menyenangkan di kampung ini adalah tingginya sikap toleransi yang sudah terbangun sejak lama. Mereka saling menghormati, dengan tetap menjaga keyakinan dan kenyamanan lingkungan.

### **B. Kampung Pageyaman.**

Kampung Pegayaman adalah sebuah desa yang masuk wilayah Kecamatan Sukasada, Buleleng. Penduduk kampung ini 90% dari mereka adalah muslim. Menurut Hasil penelitian I Nyoman Naya Sujana, tidak diketahui secara pasti kehadiran muslim di Desa Pegayaman. Semua cerita yang ada adalah berbentuk mitologis yang berkembang secara lisan (Sudana, tt, 107). Di antara cerita tersebut adalah pemukim muslim awal di Pegayaman adalah orang-orang Jawa muslim yang dikirim oleh Kerajaan Buleleng (Prasetya, 2012, 58). Cerita lain menyebutkan kehadiran muslim di Buleleng adalah para prajurit untuk mengantarkan atau mengiringi keberangkatan Raja Buleleng dari Mataram menuju Blambangan lalu ke Bali. Para pengantar tersebut diberi hadiah oleh Raja Buleleng (*Anglurah Ki Barak Panji Sakti*) yaitu sebuah tempat tinggal, di wilayah Banjar Jawa, yang sekaligus juga sebagai tempat

peristirahatan gajah. Selanjutnya, orang-orang Jawa yang ada di Banjar Jawa yang disebut di atas, dipindahkan ke bagian selatan wilayah Kerajaan Buleleng (Agustian, 2017, 119). Selanjutnya menurut Endy Agustian bahwa seiring berjalannya waktu, ada sebuah cerita yang menyatakan bahwa pada tahun 1850 M terdamparlah sebuah kapal di pantai Buleleng (Kampung Bugis). Kapal tersebut adalah rombongan dari Raja Bone Sulawesi yang hendak berangkat ke Pulau Jawa dan Madura (Agustian, 2017, 119).

Walaupun secara historis awal dan proses kehadiran Islam di Pegayaman, masih dianggap kabur, tetapi fakta-fakta antropologis mengindikasikan keberadaan Islam di Pegayaman sudah berlangsung lama. Di mana secara kasat mata Islam telah memperlihatkan praktik dari nilai-nilai dalam kehidupan di Pegayaman. Tatanan sosial dan budaya yang berlangsung di Pegayaman kental dengan nilai-nilai Islam. Di sini suara syiar Al-Qur'an dan azan melalui toa adalah hal yang biasa. Warga Pegamayam hidup penuh toleransi dimana hubungan antara masyarakat muslim di Pegayaman dan orang-orang Hindu di sekitarnya telah terjalin secara baik dan saling hormat-menghormati secara damai. Hal ini telah berlangsung sejak Islam berada di Bali yaitu sejak abad ke-17 M.

### **C. Kampung Gel-gel, Klungkung**

Kampung Gel-gel adalah desa Islam tertua yang ada di Bali, sejarah keberadaan Islam di kampung Gel-gel adalah sejarah kehadiran Islam di Bali sebagai mana telah diuraikan pada bagian awal dari sejarah Islam di Bali. Dalam web kampung Gel-gel dijelaskan bahwa relasi Hindu dengan Islam di kampung Gel-gel bermula ketika “terjadi peristiwa penting dalam Pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir sebagai Raja Gelgel I (1380 – 1460 M), yaitu Raja Bali pernah mengadakan kunjungan ke Kraton Majapahit pada waktu Raja Hayam Wuruk mengadakan konferensi Kerajaan-kerajaan yang ada diseluruh Nusantara. Saat Raja Bali Dalem Ketut Ngelesir kembali ke Bali di kawal oleh 40 pengiring dari Kerajaan Majapahit yang beragama Islam, dan sesampainya di Bali, ke 40 orang pengiring ini diberi tempat atau hadiah yaitu di daerah Gelgel. Dari 40 pengiring ini ada yang kembali ke Jawa, ada yang ke bagian timur dan ada yang menetap di Gelgel sampai saat ini”<sup>19</sup>. Namun demikian, walaupun sejarah ini telah ditulis dalam banyak artikel dan buku-buku, tetapi tidak ditemukan bukti sejarah tulisan dalam bentuk prasasti dan manuskrip yang biasanya menjadi bukti kuat dalam kajian sejarah.

Ketika peneliti berada di kampung Gel-gel, peneliti menemukan suasana kampung Gel-gel seperti kampung Islam lainnya yang ada di Indonesia. Ketika waktu shalat tiba, azan

---

<sup>19</sup> <https://kampunggelgel.desa.id/index.php/first/artikel/99>

dikumamandangkan secara keras dari toa Masjid Nurul Huda Kampung Gel-gel yang dipercaya sebagai masjid tertua yang ada di Bali. Pada saat yang sama para muslim kampung Gel-gel datang memenuhi masjid. Menurut banyak literatur, masjid ini awalnya dibangun pada abad ke 13 M, dan merupakan jejak masuknya Islam di Bali. Dalam artikel Sapta Pesona diuraikan, setelah direnovasi beberapa kali, masjid Nurul Huda ini kini tampak terlihat megah dan modern. Nuansa masa lalu masih dapat ditemukan pada bagian menara yang menjulang tinggi dan ukiran pada pintu yang berbahan dasar kayu.<sup>20</sup>

Dalam kehidupan social, masyarakat kampung Gel-gel hidup damai penuh toleransi. Tidak ada krisis yang terjadi karena perbedaan agama dalam kehidupan masyarakat, malah kegiatan keagamaan dilakukan dengan penuh toleransi dan kedamaian misalnya ketika masing-masing ummat merayakan hari raya. Ummat Islam menjaga kedamaian ketika perayaan Nyepi dan begitu juga sebaliknya. Selain itu umat Islam juga sering mengadakan acara *ngaminang*, yaitu acara buka puasa bersama yang diselenggarakan dalam bulan Ramadhan. Dalam acara ini masyarakat muslim juga mengundang masyarakat Hindu untuk ikut menikmati kebersamaan berbuka puasa.

Walaupun demikian, suasana Bali dan Hindu masih dapat terlihat secara kasat mata misalnya dengan tulisan-tulisan Bali pada banyak prasasti dan terdapat beberapa pura ibadat, yang malah salah satunya berdekatan dengan masjid. Ibu Syarifah, seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan masjid mengatakan bahwa masyarakat kampung ini hidup secara damai dan tidak pernah ada gangguan antar masyarakat, dan malah dalam kehidupan keseharian mereka saling membantu.<sup>21</sup> Pengakuan akan keberadaan Islam di desa Klungkung diperkuat dengan misi poin pertama desa Gel-gel yang tertera di web resmi desa yaitu: "Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Pada ALLAH SWT".<sup>22</sup>

#### **D. Kampung Lebah, Klungkung**

Kampung Islam Lebah adalah sebuah kampung yang beralamat di Kelurahan Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali, tepatnya di sepanjang Jalan Diponegoro. H.A Murtadho, Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, bahwa nama Kampung Lebah berasal dari kata Lembah, disebabkan kampung ini berada di dataran yang lebih tinggi dari jalan Semarapura. H.A Murtadho menjelaskan bahwa bahwa nama Kampung Lebah diambil dari filosofi hewan lebah (tawon). Seorang Muslim diibaratkan seperti lebah yang menanamkan nilai-nilai kebaikan. Lebah menghasilkan madu yang mempunyai banyak khasiat untuk

---

<sup>20</sup> <https://pesona.travel/keajaiban/4948/masjid-nurul-huda-kampung-gelgel-masjid-tertua-di-bali>

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Syarifah di desa Gel-gel pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020.

<sup>22</sup> Web resmi desa Gel-gel: <http://kampunggelgel.desa.id/first/artikel/93>

kesehatan. lebah itu kan selalu terbang dan hinggap di bunga tetapi tidak sampai merusaknya, lebah juga menghasilkan madu yang dapat digunakan untuk obat.<sup>23</sup>

Kehidupan masyarakat Islam di kampung Lebah berada dalam kondisi yang aman dan penuh toleransi. Sebagai tempat kegiatan Islam, di kampung ini terdapat lima mushalla dan satu masjid, yaitu Masjid Al-Hikmah seperti yang disebutkan di atas. Jumlah tempat ibadah bagi muslim dianggap cukup, dan jika tidak cukup, untuk pembangunan tempat ibadah baru bagi muslim tidak menjadi masalah dalam perizinan. Selain tempat ibadah, di kampung ini juga terdapat institusi pendidikan Islam yang mumpuni buat anak-anak dengan adanya Yayasan Hasanuddin yang mendirikan MI dan MTs, serta Pondok Pesantren Tarbiyatul Athfal. Di samping itu juga terdapat RA dan institusi pendidikan al-Khair Muhammadiyah (Suchaimi, 2014, 1). Adapun dalam kegiatan kesenian, masyarakat kampung ini melestariakan tarian Islam seperti tari Rudat,<sup>24</sup> Samrah,<sup>25</sup> Qasidahan dan lain-lain. Kesenian ini mendapat tempat yang baik dalam masyarakat dan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan muslim Kampung Lebah.

#### **E. Kampung Kecicang, Karang Asem**

Karang Asem adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kampung Kecicang Islam berlokasi di daerah Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungayan Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Penduduk kampung ini mencapai lebih dari 3400 jiwa dan merupakan kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem, Bali. Warga kampung kecicang meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari penduduk kawasan Tohpati Buda Keling. Setelah raja mereka meninggal, raja baru memindahkan penduduknya dari Tohpati ke Kecicang dengan cara membuka hutan.<sup>26</sup>

Menurut Mashad - yang dikutip dalam laporan penelitian oleh Rahayu Arini dkk menyebutkan bahwa - pada tahun 1692 M Raja Karangasem yaitu Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem berhasil menaklukkan Pulau Lombok. Raja kemudian membuat kebijakan membawa orang muslim yang berasal dari Lombok ke Kerajaan Karangasem. Kisah ini menjadi awal dari keberbedaan umat Islam di Karangasem (Mashad, 2016, 113).

---

<sup>23</sup> <http://dakwahmuslimbali.com/detailpost/kampung-muslim-lebah-klungkung-bali>

<sup>24</sup> Tari Rudat adalah tarian tradisional yang berasal dari Suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Tari\\_Rudat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Rudat))

<sup>25</sup> Samrah adalah salah satu budaya Betawi. Orkes Samrah berasal dari Melayu sebagaimana tampak dari lagu-lagu yang dibawakan seperti lagu Burung Putih, Pulo Angsa Dua, Sirih Kuning, dan Cik Minah dengan corak Melayu, di samping lagu-lagu khas Betawi, seperti Kicir-kicir, Jali-jali, Lenggang-lenggang Kangkung, dan sebagainya. Tarian yang biasa diiringi orkes ini disebut Tari Samrah. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Samrah>).

<sup>26</sup> <https://www.dream.co.id/jejak/menyambangi-kecicang-islam-kampung-muslim-terbesar-di-bali-150909k.html>

Nama Kecicang sendiri diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Namun, ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Kecicang berasal dari kata *incang-incangan* yang berarti 'saling mencari saat perang pada zaman kerajaan'. Menurut Abdullah, selain dua cerita ini tidak diketahui secara pasti, mengapa nama kampung tersebut bernama Kecicang. Secara umum warga kampung Kecicang beragama Islam. Karena berpenduduk mayoritas Islam, nuansa Islami terasa begitu kental dalam kehidupan di kampung ini. Pusat kegiatan Islam berada di Masjid Baiturrahman, yang telah ada sejak akhir abad 17 M. Bagi Muslim Kecicang masjid ini mempunyai fungsi penting dan bahkan sudah menjadi icon bagi muslim Kampung Kecicang. Menurut Riwayat tokoh setempat, pada awalnya Masjid Baiturrahman adalah sebuah masjid kecil. Seiring dengan penambahan jumlah warga kampung yang beragama Islam, maka masjidpun juga ikut diperluas menyesuaikan dengan kebutuhan umat.

Sebagaimana di daerah Islam lainnya kegiatan keislaman masyarakat kampung Kecicang juga berjalan secara massif, tanpa adanya gangguan dari masyarakat non-Islam. Kegiatan Islam tersebut dapat berbentuk kegiatan ibadah seperti tahlil, ziarah, dan selamatan, maupun kegiatan seni Islam misalnya tari-tarian khas bernama Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Secara lebih khusus, ketika menyambut bulan Ramadhan warga muslim Kecicang mengadakan serangkaian acara yang dimulai dengan pawai ta'arruf Ramadhan dan kegiatan *magibung* (buka bersama). Kedua acara ini mengikut sertakan tokoh dan masyarakat non-muslim setempat (Arini, 2017, 6). Kegiatan keislama lain yang dilakukan warga Kampung Kecicang adalah kegiatan tradisi "Safaran" pada bulan Safar. Kegiatan ini merupakan tradisi muslim tahunan yang sudah menjadi warisan budaya Islam Kecicang.<sup>27</sup>

Kegiatan-kegiatan keislaman ini dilakukan secara damai dan penuh toleransi tanpa mengganggu masyarakat non-muslim sekitar, dan malah mendapat dukungan dari mereka, misalnya kesediaan para polisi adat turut serta membantu mengamankan hari kegiatan umat Islam. Kemampuan menjaga tradisi Islam secara damai ini menjadikan Kampung Kecicang Islam sebagai kampung yang penuh harmoni, sejak awal.

## **II. Pola Pelaksanaan Pendidikan Keislaman Informal dalam Lingkungan Keluarga Muslim di Bali.**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: Suami-isteri, atau Suami, isteri, dan anaknya, atau Ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya (UU RI 52, 2009).

---

<sup>27</sup> <https://bali.tribunnews.com/2019/10/23/warga-kecicang-islam-gelar-shafaran-di-makam-balok-sakti>

Miftahul Jannah, dengan mengutip dari BKKBN 1997 menyebutkan bahwa secara umum keluarga mempunyai beberapa fungsi yaitu: 1) Fungsi Keagamaan, keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Fungsi Sosial Budaya, memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. 3) Fungsi Cinta Kasih, keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan bathin. 4) Fungsi Melindungi, dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. 5) Fungsi Reproduksi, merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa. 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan. 7) Fungsi Ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan, memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah (Jannah, 2018, 94).

Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari keluarga itu adalah “Fungsi Keagamaan”, keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berpijak dari fungsi keagamaan sebagai dasar kehidupan keluarga, maka perhatian terhadap pendidikan agama dalam keluarga merupakan aspek yang sangat penting, yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam kehidupan keluarga. Dengan dasar pikir yang sama, masyarakat muslim Bali juga menitik beratkan perhatian bagi pembinaan agama dalam keluarga, apa lagi masyarakat muslim yang merupakan masyarakat minoritas di Provinsi Bali. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjaga kualitas pendidikan Keislaman dalam lingkungan keluarga, masyarakat muslim Bali melakukan berbagai kegiatan pendidikan informal, dengan tujuan agar pendidikan keislaman dalam keluarga berjalan secara maksimal. Dari penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat di Bali sejak tanggal 17 s/d 27 Februari 2020, melalui pengamatan dan wawancara

narasumber, peneliti menemukan beberapa fakta tentang pelaksanaan pendidikan keislaman informal dalam lingkungan keluarga Bali, seperti berikut:

#### **A. Memperkuat ketahanan keluarga Islam dengan membangun semangat Islam dalam keluarga**

Bapak Imam Taufiq, seorang jama'ah Masjid An-Nur Denpasar mengatakan bahwa hal penting yang dilakukan masyarakat muslim Bali dalam menanamkan pendidikan keislaman adalah memperkuat ketahanan keluarga. Artinya setiap orang tua mesti mendidik anaknya tentang agama Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan keluarga. Bapak Imam Taufik melanjutkan bahwa dengan adanya kesadaran dan perilaku Islam, terutama dari orang tua, maka keislaman dalam keluarga akan menjadi kuat.<sup>28</sup> Seirama dengan Bapak Imam Taufiq, yaitu Bapak Mulyono, seorang pedagang Restoran Muslim di Denpasar juga mengatakan bahwa ketahanan keluarga dalam beragama adalah hal yang mutlak harus dilakukan, dan anak perlu terus menerus diingatkan akan ajaran agama Islam untuk memperkuat jati diri dan sadar keislaman. Urgensi dari ketahanan keluarga dalam ajaran agama adalah anak muslim akan mengenal jati diri, sehingga jikapun mereka bersahabat dengan masyarakat non-muslim, mereka akan mampu menempatkan diri pada posisi yang benar.<sup>29</sup> Bapak Adriman, Imam Masjid Taqwa Pekutatan mengatakan ketahanan keluarga adalah dasar penting dalam kehidupan beragama, dan itu dapat dilakukan dengan menitik beratkan ajaran agama dalam keluarga sejak dini, yang dimulai dengan contoh Islam dari orang tua.<sup>30</sup> Sesuai dengan kutipan sebelumnya bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan kebaikan masyarakat secara umum dimulai dari unit keluarga, maka adalah benar jika ketahanan masyarakat Islam tergantung kepada sejauh mana sebuah keluarga mampu menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap unit keluarga. Nilai-nilai inilah yang senantiasa dipraktekkan dan ditemukan dalam kehidupan muslim Bali. Namun demikian, secara kualitatif, dalam kehidupan sosial, tidak dapat dipungkiri masih banyak juga keluarga muslim Bali yang juga kurang memperhatikan masalah ini. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, seperti banyak dari keluarga muslim yang kurang menyadari bahwa mereka berada dalam lingkungan minoritas, karena hidup di Pulau Bali terasa nyaman, karena mereka beranggapan bahwa muslim di Bali tidak perlu khawatir anaknya tergoda oleh imannya orang Hindu Bali, karena agama Hindu Bali, bukan agama missionary, atau orang Hindu

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Taufiq di Masjid An-Nur pada tanggal 18 Februari 2020.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono di kota Denpasar pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Adriman di Masjid Taqwa Pekutatan pada tanggal 22 Februari 2020.

tidak mengajak non-Hindu masuk agama mereka.<sup>31</sup> Faktor lain yang membuat keluarga di Bali kurang memperhatikan ketahanan agama dalam keluarga adalah banyak pimpinan keluarga muslim Bali yang bersifat liberal, sehingga tidak terlalu memperhatikan agama dalam kehidupan. Pola pemikiran liberal ini, sebenarnya tidak hanya berkembang dalam masyarakat Bali saja, tetapi telah berkembang juga dalam kehidupan masyarakat muslim di wilayah lain di Indonesia. Clifford Geertz, telah lama menyebutkan bahwa orang Jawa secara umum terbagi kepada tiga kelompok, yaitu, kaum priayi, santri dan abangan (Clifford Geertz, 1981, 6). Pernyataan Clifford Geertz ini juga bisa digeneralisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun secara khusus dalam masyarakat Bali, kaum santri pasti sangat sedikit dibandingkan kaum priayi dan abangan. Dan sudah pasti tidak semua muslim Bali adalah kaum santri, tetapi banyak di antaranya juga yang abangan.

#### **B. Mengingat anak untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mengedepankan toleransi.**

Bapak Eko Tugas Pribadi, seorang anggota Majelis Ulama Provinsi Bali mengatakan bahwa muslim Bali, senantiasa mengingatkan anak untuk hidup sesuai ajaran Islam, terutama dalam menjaga makanan dan pakaian, sehingga anak selalu mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat, dan mengenakan pakaian yang islami. Walaupun demikian menurut Bapak Eko satu hal lain yang juga penting bagi anak muslim adalah mampu bersahabat dengan kawannya yang non-muslim secara harmonis dan penuh toleran, namun tetap menjaga anak agar mereka tidak tergoda dengan pola kehidupan bebas di Bali dan tetap menjaga harmoni dalam masyarakat.<sup>32</sup> Abu Adam, pedagang restoran Padang di Denpasar mengatakan, baginya yang paling penting dalam kehidupan Islam adalah terus menerus menjaga agar anak tetap konsisten dengan Islam, yang dilakukan dengan berbagai cara, yang diawali dengan perilaku orang tua dan mengingatkan secara kontinu, hingga menjadi kebiasaan dan selalu tergambar dalam ingatan.<sup>33</sup> Bapak Nashar, Imam Masjid Kota Negara, Kab. Jembrana mengatakan masyarakat muslim secara kontinu menjaga anak-anak tetap mengenal dirinya sebagai orang Islam, terutama dalam berpakaian (bagi putri) dan dalam hal menjaga makanan. Dari konsistensi keluarga seperti ini dapat terlihat bahwa wanita muslim Bali tidak sungkan untuk menggunakan busana muslimah dan tetap menjaga makanan dengan mencari sumber makanan yang halal. Pak Nasar sering memberitahu anak-anak, bahwa kalau mengkonsumsi makanan haram, kita jadi sulit belajar agama Islam. Akibat

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Tugas Pribadi, anggota Majelis Ulama Propinsi Bali, di kantor MUI Propinsi Bali pada tanggal 18 Februari 2020.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Tugas Pribadi, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Abu adam, tanggal 19 Februari 2020.

pendidikan Islam dari rumah yang dilakukan secara kontinu, kita temukan generasi Islam Bali, tetap kokoh memegang budaya Islam walaupun mereka berada di lingkungan non-Islam.<sup>34</sup> Ungkapan narasumber di atas dapat diamati secara realistis dalam kehidupan sosial, di manapun di berbagai tempat, di berbagai pelosok di Bali, dapat ditemukan perempuan muslim yang mengenakan busana muslimah, dan belum pernah ada persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat karena busana Muslimah yang mereka kenakan.

### **C. Mendidik anak untuk belajar agama Islam di pengajian (TPA dan RA Islam) yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat muslim.**

Menurut Eko Tugas Pribadi, institusi pendidikan penting yang dilaksanakan di lingkungan Islam adalah pengajian anak-anak yaitu TPA. TPA ini tersedia di hampir setiap musalla yang ada di lingkungan Muslim.<sup>35</sup> Dalam pengamatan peneliti, TPA tersebar di seluruh wilayah Bali, di mana muslim berada. Mulai dari Denpasar, Negara, sampai Buleleng. Di TPA ini anak-anak tidak hanya belajar Al-Qur'an, tetapi juga menjadi tempat belajar dasar-dasar agama Islam bagi mereka yang orang tuanya kurang memahami Islam secara baik. Munasim seorang marbot Masjid di Pekutatan mengatakan bahwa baginya pendidikan di TPA sangat penting, untuk membantu pembelajaran agama Islam. Pak Munasim juga bersyukur, di Pekutatan, terdapat TPA yang gratis yang membelajarkan agama buat anak-anak.<sup>36</sup> Sementara Ibu Jasmin seorang Ibu yang muallaf di kota Singaraja, mengatakan baginya mendidik agama Islam bagi anak-anak secara mandiri agak susah, tetapi dengan adanya TPA, pendidikan agama Islam anak-anak menjadi lebih mudah, malah terkadang Ibu Jasmin juga belajar dari anaknya.<sup>37</sup> Pentingnya TPA ini juga disebutkan oleh Bapak Sutrisno, Imam Masjid Pemaron Singaraja yang mengatakan bahwa TPA adalah solusi besar bagi muslim Bali untuk pendidikan dasar keislaman.<sup>38</sup>

Selain di TPA, pendidikan keislaman dasar bagi muslim Bali juga dilaksanakan di RA (Raudhatul Athfal). Bapak Imam Taufiq mengatakan bahwa pendidikan awal keislaman muslim kota di Bali banyak yang mempercayakannya ke RA, sehingga RA menjadi maju. Bapak Imam Taufiq menunjuk RA An-Nur yang berada di depan Masjid An-Nur yang merupakan RA yang maju dan eksklusif.<sup>39</sup> Senada dengan Bapak Imam Taufiq, Pak Mulyono mengatakan pendidikan dasar keislaman anaknya semua dilaksanakan di RA. Pak Mulyono percaya bahwa belajar dasar-dasar agama Islam di RA mencukupi dan sekaligus bisa

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Nashar, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Tugas Pribadi, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Munasim, tanggal 22 Februari 2020.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Jasmin, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Taufiq, tanggal 18 Februari 2020

menitipkan anak bagi Ibu-ibu muslim pekerja.<sup>40</sup> RA ini dianggap mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan TPA. Hal ini dapat dipahami bahwa TPA pada umumnya berada di lokasi umum dengan biaya murah, sedangkan RA berlokasi eksklusif dan kebanyakan berada di wilayah kota. Jika diamati dari aspek pembiayaan, TPA berbiaya ringan, sedangkan RA mencapai puluhan juta rupiah, malah menurut bapak Mulyono banyak TK Umum mengutip biaya lebih murah dibandingkan RA. Walaupun demikian RA menjadi tempat pendidikan favorit terutama bagi warga kota, yang (masih) menurut Pak Mulyono, jika orang tua menyerahkan ke TK umum, orang tua akan terbebani dengan belajar agama Islam selepas sekolah, namun jika mereka disekolahkan di RA, mereka tidak terbebani dengan belajar agama Islam, karena di RA, mereka sudah dididik agama Islam secara baik.<sup>41</sup> RA ini tersebar di seluruh Bali yang menurut data Kanwil Kemenag Bali jumlah RA di Bali mencapai 104 unit<sup>42</sup>.

Jika dibandingkan antara TPA dan RA, terdapat perbedaan yang signifikan, di mana TPA adalah tempat belajar yang murah yang diselenggarakan di Musalla dan tersebar secara massif di setiap wilayah keberadaan muslim Bali. Sedangkan RA juga tersebar di wilayah keberadaan muslim, namun pada umumnya mempunyai gedung sendiri, dikelola secara profesional, dengan kurikulum yang rapi. Akibatnya RA mengutip biaya yang agak tinggi. Walaupun demikian kedua institusi ini dipenuhi pelajar yang bermakna sangat dibutuhkan oleh kalangan muslim Bali.

#### **D. Mendidik anak di sekolah Islam.**

Sebagaimana muslim Bali memilih RA sebagai tempat pendidikan awal, demikian juga pendidikan lanjutan, muslim Bali lebih memilih sekolah Islam sebagai tempat pendidikan anak-anak. Muna Muhammad, seorang dosen UIN Ar-Raniry yang sedang menyelesaikan S3 di Universitas Udayana mengatakan sekolah Islam dan madrasah adalah sekolah favorit di Bali. Memilih sekolah Islam bagi orang tua muslim cenderung membuat jiwa menjadi tenang, walaupun terkadang jauh dan mahal.<sup>43</sup> Sesuai pendapat Muna Muhammad, dalam pengamatan, peneliti menemukan fakta bahwa hampir semua sekolah Islam di Bali adalah sekolah maju, misalnya sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Islam, pesantren dan madrasah (MI/MTS/MA). Di sisi lain pada sekolah Islam swasta, kemajuan sebuah sekolah terkadang berjalan seiring dengan biaya sekolah, misalnya ada sekolah Islam swasta di Bali mengutip biaya masuk mencapai dua

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmudi Kasi Penerangan Kemenag Bali pada tanggal 25 Februari 2020.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Muna Muhammad pada tanggal 26 Februari 2020.

puluh juta rupiah ke atas. Hal ini menjadi keluhan bagi sebagian muslim Bali. Pak Imam Taufiq mengatakan biaya pendidikan sekolah Islam menjadi kendala sendiri bagi muslim Bali. Namun yang menjadi suatu keanehan bagi sebagian orang mahal nya biaya tidak menjadi persoalan, dibanding harapan yang digantungkan, misalnya apa yang dilakukan Bapak Mulyono yang mengakui menyekolahkan semua anaknya di sekolah favorit, karena percaya dengan kurikulum umum dan agama Islam yang mereka gunakan. Pendapat Bapak Mulyono ini seirama dengan pendapat Muna Muhammad yang diuraikan di atas.

Hal ini sangat di luar dugaan bagi peneliti, yang sebelumnya mengira bahwa madrasah dan pesantren di Bali kurang diminati, realitasnya adalah pesantren dan semua MI/MTs/MA di Bali adalah sekolah favorit di kalangan muslim. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Drs. H. Noer Yasin, M.PdI, seperti yang dikutip situs Kanwil Kemenag Bali mengatakan saat ini Bali terdapat 55 Pondok Pesantren yang tersebar di Provinsi Bali. Adapun menurut statisti Pesantren, di Bali terdapat 90 pondok pesantren, dengan jumlah santri mencapai di atas 7000 orang,<sup>44</sup> yang di antaranya terdapat beberapa pondok pesantren yang maju, misalnya: 1) Pondok Pesantren Bali Bina Insani yang beralamat di Desa Meliling, Kecamatan Karambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Pesantren yang berdiri di area seluas 5 hektar ini menjadi potret nyata kemajuan pendidikan Islam di Bali. 2) Pondok Pesantren Hidayatullah Putri yang terletak di Denpasar Selatan, Bali. 3) Pondok Raudlatul Huffadz yang terletak di Jl. A. Yani, Gg. Kamboja 1/04, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. Pesantren ini didirikan oleh KH. Noor Hadi, seorang muslim asal Demak, Jawa Tengah memfokuskan pada penghafalan Al-Qur'an disamping ilmu-ilmu agama lainnya.<sup>45</sup> 4) Pondok pesantren Manba'ul 'Ulum, di kelurahan Loloan Timur, Kabupaten Jembrana Bali yang berdiri pada 11 Agustus 1930, dan bernaung di bawah Yayasan Madani Jembrana (Zilfa, 2019, 106).

Selain pesantren, pendidikan anak Muslim di Bali dilaksanakan di madrasah. Pelaksanaan pendidikan di madrasah ini didukung oleh biaya pendidikan madrasah yang murah. Bapak Munasim di Pekutatan menyebutkan bahwa madrasah adalah institusi penting bagi Muslim Bali, dan Ia memilih menyekolahkan anaknya di Madrasah Negeri, yang menurutnya walau biayanya gratis, tetapi kualitas pendidikan yang diberikan tidak diragukan.<sup>46</sup> Peran penting madrasah di Bali, juga disampaikan oleh Ibu Raihan, warga yang

---

<sup>44</sup> Adapun menurut situs dit pontren kemenang, di Bali terdapat 80 pondok pesantren, yang tersebar di seluruh Bali (<https://bali.kemenag.go.id/provinsi/berita/14375/seluruh-santri-pada-55-pondok-pesantren-di-bali-sehat-wal-afiat>). Lihat juga: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>

<sup>45</sup> <https://www.laduni.id/post/read/29601/pesantren-raudlatul-huffadz-bali>

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Munasim, tanggal 22 Februari 2020.

tinggal di sekitar masjid Nurul Huda, Gel-gel, yang mengatakan bahwa madrasah merupakan institusi yang dibutuhkan muslim Bali, dan beliau bersyukur bahwa di Gel-gel terdapat madrasah negeri yang lengkap dari MIN s/d MAN.<sup>47</sup> Pernyataan ini didukung oleh Bapak Adriman, Imam Masjid Taqwa Pekutatan, yang mengatakan di wilayahnya, jika masuk sekolah, mayoritas orang tua memilih madrasah sebagai tempat sekolah anak, kecuali kalau memilih sekolah kejuruan, mereka terpaksa masuk sekolah umum.<sup>48</sup> Kedua mereka sepakat bahwa masyarakat memilih madrasah karena mengharapkan adanya pendidikan agama Islam yang baik bagi anak-anak mereka, selain karena biaya murah. Namun kendala yang dihadapi adalah terkadang terdapat beberapa rumah muslim Bali yang berjauhan dari lokasi madrasah. Dalam situasi ini, terpaksa anak memilih sekolah umum, namun dengan tanggung jawab orang tua untuk membelajarkan agama anak selepas sekolah secara mandiri. Hal semisal ini dilakukan Bapak Abu Adam yang menyekolahkan anak di sekolah umum, namun dia terbebani dengan membelajarkan anak dengan ajaran Islam secara mandiri di rumah.<sup>49</sup>

Jika di kota-kota di Bali terdapat sekolah Islam dan madrasah negeri, di daerah-daerah tertentu muslim Bali juga mendirikan madrasah swasta. Misalnya MIS Ainul Yakin di Gerokgak. Peneliti mengamati di madrasah ini hanya terdapat lima orang guru honor yang dibayar per bulan sebesar Rp.150.000. Madrasah ini agak memprihatinkan karena hanya mempunyai fasilitas sederhana, dan sulit dikembangkan karena persolan biaya. Madrasah tidak mengutip biaya pendidikan dari orang tua, karena madrasah ini berada di wilayah muslim dengan pendapatan rendah.<sup>50</sup> Walaupun demikian madrasah ini mempunyai murid yang mencapai 15 orang per kelas, dan dianggap mempunyai peran penting untuk pendidikan generasi muslim di sekitar lokasi sekolah. Dari beberapa orang murid kelas empat yang diwawancarai, mengatakan ada yang diantar orang tua melebihi tiga kilometer untuk sampai di sekolah ini. Dari kesediaan orang tua mengantar anak untuk belajar ke madrasah di lokasi yang jauh, dapat terlihat semangat keislaman yang ada di dada para orang tua.

Adapun situasi pendidikan Agama Islam di sekolah umum dapat diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahib tentang Pergulatan Pendidikan Agama Islam di Kawasan Minoritas Muslim. Dari beberapa sekolah yang diteliti Abdul Wahib diperoleh keterangan bahwa dalam pembelajaran PAI di sekolah umum di Bali, di beberapa sekolah guru-guru Pendidikan Agama Islam di Bali menghadapi berbagai problema di antaranya: 1) Kurangnya penghargaan kepada guru PAI, misalnya para guru di sekolah/kelas tidak

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Raihan, tanggal 20 Februari 2020.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Adriman, tanggal 22 Februari 2020.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Abu adam, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Aisyah, tanggal 22 Februari 2020

mendapatkan meja kerja sendiri, dianggap seperti tidak ada, tidak pernah mendapat posisi struktural yang berarti. 2) Tidak ada tempat mengajar yang memadai untuk belajar di waktu tambahan (di luar jam belajar) karena tidak ada musalla. 3) Tidak ada jeda waktu belajar di waktu shalat jumat (Wahib, 2011, 478). Contoh problematika yang disebutkan Wahib, tidak menjadi problematika di sekolah Islam, karena Sekolah Islam dipimpin oleh orang Islam sendiri, sehingga pembelajaran Agama Islam tidak terkendala dan dapat berjalan secara maksimal.

Situasi pembelajaran Agama Islam yang lebih kondusif, tentu memberi pengaruh kepada hasil belajar Agama Islam yang lebih baik, sesuai harapan orang tua peserta didik.

### **III. Strategi Pelaksanaan Pendidikan NonFormal Keislaman dalam Lingkungan Sosial Muslim Bali.**

Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita, baik secara langsung maupun tidak langsung (Purwanto, 2009, 73). Secara lebih luas lingkungan sosial dipahami sebagai tempat atau suasana dimana sekelompok orang merasa sebagai anggotanya, seperti lingkungan kerja, lingkungan RT, lingkungan pendidikan, lingkungan pesantren, dan sebagainya (Setiadi dan Kolip, 2011, 181). Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya lingkungan sosial adalah lingkungan di mana seorang manusia berada dan dia merasa menjadi bagian dari lingkungan tersebut yang saling pengaruh mempengaruhi. Dari itu pula dapat dipahami yang dimaksud dengan lingkungan sosial muslim Bali adalah lingkungan kehidupan para muslim yang berada di Pulau Bali, yang terikat karena adanya suatu keyakinan beragama yang sama. Akibat dari mempunyai keyakinan yang sama, mereka mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta secara bersama membina diri dan masyarakat berdasarkan keyakinannya. Di sisi lain, pada saat yang sama para muslim Bali juga menjadi warga lingkungan sosial masyarakat dari wilayah kehidupan yang sama, walaupun tidak mempunyai keyakinan yang sama. Jadi di satu sisi mereka menjadi masyarakat muslim dan di sisi lain mereka menjadi masyarakat lingkungan lokasi kehidupan. Dengan asumsi bahwa masyarakat dan lingkungannya saling pengaruh mempengaruhi, maka masyarakat muslim Bali dapat dipengaruhi oleh lingkungan muslim dan dapat juga dipengaruhi oleh masyarakat mayoritas dalam lingkungan hidupnya. Untuk menjaga konsistensi agar keyakinan muslim tetap berlanjut, maka para muslim Bali senantiasa membina lingkungan sosial muslimnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas keislamannya. Inilah motivasi utama masyarakat muslim untuk senantiasa mengikat kesatuan yang utuh sesama muslim.

Salah satu cara membina kekuatan sosial masyarakat muslim dilaksanakan melalui pendidikan non formal/informal yang berlangsung secara konsisiten, yang pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa kelompok sesuai tingkat usia mereka, misalnya kelompok pria, kelompok remaja dan kelompok wanita melalui kajian keagamaan dengan beberapa cara. Selain itu juga terdapat pendidikan keislaman yang dilakukan secara khusus oleh para penyuluh KUA untuk para mualaf, dan untuk para pengantin yang baru menikah.

Secara lebih terperinci, pendidikan keislaman non-formal yang dilakukan dalam komunitas masyarakat muslim Bali adalah:

#### **A. Memperkuat peran tempat ibadah, yaitu Masjid dan Musalla di lingkungan Muslim**

Di Provinsi Bali, saat ini terdapat lebih dari 80 masjid yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Bali, dengan 20 masjid di antaranya berada di Kota Denpasar.<sup>51</sup> Fungsi utama masjid atau musalla adalah sebagai tempat ibadah. Karena itu masjid dan musalla yang ada di Bali senantiasa semarak ketika waktu shalat jamaah. Peneliti menemukan realitas ini di semua masjid yang peneliti kunjungi, misalnya Masjid Al-Muhajirin Kepaon, Masjid An-Nur Denpasar, Masjid Taqwa Pekutatan, Masjid Raya Kota Negara, Masjid al-Ikhlas Buleleng, Masjid Nurul Huda Desa Muslim Gel-gel dan juga Masjid Nurul Huda Pamaron, Buleleng. Bapak Sutrisno, Imam Masjid Nurul Huda Pamaron mengatakan jamaah masjid Nurul Huda selalu banyak, walaupun sebenarnya masjid ini berada dalam lingkungan masyarakat majemuk. Para jamaah masjid banyak yang datang dari lokasi yang berjauhan dengan kesadaran sendiri, dan para jamaah tetap, terkadang telah menjadi saudara. Satu keuntungan dari masjid ini adalah lokasinya yang strategis di persimpangan jalan besar Buleleng. Lebih lanjut Bapak Sutrisno mengatakan bahwa di masjid ini tidak diadakan pengajian rutin, karena pengajian telah diadakan secara rutin dalam lingkungan masing-masing. Pengajian agama di masjid ini hanya dilakukan ketika peringatan hari besar Islam, Ibadah Ramadhan dan khutbah jumat.<sup>52</sup>

Di tempat lainnya Bapak Ahmad Jauhari, Imam Masjid Al-Muhajirin Kepaon mengatakan kegiatan utama yang dilakukan masjid Kepaon adalah pelaksanaan shalat jamaah. Masjid al-Muhajirin Kepaon ini merupakan salah satu masjid tertua di Denpasar. Walaupun lokasi masjid ini dianggap berada dalam lingkungan muslim, tetapi banyak juga warga non-Muslim yang berada dalam lingkungan masjid ini, toleransi antar umat beragama

---

<sup>51</sup>(<https://www.balitoursclub.net/alamat-masjid-dan-musholla-di-bali/>)

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno 24 Februari 2020.

dalam lingkungan ini berlangsung secara baik.<sup>53</sup> Di Masjid ini azan dilakukan dengan menggunakan pengeras suara ke luar masjid. Walaupun sebenarnya lokasi masjid tidak terlalu strategis, tetapi jamaah masjid Kepaon selalu ramai. Bapak Ahmad Jauhari mengatakan ramainya jamaah masjid di sini, mungkin karena mereka terdorong oleh iman dan rasa ingin membedakan diri dengan “mereka”. Kuatnya jamaah masjid juga berimbas kepada banyak dana yang mampu dikumpulkan masjid untuk kegiatan masjid, sehingga masjid terlihat rapi, bersih dan mampu memberi kenyamanan kepada jamaah.

Selain pelaksanaan shalat jamaah, Masjid Al-Muhajirin Kepaon juga rutin menyelenggarakan kajian agama Islam, yaitu setiap hari sabtu malam. Materi yang disampaikan diserahkan kepada pemateri dengan titik berat kepada ilmu Akidah, Syariah dan Akhlak. Kegiatan lain yang juga semarak dilakukan adalah “pejuang subuh” yang diakhiri dengan pengajian Islam.<sup>54</sup> Namun untuk pengajian, mereka tidak menggunakan pengeras suara ke luar. Selain itu di Masjid Kepaon juga mengadakan TPA untuk anak-anak, yang diadakan pada setiap sore hari. Hal yang paling menarik dari kegiatan muslim di Masjid ini terjadi di Bulan Ramadhan, di mana selain kegiatan pengajian juga diadakan acara khusus *Megibung* merupakan bentuk akulturasi budaya. *Megibung* dilaksanakan setiap tanggal 10, 20, dan 30 Ramadhan, sebagai perayaan khataman Al-Qur’an.<sup>55</sup>

Masjid An-Nur kota Denpasar adalah salah satu masjid yang berada di lokasi strategis kota Denpasar, tepatnya berlokasi di Jl. Diponegoro 167, Denpasar. Pelaksanaan shalat jamaah di masjid ini dilakukan secara rutin tanpa halangan dengan mengumandangkan azan dengan pengeras suara. Ketika berada di Masjid ini, peneliti melihat bahwa jamaah shalat mencapai lebih dari enam shaf. Banyaknya jamaah membuat jalan di depan masjid menjadi lokasi parkir. Bapak Imam Taufiq, seorang jamaah mengatakan, shalat jamaah di masjid ini selalu ramai, walaupun sebenarnya masjid ini berada dalam lingkungan majmuk. Selain melaksanakan shalat jamaah, masjid ini juga mengadakan kajian keislaman secara rutin, di malam jumat, setelah maghrib. Selain itu kajian agama juga dilakukan di dalam bulan Ramadhan. Menurut Bapak Imam Taufiq, masjid ini tidak menyelenggarakan TPA, karena di depan masjid telah disediakan RA An-Nur.<sup>56</sup>

Masjid lain yang peneliti kunjungi adalah Masjid Jamik Singaraja. Masjid ini adalah masjid besar yang berukuran sekitar 30 x 30 meter, dan merupakan masjid terbesar di Kabupaten Buleleng. Masjid Jamik Singaraja masjid bersejarah yang terletak di Jalan Imam

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Jauhari, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Jauhari, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>55</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4042370/megibung-tradisi-bukber-ala-muslim-kepaon-bali>

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Taufiq, tanggal 18 Februari 2020.

Bonjol, kelurahan Kampung Kajian, Buleleng. Menurut riwayat, masjid ini didirikan pada tahun 1654 M (Wikipedia).

Jamaah shalat wajib di masjid ini selalu ramai. Ketika peneliti ikut shalat dhuhur, peneliti mengamati jamaah masjid mencapai lebih dari empat shaf. Setelah shalat peneliti bertemu dengan beberapa anak muda yang sedang mengadakan kajian keislaman. Ahmad (salah seorang di antara mereka) mengatakan bahwa “kami sering mengadakan kajian terutama setelah shalat dhuhur”.<sup>57</sup> Tak lama kemudian datang seorang ustadz yang memberi kajian. Ustadz yang membimbing mereka bukan penduduk asli Bali tetapi berasal dari Lampung. Peneliti mengamati bahwa pengajian yang dilakukan mirip kegiatan Jamaah Tabligh.

Selain pengajian yang diadakan remaja di atas, masjid ini secara resmi juga mengadakan pengajian yang dikelola masjid. Adapun kegiatan pengajian anak-anak, dilaksanakan secara resmi melalui Madrasah Diniyah Awaliyah, yang berdiri megah di depan masjid.

Masjid lain yang menjadi lokasi pengamatan peneliti adalah Masjid Nurul Huda, yang berlokasi di Desa Gel-gel, Kabupaten Klungkung. Masjid ini awalnya dibangun pada abad 13, dan merupakan awal mula jejak masuknya Islam di Bali. Setelah direnovasi beberapa kali, masjid tertua di Bali ini kini tampak terlihat megah dan modern. Meskipun begitu, nuansa warisan masa lalu masih dapat ditemukan di bagian menara yang menjulang tinggi dan ukiran pada pintu yang berbahan dasar kayu.<sup>58</sup> Peneliti melaksanakan shalat jamaah dhuhur di masjid ini, dengan jamaah yang hampir memenuhi masjid. Hal ini dapat dipahami karena masjid ini berlokasi di desa Islam Klungkung. Walaupun demikian di seberang jalan menuju masjid ini berdiri megah Pura Ibadah Umat Hindu, tanda toleransi antar umat beragama di kampung Gel-gel. Di masjid ini terdapat unit Remaja Masjid yang sering melakukan kajian keislaman. Selain mengadakan pengajian Remaja Masjid disini juga aktif dalam kegiatan kesenian Islam misalnya Hadrah yang pernah mereka tampilkan pada acara pembukaan STQ Provinsi Bali tahun 2015.<sup>59</sup>

Situasi yang sama juga terjadi di masjid lain yang terdapat di Propinsi Bali, di mana para muslim Bali secara aktif menjadikan masjid sebagai basis ajaran keislaman, sehingga syiar Islam terus hidup dan semarak, dengan tetap mengedepankan toleransi. Yang paling menarik dari semaraknya syiar di masjid-masjid di Bali adalah kumadang Azan yang

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ahmad, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>58</sup> <https://pesona.travel/keajaiban/4948/masjid-nurul-huda-kampung-gelgel-masjid-tertua-di-bali>

<sup>59</sup> <https://kampunggelgel.desa.id/index.php/first/artikel/138>

dilakukan secara bebas dengan menggunakan pengeras suara, yang menyebabkan kita pendatang tidak dapat membedakan antara provinsi Bali dengan provinsi lain di Indonesia. Semua pengurus masjid yang diwawancarai mengatakan tidak ada masalah besar yang dihadapi kaum muslim Bali dengan penggunaan pengeras suara di masjid, namun muslim Bali mesti menjunjung toleransi untuk menjaga harmoni, misalnya ketika hari raya Nyepi, maka pengeras suara tidak digunakan, untuk menghormati umat Hindu Bali.

### **B. Pelaksanaan Pengajian Mingguan**

Pelaksanaan pengajian ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu: 1). pengajian rutin yang dilakukan di masjid. 2) Pengajian berbentuk arisan dari rumah ke rumah. Pengajian rutin di masjid dan musalla dilaksanakan di masjid-masjid yang tersebar di wilayah kota-kota di Bali, seperti telah diutarakan dalam kegiatan penguatan kegiatan di masjid. Namun demikian beberapa nara sumber yang peneliti temui mengatakan bahwa tidak semua masjid melaksanakan pengajian rutin di Masjid. Bapak Soetrisno, Imam Masjid Nurul Huda Pamaran mengatakan pengajian rutin untuk Bapak-bapak tidak dilaksanakan di Masjid, tetapi dilaksanakan setiap minggu dengan cara berpindah dari rumah ke rumah dari anggota pengajian.<sup>60</sup> Cara menentukan rumah dilakukan dengan cara kesepakatan atau juga dengan cara undian di lokasi pengajian terakhir. Bapak Adriman, Imam Masjid Taqwa Pekutatan mengatakan bahwa pengajian agama Islam Bapak-bapak tidak dilaksanakan di masjid, tetapi dilaksanakan setiap malam jumat dengan cara berpindah dari rumah-ke rumah.<sup>61</sup> Ketika peneliti bertanya, mengapa pengajian tidak dilakukan di masjid saja, Bapak Adriman mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan di antara Jemaah, pengajian dilakukan secara berpindah. Menurut Bapak Adriman dengan cara ini kita akan mengetahui lokasi dan kondisi rumah saudara kita muslim, sehingga kita tahu yang mana dari anggota yang perlu mendapat perhatian yang lebih dari Jemaah yang lain. Di lokasi lain, di Denpasar Bapak Mulyono, menyebutkan bahwa pengajian agama Islam untuk orang dewasa di sekitar wilayahnya dilaksanakan melalui komunitas Islam yang dilakukan secara berpindah dari rumah. Dengan cara ini ukhuwah akan terjalin seara lebih erat, melalui saling berkunjung.<sup>62</sup> Banyaknya kegiatan pengajian dari rumah ke rumah bagi Bapak-bapak, dipekuat oleh Bapak Eko Tugas Pribadi dari MUI Bali yang mengatakan bahwa di Bali pengajian banyak yang dilakukan secara arisan dari rumah ke rumah. Menurut Bapak Eko kegiatan Islam seperti ini sudah menjadi kebiasaan awal muslim Bali, sejak sebelum masjid dan musalla dibangun di banyak

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Adriman, tanggal 22 Februari 2020.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono, tanggal 26 Februari 2020.

tempat di Bali. Namun meskipun setelah pembangunan banyak masjid dan musalla di berbagai tempat, kegiatan pengajian dari rumah ke rumah terus berlanjut, walaupun terkadang ada juga pengajian yang dilakukan di masjid.<sup>63</sup> Adapun isi pengajian yang disampaikan adalah sekitar belajar Al-Qur'an, Aqidah, Ibadah, tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga, kehidupan sosial dan hal-hal lain yang dibutuhkan.<sup>64</sup>

Dari kegiatan pengajian yang dilakukan melalui komunitas dan dari rumah ke rumah diperoleh beberapa kelebihan tersendiri, selain dari penambahan ilmu keislaman itu sendiri, pengajian model ini juga dapat: 1) Menimbulkan semangat untuk memperkuat ukhuwah sesama muslim dengan kegiatan saling mengunjungi Jemaah. 2) Mendata lokasi tinggal warga muslim, sehingga semua jamaah mengetahui yang mana rumah orang Islam di lingkungan kehidupan majemuk (Beragama). 3) Menyadarkan anggota jamaah dan keluarga bahwa mereka adalah bagian dari komunitas Islam yang berada dalam lingkungan terbatas. 4) Saling memahami kondisi anggota Jemaah. 5) Memberi kesempatan kepada semua anggota komunitas muslim untuk menjamu anggota komunitas muslim lain.

### **C. Majelis Ta'lim Ibu-ibu dalam Bentuk Arisan**

Pada dasarnya pengajian keislaman kaum ibu juga terbagi dua, yaitu dilaksanakan di dua tempat. Ada masjid yang melaksanakan kegiatan pengajian Ibu-ibu seperti pengajian yang dilaksanakan Ibu-ibu setiap Sabtu sore di masjid Al-Muhajirin Kapaon. Pada banyak tempat lainnya pengajian Ibu-ibu dilakukan secara arisan dari rumah ke rumah Jemaah Muslimah. Ibu Siti Aisyah, guru MI Ainul Yakin mengatakan, di wilayah desa Sumber Kelampok, Gerokgak, pengajian Ibu-ibu dilakukan secara berjamaah dengan cara arisan dari satu rumah ke rumah lain, sesuai kesepakatan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Raihan di Desa Gel-gel, kab. Klungkung yang mengatakan bahwa di wilayah desanya, walaupun berdiri masjid besar yaitu masjid Nurul Huda, pengajian kaum Ibu tetap dilaksanakan dari rumah ke rumah secara arisan. Sistem ini digemari Ibu-ibu di wilayahnya.<sup>65</sup> Selain dua nara sumber yang disebutkan di atas, banyak narasumber lain yang peneliti temui, misalnya Nyonya Mulyono, Nyonya Abu Adam, Ibu Syarifah dan Ibu Kamilah dan lain-lain, semua memperkuat kenyataan bahwa pengajian agama Islam untuk Ibu-ibu di Bali dilaksanakan dari rumah ke rumah. Adapun isi pengajian yang disampaikan, isinya hampir sama dengan pengajian bapak-bapak yaitu berkisar antara belajar Al-Qur'an, Akidah, Ibadah, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dan hal-hal lain yang dibutuhkan.<sup>66</sup> Mengenai

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Tugas Pribadi, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Jauhari, tanggal 19 Februari 2020.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Raihan, tanggal 20 Februari 2020.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Kamilah, tanggal 20 Februari 2020.

materi belajar yang diangkat dalam pengajian adalah: 1) Memperkuat keimanan dan dakwah – bagi perempuan Islam perlu menjaga agar sebisa mungkin untuk berhubungan dengan pria Islam agar tetap beriman Islam. 2) Memperkuat ukhuwah dengan sesama muslim. 3) Menjaga susila untuk bertahan dari pergaulan bebas. 4) Memperkuat pengetahuan tentang makanan halal dan haram dan ketahanan diri dari makanan non-Islam. 5) Menjaga ukhuwah wathaniah dengan non-Muslim. 5) Menjauhi narkoba, dan lain-lain.

#### **D. Penyuluhan agama Islam oleh penyuluh KUA.**

Secara lebih khas pengajian agama Islam, secara non formal di Bali juga dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam yang dikoordinir oleh 31 KUA yang tersebar di seluruh Pulau Bali. Salah satu tugas utama KUA adalah melaksanakan pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Karena umat Islam di Bali tidak merata berada di semua kecamatan, maka kantor KUA juga tidak berada secara merata di semua kecamatan di Bali, terkadang hanya ada tiga KUA dalam satu Kabupaten.<sup>67</sup>

Menurut Bapak Mahmudi, Kabid Penais Kanwil Kemenag Bali, di Bali terdapat 325 penyuluh Agama Islam, dengan 15 orang berstatus PNS dan 310 orang berstatus non-PNS. Selain bertugas sebagai pencatatan pernikahan, KUA juga berfungsi sebagai ujung tombak pembelajaran keislaman dan dakwah di Bali, dengan beberapa agenda yang mereka lakukan yaitu: 1) Membantu kegiatan-kegiatan majlis ta'lim ibu-ibu, dimana setiap penyuluh diberi tugas untuk membantu dua majlis ta'lim. 2) Pembinaan ekonomi ummat. 3) Pembinaan mualaf. 4) Pengajian agama Islam.<sup>68</sup> Secara umum kegiatan para penyuluh Agama Islam dari KUA ini menurut Bapak Mahmudi, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, karena mereka juga membutuhkan bimbingan dalam agama Islam, namun peneliti tidak mendalami kegiatan penyuluh KUA ini secara langsung.

#### **IV. Persoalan Realistik yang Dihadapi Masyarakat Muslim Bali dalam Pelaksanaan Pendidikan Keislaman**

Muslim Bali adalah kaum minoritas, dibandingkan dengan warga Bali yang beragama Hindu. Secara umum, biasanya kehidupan kaum minoritas, terutama minoritas muslim berada dalam situasi yang tertekan. Hal ini ditemukan dalam banyak minoritas muslim seperti muslim Kashmir di India, muslim Uigur di China, muslim Patani di Thailand, muslim Rohingya di Myanmar, muslim Mindanao di Philipina dan lain-lain. Bagaimana

---

<sup>67</sup> Data lengkap KUA adalah: Kab. Buleleng enam KUA, Kab. Jembrana lima KUA, Kab. Tabanan enam KUA, Kab. Badung tiga KUA, Kab. Gianyar dua KUA. Kab. Bangli, dua KUA, Kab. Klungkung tiga KUA, Kab. Karang Asem empat KUA, Kodya Denpasar, empat KUA. (<https://bali.kemenag.go.id/provinsi/artikel/daftar-nama-kepala-kua>).

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmudi, tanggal 25 Februari 2020.

situasi muslim Bali yang juga berada sebagai kaum minoritas? Dari pengamatan yang peneliti lakukan terlihat bahwa secara umum kehidupan kaum muslim Bali berada dalam kehidupan yang nyaman. Namun walaupun demikian situasi nyaman dapat saja berubah karena berbagai situasi yang terjadi secara faktual. Menurut Pak Mulyono, setelah terjadi Bom Bali, kehidupan muslim sangat tertekan, karena perilaku Amrozi dkk, membuat kaum Hindu Bali murka kepada Muslim secara keseluruhan, yang membuat kehidupan muslim Bali menjadi tertekan. Padahal, muslim Bali juga sangat benci kepada kekerasan antar umat beragama, walau dilakukan oleh siapapun.<sup>69</sup> Tetapi yang perlu disyukuri kemudian pelan tapi pasti keadaan berlangsung kembali menjadi nyaman.

Walaupun kehidupan umum muslim Bali terlihat nyaman, namun sebenarnya muslim Bali menghadapi beberapa situasi yang dalam waktu tertentu dapat menjadi persoalan serius dan keluar dari situasi nyaman. Dalam wawancara dengan para nara sumber, peneliti mengakumulasi beberapa hal yang dapat menjadi ancaman, jika tidak disikapi secara arif dan cerdas. Beberapa problematika tersebut adalah:

#### **A. RUU Bali**

Dewasa ini anggota DPR RI sedang menggodok RUU Bali, yang membahas tentang provinsi Bali dan kelebihan-kelebihannya. Gubernur Koster ketika mengantarkan RUU kepada Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa materi dan sistematika RUU Provinsi Bali terdiri dari 12 Bab dan 39 Pasal yaitu : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah; Bab IV Pola dan Haluan Pembangunan Bali; Bab V Pendekatan Pembangunan Bali; Bab VI Bidang Prioritas Pembangunan Bali; Bab VII Pembangunan Bali Secara Tematik; Bab VIII Pembangunan Perekonomian dan Industri; Bab IX Kewenangan Pemerintahan Provinsi Bali; Bab X Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bali; Bab XI Pendanaan, dan Bab XII Ketentuan Penutup.<sup>70</sup>

Menurut Bapak Eko Tugas Pribadi, dalam beberapa bagian dari RUU Bali tersebut jika tidak dicermati dan tidak didialogkan secara baik, akan dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan dan eksistensi warga muslim di Bali.<sup>71</sup> Namun untuk menelaah lebih lanjut tentang RUU ini, peneliti belum menemukan naskah lengkap tentang RUU Bali ini yang dapat memperjelas bukti masalah dan menganalisisnya.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono, tanggal 26 Februari 2020.

<sup>70</sup> <http://koranjuri.com/gubernur-paparkan-materi-ruu-provinsi-bali-ke-pemerintah-pusat/>

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Tugas Pribadi, tanggal 18 Februari 2020.

## **B. Kesulitan mendapat izin untuk pembangunan tempat ibadah**

Persoalan kedua yang dihadapi oleh muslim Bali adalah, jika terdapat suatu komunitas baru muslim di suatu lokasi tertentu, maka mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan memperoleh izin pembangunan tempat ibadah baru.

Bapak Sotrisno, Imam Masjid Nurul Huda Singaraja mengatakan “pembangunan masjid Nurul Huda Singaraja pada awalnya sulit memperoleh izin, namun kemudian melalui perjuangan berat dari tokoh Islam setempat, pemerintah daerah mengeluarkan izin. Setelah adanya izin pembangunan tidak bermakna pelaksanaan kegiatan Islam akan berlangsung secara baik, karena walaupun pembangunan masjid telah memperoleh izin, tetapi masyarakat Hindu setempat masih merasa curiga dengan kegiatan umat Islam. Kecurigaan mereka semakin memuncak setelah peristiwa “Bom Bali”, yang membuat umat Islam Bali secara umum menjadi terpidana di depan masyarakat Hindu Bali.<sup>72</sup> Abdullah, seorang jama’ah Masjid Al-Ikhlas, sekitar wilayah Lovina, Singaraja, mengatakan bahwa saat ini masjid ini sudah dapat melaksanakan kegiatan secara baik, namun kita mesti tetap dalam keadaan hati-hati, untuk dapat terus membina kepercayaan warga non-muslim sekitar, yang pernah curiga kepada Masjid Al-Ikhlas.<sup>73</sup>

Persoalan ini tidak dihadapi oleh warga muslim yang berada di kampung-kampung Islam Bali yang disebutkan di atas, karena awal pembangunan tidak diprotes oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan menjadi mulus.

Sebenarnya kesulitan mendapatkan izin pembangunan tempat ibadah, tidak hanya dihadapi muslim Bali. Masalah ini juga menjadi persoalan bagi masyarakat non-Islam yang ingin membangun tempat ibadah di lingkungan masyarakat Islam. Peristiwa protesnya masyarakat dalam kasus seperti ini banyak terjadi, misalnya penolakan pembangunan Pura di Bekasi,<sup>74</sup> penolakan pembangunan gereja Katolik Santo Yoseph di Kabupaten Karimun,<sup>75</sup> Kepulauan Riau, penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari, Semarang,<sup>76</sup> dll. Penolakan seperti ini malah juga terjadi secara internal Islam sendiri, seperti penolakan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno 24 Februari 2020.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah 24 Februari 2020.

<sup>74</sup> <https://metrobalibali.com/psi-bali-kecam-penolakan-pembangunan-pura-di-bekasi/>

<sup>75</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/02/16/15010091/fakta-penolakan-pembangunan-gereja-santo-joseph-di-karimun-jokowi--tindak>

<sup>76</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200308015143-20-481438/warga-protes-imb-gereja-tlogosari-lbh-sebut-intoleran>

pembangunan masjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli, Bireun, Aceh<sup>77</sup> dan penolakan pembangunan Masjid Muhammadiyah di Samalanga (Bireuen).<sup>78</sup>

Dalam kasus seperti ini panitia pembangun mesti melakukan secara bijak, melalui dialog dan membina kesepahaman secara baik. Jika tidak dilakukan dialog secara baik, maka akan dapat memicu kegelisahan dan bahkan dapat menimbulkan kerusuhan antar kelompok. Secara lebih khusus di Bali, menurut beberapa nara sumber, seperti Bapak Eko Tugas Pribadi, Bapak Soetrisno, dan Bapak Mulyono, mempunyai pendapat yang sama, bahwa umat Islam Bali sangat menjaga suasana ini untuk menghindari gejolak dalam masyarakat.

### C. Penolakan Kegiatan dan Simbol Islam

Persoalan lain yang pernah dihadapi oleh muslim Bali adalah adanya kelompok masyarakat Bali yang menolak kegiatan dan simbol-simbol Islam. Persoalan ini misalnya pernah terjadi, ketika sekelompok massa berdemonstrasi di depan kantor PT Jasamarga Bali Tol (JBT) menjelang Idul Fitri 1435 H/2015 M, di mana massa dari Aliansi Hindu Bali terdiri atas Cakrawahyu, Yayasan Satu Hati Ngrestiti Bali, Yayasan Hindu Nusantara, dan Pusat Koordinasi Hindu Nusantara itu memprotes penggunaan kerudung dan peci hitam bagi karyawan dan karyawan pada sejumlah perusahaan untuk menyambut Lebaran.

Selain terhadap perusahaan ini, kasus protes yang sama juga dilakukan terhadap beberapa perusahaan lain, misalnya: Hypermart, Smartfren, Hoka-Hoka Bento, dan Taman Nusa. Kasus serupa juga pernah terjadi dalam pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Bali. Termasuk, di sekolah unggulan kelas SMAN 2 Denpasar. Secara khusus untuk kasus jilbab di sekolah menjadi legal dengan terbitnya Permendikbud 45/2014 yang melegalisasi jilbab pelajar membuat sekolah-sekolah tersebut mau menerima siswi berjilbab.

Kasus lain yang juga menarik disimak adalah adanya segelintir masyarakat Bali yang mempersoalkan adanya bank Syariah di Bali. Pada 7 Agustus 2014 ratusan pemuda Bali menggelar aksi di depan kantor Bank Indonesia (BI) Bali di Denpasar. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan untuk menolak pendirian bank syariah di Pulau Seribu Pura.<sup>79</sup>

Namun sekarang, penolakan terhadap simbol-simbol Islam, tidak lagi terdengar, dan di Bali, kini ditemukan simbol-simbol Islam secara massif, mulai dari pakaian Islami, Bank Syariah, Hotel Syariah dan Halal Food. Walaupun demikian, masyarakat Islam Bali yang berada di wilayah-wilayah minoritas muslim, senantiasa tetap waspada dan menjaga agar pemicu

---

<sup>77</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018183000-12-249287/tak-sesuai-aswaja-fondasi-masjid-muhammadiyah-aceh-dibakar>

<sup>78</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/07/02/pb8fo5377-pembangunan-masjid-attaqwa-sudah-enam-kali-dihentikan>

<sup>79</sup> <https://republika.co.id/berita/koran/publik/14/08/29/nb1xwa32-penolakan-simbol-islam-di-bali>

kasus-kasus diskriminatif diminimalisir secara maksimal, sehingga muslim tidak dianggap sebagai sumber masalah bagi masyarakat Bali secara umum.<sup>80</sup>

#### **D. Mualaf dan Pembinaannya**

Secara umum tidak terdapat data yang akurat tentang berapa banyak terjadinya perpindahan agama dalam masyarakat Bali. Hal ini dapat disadari bahwa walaupun setiap warga diberi kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan, namun persoalan perpindahan agama masih menjadi persoalan yang riskan untuk dibicarakan secara terbuka yang dapat menjadi masalah dalam masyarakat. Selain itu persoalan agama adalah persoalan yang bersifat pribadi, yang bagi kebanyakan warga merasa tidak perlu untuk diketahui umum. Hal inilah yang terjadi dalam masyarakat Bali. Namun demikian dalam beberapa wawancara dengan narasumber, peneliti memperoleh data bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua pola perpindahan agama warga Hindu Bali menjadi penganut Islam. Pardi seorang pengurus masjid Nurul Huda Pamaron Singaraja, mengakui bahwa dia menikahi seorang perempuan yang pada awalnya merupakan seorang gadis dari tokoh agama Hindu Bali, yang kemudian berpindah agama menjadi penganut Islam.<sup>81</sup> Yasmin (Istri pak Pardi) sejak menjadi mualaf dikeluarkan dari keluarga, dan menjalani hidup sendiri. Namun setelah mualaf, ia senantiasa secara konsisten mempelajari agama Islam sehingga menjadi muslimah yang baik. Perpindahan agama menjadi penganut Islam melalui pernikahan, tidak hanya dilakukan oleh istri Bapak Pardi saja, namun menjadi satu model perpindahan agama di kalangan warga Bali. Tidak hanya di kalangan perempuan, perpindahan agama juga terjadi di kalangan lelaki Hindu, yang menjadi muslim karena menikah dengan seorang Muslimah. Namun yang menjadi masalah di kalangan rakyat kelas bawah adalah perpindahan agama tersebut tidak diiringi dengan penambahan ilmu agama Islam secara baik, sehingga perubahan agama tersebut hanya perubahan KTP saja. Pada dasarnya menurut Bapak Mahmudi – Kasi Penais Kantor Wilayah Kementerian Agama Bali – tugas pembinaan mualaf di Bali ditanganmi oleh penyuluh Agama Islam KUA Bali, namun yang menjadi masalah adalah, pada umumnya para penyuluh tidak mendapat laporan yang baik tentang adanya mualaf di wilayah kerjanya, sehingga mereka menjadi luput dari perhatian.

Yang lebih miris lagi dari mualaf model pernikahan ini adalah terdapat perempuan mualaf yang setelah beberapa lama menikah ditelantarkan oleh suaminya yang muslim. Biasanya para muslimah mualaf tidak lagi diakui oleh keluarga besarnya. Jadi jika suami menelantarkannya, mereka menjadi tidak lagi punya tempat berpijak. Menurut Ibu Yasmin,

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmudi, tanggal 25 Februari 2020.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Pardi 24 Februari 2020.

kasus seperti terkadang terjadi dalam masyarakat Bali, dan biasanya si istri kembali ke Agama Hindu dan diterima Kembali oleh keluarga besarnya.<sup>82</sup> Sementara pusat keislaman juga belum mampu menanggung mereka. Agaknya persoalan ini perlu mendapat perhatian para tokoh dan organisasi Islam, tidak hanya di Bali tetapi juga para tokoh di luar Bali.

Selain melalui pola perkawinan, mualaf juga sering terjadi di Bali secara sukarela. Mualaf secara sukarela terjadi di berbagai tempat di Bali, akibat dari hasil dakwah dan petunjuk yang diperoleh secara mandiri dari membaca buku dan perhatian terhadap ceramah dan sistem hidup ummat Islam. Contoh para mualaf Bali seperti ini adalah Dewa Gede bermula saat ia masih duduk di bangku SMA. Ketika itu ia kerap menonton ceramah-ceramah agama Islam dari ulama kondang semacam Almarhum KH. Zainuddin MZ, Almarhum KH. Muhammad Arifin Ilham, dan lainnya,<sup>83</sup> Wayan Indah Haris, yang menjadi mualaf setelah mendengar ceramah Zakir Naik,<sup>84</sup> Dewa Putu Sutrisna yang menjadi mualaf setelah membaca buku dan bersahabat dengan banyak orang Islam.<sup>85</sup> Kelompok mualaf model ini biasanya mempunyai keyakinan yang lebih kuat, dan sulit untuk kembali ke agama asal.

Mualaf di manapun (tidak hanya di Bali) seringkali menghadapi dua masalah, yaitu pendidikan agama Islam yang tidak berlanjut secara konsisten dan masalah kehidupan yang tidak pasti ketika berpindah agama. Di atas telah ditunjukkan contoh tentang perempuan mualaf yang ditelantarkan oleh suami, yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai tempat bergantung secara material, yang mengakibatkan mereka kembali ke agama asal yang kehidupan “dunianya” lebih nyaman secara material.

#### **E. Orang Islam di Bali yang berperilaku tidak Islami**

Bali adalah daerah bebas. Siapapun boleh melakukan apapun asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan adat istiadat Bali. Jika di daerah mayoritas Islam, adat dan budaya berkaitan erat dengan agama Islam, maka di Bali, adat dan budayanya mempunyai kaitan yang erat dengan agama Hindu. Jadi tidak mengherankan jika di Bali, kita menemukan pergaulan yang sedikit bebas, tukang pijat yang bebas, banyak orang berpakaian minim (menurut ukuran Islam), mentato badan, penjual minuman keras dan warung nasi babi panggang. Hal ini bukan persoalan bagi masyarakat Bali yang Hindu, namun tentu menjadi hal persoalan bagi masyarakat muslim. Untuk menghindari hal ini, maka para muslim mendidik dan mempersiapkan anaknya untuk mengenal hal yang halal dan yang

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Yasmin 24 Februari 2020.

<sup>83</sup> <https://muslim.okezone.com/read/2019/09/16/614/2105576/kisah-mualaf-pria-bali-masuk-islam-usai-dengar-ceramah-zainuddin-mz-arifin-ilham>

<sup>84</sup> <https://bali.tribunnews.com/2017/04/10/wayan-indah-harris-langsung-jadi-muallaf-saat-dengar-ceramah-zakir-naik>

<sup>85</sup> <http://muallafdundunia.blogspot.com/2018/04/kisah-dewa-putu-mualaf-hindu-yang.html>

haram menurut Islam. Namun demikian dari sekian banyak muslim yang ada di Bali, menurut Bapak Eko Tugas Pribadi, kita masih menemukan muslim yang berperilaku bertentangan dengan ajaran Islam, terutama di kalangan anak muda.<sup>86</sup> Bahkan dari beberapa kasus kriminal yang terungkap di Bali, masih banyak pelakunya adalah para muslim. Misalnya Agus dan Wahyudi yang terlibat narkoba.<sup>87</sup> Bahkan Rusdi menjadi bos pengedar narkoba dari penjara Krobogan, Denpasar.<sup>88</sup> Dalam kasus pencurian, di Bali banyak juga dilakukan oleh para muslim. Contohnya Mulyono yang melakukan pencurian tas ibu-ibu.<sup>89</sup> Selain itu, ada juga pemuda muslim yang berniat mencuri, namun kemudian berubah niat untuk melakukan pemerkosaan, misalnya yang dilakukan oleh seorang pemuda muslim di Denpasar.<sup>90</sup> Kalau perilaku minus muslim dilakukan di wilayah muslim, orang tidak akan menanggapi agama si pelaku, tetapi jika kasus kriminal dilakukan muslim di wilayah non-muslim, maka tentu agama akan menjadi suatu hal yang diperhatikan, dan bagi sebagian orang akan mengkaitkan perilaku dengan agama yang dianut.

#### **F. Radikalisme Islam**

Problematisa lain yang dihadapi muslim Bali adalah munculnya kelompok atau ajaran radikalisme Islam ke wilayah Bali. Kaum radikal yang tidak mampu bersikap toleran, tentu akan melihat Bali sebagai sebuah wilayah yang jauh dari ukuran syariah. Pada dasarnya mereka ingin menegakkan Islam, namun terkadang cara yang mereka lakukan di luar batas pikiran manusia normal. Dasar niat menegakkan ajaran Islam malah membuat Islam dan ummatnya menjadi objek kebencian. Puncak radikalisme ini terjadi Bom Bali I (12 Oktober 2002) dan Bom Bali II (1 Oktober 2005) yang memicu dampak luar biasa tidak hanya bagi relasi Islam dan Hindu di Bali, tetapi juga bagi Indonesia dan Provinsi Bali, secara umum. Peristiwa berdarah itu sampai disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Pelakunya jelas orang yang mengaku muslim. Akibat dari peristiwa ini, secara umum, muslim Bali menjadi terdakwa dan dicurigai oleh masyarakat. Masjid, musalla dan atribut Islam lainnya menjadi objek kebencian. Tindakan mereka jelas telah merusak toleransi antar umat beragama yang telah terbangun secara baik. Bapak Mulyono mengatakan, efek dari bom Bali I dan Bom Bali II, umat Islam di Bali menjadi serba salah, dan yang lebih menyakitkan lagi dirasakan oleh orang yang berasal dari Lamongan (daerah asal dari

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Tugas Pribadi, tanggal 18 Februari 2020.

<sup>87</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4791369/tangkap-3-pengedar-narkotika-di-bali-polisi-sita-ribuan-pil-ekstasi>

<sup>88</sup> <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/20/175698/bnnp-bali-ungkap-sindikatan-narkotika-jaringan-lapas-karangasem>

<sup>89</sup> <https://bali.tribunnews.com/2020/05/12/sebagian-hasil-curian-dihabiskan-untuk-sewa-psk-mulyono-dituntut-dua-tahun-penjara>

<sup>90</sup> <https://bali.tribunnews.com/2019/11/19/kronologi-pemerkosaan-mahasiswa-di-denpasar-korban-teriak-pria-jember-ini-lari-telanjang-2-km>

Amrozi), sehingga semua penjual nasi pecel lele yang secara umum berasal dari Lamongan seakan menjadi terdakwa dan tidak bisa berdagang dalam waktu yang relatif lama.<sup>91</sup>

Berkaca dari peristiwa masa lalu itu, terlihat dalam masyarakat muslim asal Bali, bahwa umat Islam Bali tidak ingin adanya Islam radikal di Bali, karena dapat menyulut permusuhan antar kelompok, karena pada dasarnya Islam di Bali dapat ditebarkan secara damai sejak puluhan tahun dengan membina toleransi secara baik dalam masyarakat. Wildaniaty yang meneliti Islam di Bali pasca Bom Bali menyebutkan, bahwa yang patut disyukuri setelah kekacauan bom Bali adalah dengan kerja super keras dari MUI, FKUB, pemerintah dan juga masyarakat secara umum dapat mengembalikan citra Bali dan hubungan baik antara umat Islam dan umat Hindu (Wildaniaty, 2012, 132).

Secara sangat jelas beberapa nara sumber penelitian, mewakili Muslim Bali menyebutkan bahwa mereka sangat menolak keberadaan kelompok radikal Islam model bom Bali, yang secara nyata merusak citra Islam yang telah dibangun Muslim Bali dan menjadi beban besar mereka dalam membangun kembali relasi dengan saudara lingkungan mereka yang non muslim.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono, tanggal 26 Februari 2020.

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat di Bali sejak tanggal 17 s/d 27 Februari 2020, melalui telaah dokumentasi, pengamatan dan wawancara narasumber, peneliti menemukan beberapa fakta tentang pelaksanaan pendidikan keislaman Informal dan non formal masyarakat Islam Bali dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Pola pendidikan keislaman informal dalam lingkungan keluarga Muslim di Bali, dilaksanakan dengan beberapa pola yaitu: a) Memperkuat ketahanan keluarga Islam dengan membangun semangat Islam dalam keluarga, b) Senantiasa mengingatkan anak untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mengedepankan toleransi, c) Mengantarkan anak untuk belajar agama Islam di RA dan pengajian (TPA) yang dilaksanakan di lingkungan Islam, dan d) Mendidik anak di sekolah formal Islam (madrasah).
2. Pola pelaksanaan pendidikan non formal keislaman dalam lingkungan sosial Muslim Bali dilaksanakan dengan: a) Memperkuat peran dan posisi tempat ibadah (Masjid dan Musalla) yang terdapat di lingkungan muslim, b) Pelaksanaan pengajian mingguan bapak-bapak dari rumah ke rumah, c) Pelaksanaan majlis ta'lim kaum ibu-ibu dalam bentuk arisan, dan d) penyuluhan agama Islam oleh penyuluh KUA.
3. Persoalan realistik yang dihadapi Masyarakat Muslim Bali dalam pelaksanaan pendidikan keislaman. Para muslim Bali menghadapi beberapa situasi yang dalam waktu tertentu dapat menjadi persoalan serius dan keluar dari situasi nyaman. Beberapa plobematika tersebut adalah: a) Ancaman dari lahirnya RUU Bali, b) Kesulitan mendapat izin untuk pembangunan tempat ibadah baru, c) Penolakan terhadap kegiatan dan simbol Islam oleh kelompok tertentu, d) Problematika muallaf dan pembinaanya, e) Terdapat sebagian orang Islam di Bali yang berperilaku tidak Islami, dan f) Ancaman kelompok Islam Radikal.

Dari kesimpulan yang disajikan di atas dapat dipahami bahwa Muslim Bali baik dalam pendidikan keluarga, maupun dalam pendidikan akan senantiasa dapat terus melaksanakan ajaran agama Islam, karena mereka mempunyai pola pelaksanaan pendidikan agama Islam secara nonformal dan informal yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, terdapat ancaman eksternal terhadap keberadaan Muslim Bali, terkait dengan penguatan ajaran Hindu dan menjadikan Bali sebagai “daerah istimewa Hindu”,

yang dirancang melalui RUU Bali. Di samping itu juga terdapat ancaman secara internal yang dapat menodai keberadaan Muslim Bali, terutama tentang pembinaan muallaf yang masih lemah, munculnya Islam “Radikal” seperti kasus Bom Bali, dan kegiatan dakwah Islam yang tidak menjaga toleransi.

Pembinaan muallaf Bali perlu mendapat perhatian yang baik, sehingga para muallaf mempunyai pengetahuan Islam secara baik dan merasa nyaman sebagai penganut Islam, dan keberadaan mereka menjadi contoh di kalangan saudaranya yang belum Islam.

Keberadaan Islam radikal juga perlu mendapat perhatian yang baik, karena keberadaan mereka mengganggu kegiatan dakwah oleh sikap mereka yang tidak toleran. Perlu diingat bahwa Islam sampai ke Indonesia adalah dengan cara toleransi dan sosialisasi secara harmoni dalam masyarakat.

## Bibliografi

- Abdullah, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2012. *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, M. Imron. 2003. *Pendidikan Keluarga Bagi Anak*. Cirebon: Lektur.
- Agustian, Endy. 2017. "Nilai Nilai Lokal sebagai Basis Perencanaan Permukiman Muslim Berkelanjutan di Desa Pegayaman, Bali". *Jurnal Plano Madani*, 6(2), hal. 115-127.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 2000. *Fathul Baari Bi Syarh Shahih Bukhari*. Beirut: Daarul Fikr. Juz 10.
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh. tt. *al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Ahadits ar-Rasulsallahu alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Beirut: Daar al-Kitab al-Islami. Juz 11.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1981. *Ihya Ulum al-Dien*. Kairo: Dar asy-Syaeb.
- Ali, Mukti. 1969. *Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*. Yogyakarta: Yayasan An-Nida'.
- Al-Siba'i, Musthafa. 2011. *Sirah Nabawiah, Pelajaran dari Kehidupan Nabi*. Solo: Adicitra Intermedia.
- Alu Syaikh, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ishaq. 2008. *Lubâbu al-Tafsir min Ibrni Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. Jilid 8.
- Anwar, Choirul. 2018. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan". *Jurnal Pemikiran Islam Zawiyah*, 4(2), 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074>
- Arifin, M. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arini, Rahayu, dkk. 2017. "Kampung Kecicang Islam di Desa Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem, Bali (Latar Belakang Sejarah, Dinamika, dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA)". *Jurnal Widya Winayata*, 8 (2).
- Arkanudin. 2006. "Menelusuri Akar Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat". *Jurnal Komunikasi MEDIATOR*, 7(2), 185-194. DOI: <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1276>
- Armiwulan, Hesti. 2015. "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 44(4), 493-502. DOI: [10.14710/mmh.44.4.2015.493-502](https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502).
- Awang, Yaacob bin Yusoff & Che Bakar Che Mat. 2004. *Keperluan Kependidikan Islam Dalam Pengajian Ketamadunan*. Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca

- Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.  
<https://core.ac.uk/reader/12117410>.
- Bat, M., & Fasoli, L. 2013. Action Research as a Both-Ways Curriculum Development Approach: Supporting Self-Determination in the Remote Indigenous Child Care Workforce in the Northern Territory of Australia". *Action Research Journal*, 11(1), 52-72. DOI: <https://doi.org/10.1177/1476750312473341>
- Baxter J., & Chua, W. (2008). "The Field Researcher as Author-Writer". *Qualitative Research in Accounting & Management*, 5(2), 101-121. DOI: <https://doi.org/10.1108/11766090810888917>
- Bhasyar, Hamdan M. 2010. *Identitas Minoritas di Indonesia: Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan*. Jakarta: LIPI Press.
- Brannen, Julian (ed). 1996. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Afif. 2018. *Keanekaragaman Penduduk Dunia*. <chrome-extension://oemmdcbldboiebfnladdacbdm/adm/https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2018/11/3-keanekaragaman-penduduk-dunia.pdf>
- Bushori, Khairuddin, dkk. 2012. "Dinamika Konflik dan Integrasi Antara Etnis Dayak dan Etnis Madura (Studi Kasus di Yogyakarta Malang dan Sampit)". *Jurnal Afkaruna*, 8(1), 60-79. DOI: 10.18196/AII, JIS.2012.0006.
- Creswel, J. W. (2009). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwin, Muhajir. 2004. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 283-294. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.11061>.
- Diana, Nina. 2016. "Islam Masuk ke Bali dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Islam di Bali". *Jurnal Tamaddun*, 4(2), 49-68. DOI: [10.24235/tamaddun.v1i2.1178](https://doi.org/10.24235/tamaddun.v1i2.1178)
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. 2006. *Pedoman Pengelolaan TBM*. Jakarta: Dirjen PLS.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga*. Bandung: Rineka Cipta.
- Dwihantoro, Prihatin. 2013. "Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik". *Jurnal Politika*, 4(2), 13-21. DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.13-20>.
- Elkhairati. 2019. "Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945", *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 51-68. DOI: [10.29240/jhi.v4i1.776](https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.776).
- Gazalba, Sidi. 1979. *Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara.

- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta Pusat: Pustaka Jaya.
- Ghazali, Moqsith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama*. Jakarta: Kata Kita.
- Hakim, Abdul. 2010. "Negara dalam Perspektif Plato". *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 59-74. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/jiu.v9i1.1410>
- Hasan, Yunani. 2014. "Menelusuri Asal Usul Bangsa Melayu. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 27-30. DOI: <https://doi.org/10.36706/jc.v3i1.4751>
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selektta Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I. Pageh, Made. 2018. "Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam Di Bali". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 88-98. DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19411>.
- Ibn al-Atsir ,Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad. 1984. *Jâmi' al-Ushûl fî Ahâdîts ar-Rasûl*. Beirut: Dar Ihya at-Turats. Juz I.
- Ibnu Majah, Ibnu. 1998. *Sunan Ibnu Mâjah*. Kairo: Dar l-Hadis. Juz 3.
- Jannah, Miftahul. 2018. "Konsep Keluarga Idaman dan Islami". *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4 (2), 87-102. DOI: [10.22373/equality.v4i2.4538](https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538).
- Jannah, Siti Raudhatul. 2012. "Kegalauan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali". *Jurnal Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman*, 16(2), 443-464. DOI: <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.186>.
- Joesoef, Soelaiman. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kania, Dede. 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations". *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- Karim, M. Abdul. 2016. "Toleransi Umat Beragama di Desa Loloan, Jembrana, Bali (Ditinjau dari Perspektif Sejarah)". *Jurnal Analisis*, XVI (1), 1-32. DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.735>.
- Kartini, Indriana. 2011. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali". *Jurnal Masyarakat Indonesia*, XXXVII (2), 115-145. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmi.v37i2.635>.
- Khuza'i, Muhd. 2013. "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture". *Jurnal Kalimah*, 11(1), 101-118. DOI: [10.21111/klm.v11i1.486](https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486).
- Koentjaraningrat, dkk, 1984. *Kamus Istilah antropologi*. Jakarta: PPPB, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan.

- Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Komnas HAM. 2016. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kumalasari, Dyah. 2008. *Diktat Pengantar Sejarah Pendidikan I*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuntoro, Sodik A. 2006. "Pendidikan Nonformal (Pnf) Bagi Pengembangan Sosial". *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 1(2), 14-18. DOI: <https://doi.org/10.21009/IIV.0102.3>.
- Lazi1, Harvini, Rusdi Efendi, dan Endina Putri Purwandari. 2017. "Deteksi Warna Kulit Menggunakan Model Warna Cielab Neural Network Untuk Identifikasi Ras Manusia (Studi Kasus Ras: Kaukasoid, Mongoloid, Dan Negroid)". *Rekursif: Jurnal Informatika*, 5(2), 121-133.
- Mansur. 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariono, M. 2016. "Strategi Pemberantasan Buta Aksara Melalui Penggunaan Teknik Metastasis Berbasis Keluarga". *Jurnal Pancaran Pendidikan*, 5(1), 55-66.
- Mashad, Dhurorudin. 2014. *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mazzarol, T., Soutar, G. N., & Seng, M. S. Y. 2003. "The Third Wave: Future Trends in International Education". *International Journal of Educational Management*. 17(3), 90-99. DOI: <https://doi.org/10.1108/09513540310467778>.
- Miftahurrahman dan Hairuddin. 2018. "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosialkultural". *Jurnal Pendidikan Islam Al-Tadzkiyyah*, 9(1), 21-35. DOI: <https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603>.
- Miles, Metthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Sarasin. Ed. III. Cet. VII.
- Muhibbin, Zainul. 2011. "Wanita dalam Islam". *Jurnal Sosial Humaniora*, 4, (2), 109-120. DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.627>.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Nafis, Cholil. 2015. *Piagam Madinah dan Deklarasi Ham: Studi Historis dan Konseptual atas Nilai-Nilai Pluralisme Beragama*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nambo, Abdulkadir B. dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik, (Suatu Telaah dari Sistem Politik)". *Jurnal Mimbar*, XXI (2), 262-285. DOI: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>.
- Prasetya, L. Edhi. 2012. "Akulturasi Budaya pada Masyarakat Muslim Desa Pegayaman Buleleng Bali". *Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung*, 2(2), 56-63. DOI: <http://dx.doi.org/10.36448/jaubl.v2i2.305>.
- Purwanto. 2009. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surakarta. Pustaka Belajar.
- Putra, N. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri, Nella Sumika. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia (Vej)*, 4(1), 155-179, DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.2912>.
- Putri, Risa Herdahita, 2019. "Awal Kedatangan Manusia ke Nusantara", *Historia*, <https://historia.id/sains/articles/awal-kedatangan-manusia-ke-nusantara-v22Ra>
- Raihani. (2012). "Report on Multicultural Education in Pesantren". *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 42(4), 585-605. DOI: <https://doi.org/10.1080/03057925.2012.672255>.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rodiyah. 2018. "Alternatif Pemberantasan Buta Aksara bagi Kaum Perempuan Berbasis Masjid". *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 18(2), 1-7. DOI: [10.29300/syr.v18i2.1675](https://doi.org/10.29300/syr.v18i2.1675).
- Rudiansyah. 2016. *Pemahaman Ras, Entitas dan Multikulturalisme*, 2016. <https://kajianbudayablog.wordpress.com/2016/12/03/pemahaman-ras-etnisitas-dan-multikulturalisme/>
- Saemah Rahman, Mohd Izham Mohd dan Auzar Mohd. Hamzah. 2009. *Reformasi Pendidikan Serantau*. Bangi-Malaysia: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sagara, I Nyoman Yoga. 2018. "Kampung Sindu: Jejak Islam dan Situs Kerukunan di Keramas, Gianyar, Bali". *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 315-346. DOI: [10.31291/jlk.v16i2.563](https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.563).
- Saihu. 2019. "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Jembrana Bali)". *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 08(01), 69-90, DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v8i01.364>.
- Saniotis, A. 2012. "Muslims and Ecology: Fostering Islamic Environmental Ethics". *Contemporary Islam*, 6(2), 155-171. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>.

- Sarah, Hotma Nova Kartika. 2017. *Modul TOT Kader Kelompok Perempuan, Pemberdayaan Kelompok Perempuan*. Bogor: KPSHK.
- Sarjuni. 2018. "Konsep Ilmu dalam Islam dan Implikasinya dalam Praktik Kependidikan". *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 47-57. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jspi.v1i2.3208>.
- Sitepu, Bintang Petrus. 2012. "Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Sebagai Sumber Belajar". *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD INI*, 7(1), 42-56. DOI: <https://doi.org/10.21009/IIV.0701.4>.
- Smith, B. L., & MacGregor, J. 2009. "Learning Communities and the Quest for Quality". *Journal Quality Assurance in Education*, 17(2), 1-22. DOI: 10.1108/09684880910951354.
- Smith--Hefner, N. J. 2008. "Review of Robert Folger 'Images in Mind: Lovesickness, Spanish Sentimental Fiction and "Don Quijote." *The Journal of Asian Studies*, 67(2), 747--749.
- Sodikin, R. Abuy. 2003. "Konsep Agama Dan Islam". *Jurnal al-Qalam*, 20(97), 1-20, <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>.
- Sudiapermana, Elih. 2009. "Pendidikan Informal: Reposisi, Pengakuan dan Penghargaan". *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2).
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarwo. 2008. *Konsep Dasar Pendidikan Keaksaraan Nasional*. Jakarta: Jurusan PLS, FIP, UNJ.
- Sulisworo, Dwi, dkk. 2012. *Bahan Ajar Demokrasi*. Jakarta: Depdikbud Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional.
- Supriono, dkk. .2015 *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Teng, Muhammad Bahar Akkase. 2017. "Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah)". *Jurnal Ilmu Budaya*, 5(1), 69-75. DOI: <https://doi.org/10.34050/jib.v5i1%20Juni.2360>.
- Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson. 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco & London: Barnes & Noble Books.
- UU RI Nomor 52 Tahun 2009. *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Wahib, Abdul. 2011. "Pergulatan Pendidikan Agama Islam Di Kawasan Minoritas Muslim". *Jurnal Walisongo*, 19(2), 467-482. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.19.2.169>.
- Webster, Noah. 1975. *Webster's New Twentieth Century Dictionary*. Amerika Serikat: William Collins, Cet II.

- Weston, Burns H., Richard A. Falk, dan Anthony D ' Amato. 1990. *Basic Documents in International Law and World Order*. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Wildaniyati, Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo. 2018. "Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama Eksistensi Masyarakat Islam di Bali Pasca Bom Bali Tahun 2002-2012". *Humanis: Jurnal of Art and Humanities*, 22(1), 127-132. DOI: <https://doi.org/10.24843/JH.2018.v22.i01.p19>.
- Yunus, Mahmud. Tt. *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yusuf, A. Muri. 1986. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zaini, Muhammad Reza. 2014. "Perjalanan Menjadi Cina Benteng: Studi Identitas Etnis di Desa Situgadung." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, 19(1), 93-117. DOI: <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i1.4698>.



**BIODATA PENGUSUL**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	<b>Dr. Ismail Muhammad, Mag</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196704111996031001
5.	NIDN	2011046701
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201104670108001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Geurugok dan 11 April 1967
8.	E-mail	<a href="mailto:Ismaral14@gmail.com">Ismaral14@gmail.com</a>
9.	Nomor Telepon/HP	0811681467
10.	Alamat Kantor	Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Desa Kopelma, Darussalam – BandaAceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Tarbiyah dan Pendidikan
13.	Program Studi	Bahasa Arab
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Syarif Hidayatullah	UIN Syarif Hidayatullah
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Jakarta	Jakarta

3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pend. Bahasa Arab	Bahasa dan Sastra Arab	Bahasa dan Sastra Arab
4.	Tahun Lulus	1991	2000	2008

### C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2014	Korelasi antara aktifitas harian guru bahasa Arab dengan pelaksanaan tugas pembelajaran	DIPA UIN Ar-Raniry
2	2019	Kurikulum KKNI, Dan Pola Pengembangannya Pada Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab Di Indonesia (Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab Yang Berakreditasi Unggul)	DIPA UIN Ar-Raniry
3	2020	Pendidikan Keislaman Di Kalangan Minoritas Muslim Bali	DIPA UIN Ar-Raniry

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018	Anggota Komite SMAN 4 Banda Aceh	Mandiri
2.	2019	Ketua Dewan Pembina Komplek Perumahan UIN	Mandiri
3.	2020	Anggota Presidium Komplek Perumahan	Mandiri
4.	2020	Pengasuh Mahasiswa PKM Kab. Aceh Tengah	DIPA UIN Ar-Raniry

### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Makna Kurikulum: Dari Meteri Belajar sampai Perencanaan Pembelajaran	Intelektualita	Vol. 2, No. 2, Jan. 2015
2.	Deskripsi Historis Keberadaan Dayah,	Adabiya	Vol. 12, No. 15, Sept 2015

	Madrasah dan Sekolah di Aceh		
3.	Konsep Terjemahan, Takwil, Tafsir Dan Heurmenitika Dalam Ilmu Al-Quran	Mua'shirah	Vol. 13, No. 2, Juli 2016.
4.	Al-Manahij Dirasiyah wa Tathbiquha fi Tadris al-Lughah al-Arabiyah fi al-Jamiat al-Islamiah fi Indunisia	Seminar Bahasa Arab ASEAN	
5.	Kognisi Taxonomi Bloom Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Agama Islam Model Hot Di Indonesia	Dayah	
6.	The Development Of Kkni-Based Curriculum At The Arabic Language Education Programs In Indonesian Higher Education	Peuraden	

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	-	-		
2.				
dst.				

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Kurikulum KKNi, Dan Pola Pengembangannya Pada Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab	2019	Karya ilmiah	-

	Di Indonesia (Penelitian Pada Program Studi S1 Bahasa Arab Yang Berakreditasi Unggul)			
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 1 September 2020  
Ketua/Anggota Peneliti,

**Ismail Muhammad**  
NIDN : 2011046701.